

# **IMPLEMENTASI PROGRAM BEDAH RUMAH DALAM MEWUJUDKAN RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN MOJOKERTO**

( STUDI DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERHUBUNGAN KABUPATEN MOJOKERTO )

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**NUR AINI WIDYASTUTI**

**NIM. 145030100111101**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
MALANG  
2018**

## MOTTO

“Ya Allah, saat aku kehilangan harapan dan rencana, tolong ingatkan aku bahwa cinta-Mu jauh lebih besar daripada kekecewaanku, dan rencana yang Engkau siapkan untuk hidupku jauh lebih baik daripada impianku.”

**(Ali bin Abi Thalib)**

“Percaya rencana Allah adalah rencana terbaik di dunia, percayalah dibalik kesusahan yang di alami, Allah menyelipkan kemudahan dan hidayah dibalik itu semua”

**(Nur Aini Widyastuti)**





**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : Implementasi Program Bedah Rumah dalam Mewujudkan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mojokerto (Studi di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto)

Disusun oleh : Nur Aini Widyastuti

NIM : 145030100111101

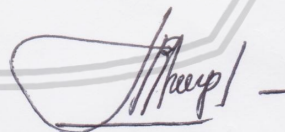
Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 31 Mei 2018

Komisi Pembimbing,



**Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si**

**NIP. 19690524 200212 2 002**

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 4 Mei 2018

Mahasiswa



Nama : Nur Aini Widyastuti

NIM : 145030100111101



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 6 Juli 2018

Waktu : 10.00 - 11.15 WIB

Skripsi Atas Nama : Nur Aini Widyastuti

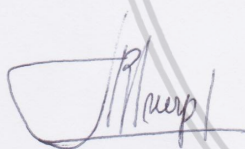
Judul : Implementasi Program Bedah Rumah dalam Mewujudkan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mojokerto (Studi di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto)

**Dan dinyatakan LULUS**

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua

Anggota

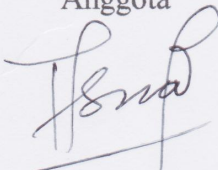


**Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si**  
**NIP. 19530807 197903 2 001**



**Oscar Radian Danar, S.AP, M.AP, P.hD**  
**NIP. 201107870516 1 001**

Anggota



**Trishawati, S.Sos, M.AP**  
**NIP. 19800307 200801 2 012**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Saya Persembahkan Karya saya  
untuk orang-orang terbaik dan tercinta dalam hidup saya, kepada  
ayah saya, bapak widya haryanto,  
dan ibu saya tuti sriwahyuni,  
yang selalu mendoakan, membimbing saya, dan selalu mengorbankan  
waktu dan tenaganya untuk saya,  
dan untuk Adik saya , salsabila putri widyastuti,  
serta almamater tercinta.*

Nur Aini Widyastuti, 2018. **Implementasi Program Bedah Rumah dalam Mewujudkan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mojokerto (Studi di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto)** Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing : Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si. 184 halaman + xvi

---

## RINGKASAN

Implementasi program merupakan suatu pelaksanaan, ataupun tindakan kebijakan/program yang dilakukan oleh sekelompok individu yang telah disusun dan direncanakan secara rinci dan cermat. Implementasi Program bedah rumah merupakan salah satu pelaksanaan program berupa bantuan sosial kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Bantuan yang diberikan berupa kegiatan memperbaiki komponen rumah/memperluas rumah untuk meningkatkan/memenuhi syarat rumah layak huni. Program Bedah Rumah ini bertujuan untuk menstimulan masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun/memperbaiki rumah masing-masing dengan dana yang diberikan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kabupaten Mojokerto, sedangkan situsnya berada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan. Sumber datanya primer diperoleh dari beberapa wawancara dari informan yang berkaitan, sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara, dan alat bantu lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Bedah Rumah dirumuskan melalui beberapa tahap, dengan menggunakan tahapan menurut Van Meter Van Horn, yaitu: (1) Standar dan Tujuan Kebijakan (2) Sumber daya; (3) Karakteristik Organisasi Pelaksana; (4) Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksana; (5) Sikap Para Pelaksana; dan, yang terakhir (6) Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik. Selain itu selama pelaksanaan tersebut, terdapat pula faktor pendukung program, yakni 1) Adanya dasar pelaksanaan yang jelas; 2) Komunikasi yang baik; 3) Dukungan dari para pelaksana program; 4) adanya itikad, sikap yang aktif dan sangat kooperatif dari penerima bantuan maupun mitra kerja; 5) Lingkungan yang mendukung. Selain adanya faktor pendukung, pasti adanya faktor penghambat, yakni : 1) Minimnya SDM; 2) tidak adanya/tidak mampu berswadaya dari penerima bantuan; 3) data pendukung lapangan tidak sesuai; 4) ketidak konsistennya penerima bantuan dalam menjalankan program; 5) adanya apriori dari pihak lain; 6) Lingkungan yang tidak mendukung, dan yang terakhir 7) pelaksanaan program tidak tepat waktu.

Nur Aini Widyastuti 2018. **The Implementation Of The Home Surgery Program In Realizing The Habitable Home In Mojokerto District (Study In Public Housing Office, Residential Area And Communications Mojokerto District)**. Undergraduate Thesis. Science Department of Public Administration, Faculty of Administration Science, Brawijaya University. Advisor Lecturer : Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si, 184 pages + xvi

---

## SUMMARY

Implementation of the program is an implementation, or action policies / programs conducted by a group of individuals who have been prepared and planned in detail and carefully to achieve the goals to be achieved. Implementation The home surgery program is one of the implementation programs of social assistance to Low Income Communities (LIC). Assistance in the form of activities to improve the components of the house / expand the house to improve / qualify the house is habitable. This Home Surgery Program aims to stimulate low-income people to build / repair their homes with the funds provided

This research uses descriptive research type with qualitative approach located in Mojokerto regency, while the site is in public housing office, residential and transportation area. Primary data sources were obtained from interviews from related informants, while secondary data were obtained from documents relating to the research topic. Data collection techniques through interviews and documentation. While the research instrument is the researcher himself, and some supporting tools such as interview guides, and other aids

The results showed that the Implementation of House Surgical Program was formulated through several stages, using the steps according to van Horn Van Meter, namely: (1) Standards and Policy Objectives (2) Resources; (3) Characteristics of Implementing Organizations; (4) Communication between the Organization and Implementing Activities; (5) Attitudes of the Implementers; and, most recently (6) Social, Economic, and Political Conditions. In addition, during the implementation, there are also factors supporting the program, namely 1) the existence of basic implementation of the goals; 2) Good communication; 3) Support from program implementers; 4) The existence of intent, active and highly cooperative attitude of beneficiaries and partners; 5) Supportive environment. In addition to the supporting factors, there must be inhibiting factors, namely: 1) lack of human resources; 2) absence / unable to compete with beneficiaries; 3) incompatible field support data; 4) inconsistency of beneficiaries in running the program; 5) the a priori existence of the other party; 6) The environment is not supportive, and the last 7) the implementation of the program is not timely.



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Bedah Rumah dalam Mewujudkan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mojokerto”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya
3. Bapak Dr. Fadhillah Amin, M.AP, Ph.D selaku Ketua Program Administrasi Publik Universitas Brawijaya
4. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Administrasi Publik yang telah mengajar saya dari semester satu hingga semester delapan

5. Ibu Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si selaku dosen pembimbing penulis yang telah dengan sabar dan ramah membimbing penulis hingga menyelesaikan penulisan skripsi
6. Bapak Gatot Soepriardi, S.Sos, MM selaku Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data yang penulis butuhkan
7. Bapak Adi Mahendarto, ST selaku Kepala Seksi Prasarana Sarana dan Utilitas yang telah sangat membantu penulis dalam mendapatkan data-data di lapangan dan telah membimbing penulis selama penelitian
8. Bapak Ahmad Yani, selaku Koordinator Fasilitator Lapangan yang telah berkenan memberikan penulis kesempatan untuk ikut verifikasi lapangan
9. Tenaga Fasilitator Lapangan DAK yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data saat penelitian
10. Sahabat-sahabat penulis sedari TK “Drew” Estilivia, Rifat, dan Wahyuti yang selalu memberikan semangat dan dukungan sampai detik ini.
11. Sahabat-sahabat penulis sedari SMA “trio chemmeh” (Ucha, Atun dan Elok) yang selalu memberikan dukungan, doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi hingga akhir.
12. Sahabat Gerakan Peduli Kasih (Retno, Della, Pungki, Nita, Ardian, Ridho, Djembar, dan Ucup) yang selalu memberikan dukungan, doa, dan memberikan solusi kepada penulis saat penulis dalam kesulitan, dan selalu ada saat penulis butuhkan.



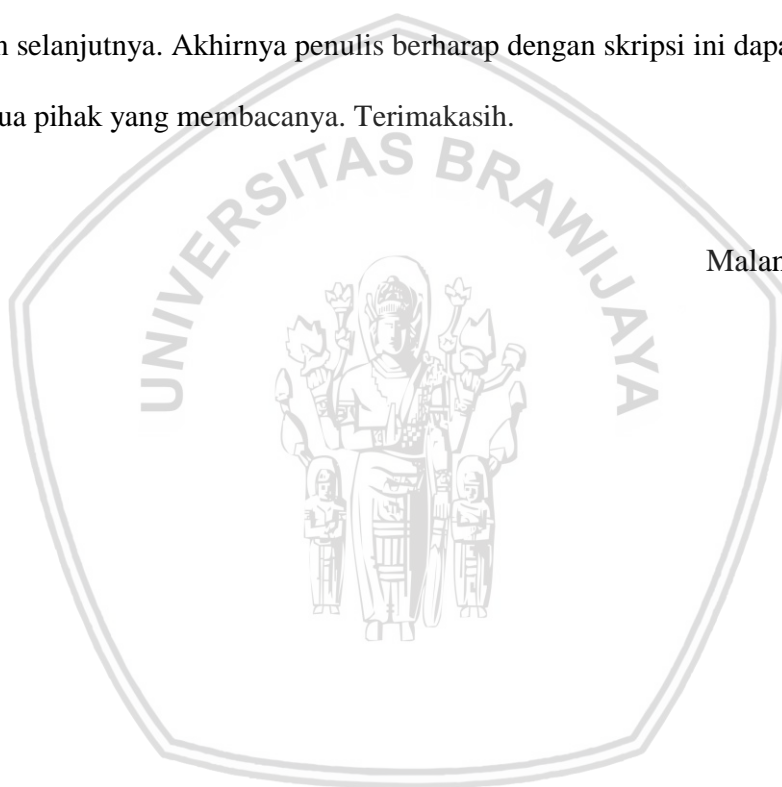
13. Kakak-kakak Sirempongku (Mas Andri, Kak Lintang, Kak Dessi, Kak Pinky, Mas Ikhwan, Kak Okta, Mas Dyan, dan Mas Erwin) yang telah mendukung, memberikan doa dan selalu memberikan solusi jika penulis mengalami kesulitan.
14. Teman tersayang Les GO Faizah dan Nuril yang selalu memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi hingga akhir.
15. Teman tersayang SOSMA EM UB 2016, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi hingga akhir.
16. Teman terbaik se-BEM, Diah, Afif, Bentaro, Syaiful, Rama, dan Raihan yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi hingga akhir.
17. Agenda Desa VDP tersayang dan tercinta yang selalu memberikan semangat serta dukungan penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi hingga akhir.
18. Keluarga habib tersayang dan tercinta yang selalu memberikan semangat serta dukungan penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi hingga akhir
19. KAF HUMANISTIK (Mba Ria, Mba Daniar, Mas Jibril, Mas Nanda) yang telah memberikan dukungan, dan solusi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi hingga akhir.

20. Teman-teman seperjuangan, yang tak bisa penulis sebut satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulis hingga akhir.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, masih perlu adanya koreksi, saran, dan kritik yang konstruktif dan sifatnya membangun agar dapat berhasil dalam penelitian selanjutnya. Akhirnya penulis berharap dengan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Terimakasih.

Malang, Juli 2018

**Penulis**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penulisan .....	11
D. Kontribusi Penelitian .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Administrasi Pembangunan .....	26
1. Ciri-ciri Administrasi Pembangunan .....	28
2. Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan .....	28
C. Konsep Implementasi .....	30
1. Pengertian Implementasi .....	30
2. Pengertian Program .....	33
3. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program .....	35
4. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi .....	40
D. Kemiskinan .....	41
E. Konsep Pemerintah Daerah .....	43
Kewenangan Pemerintah Daerah .....	45
F. Konsep Rumah .....	49
1. Konsep Rumah Tidak Layak Huni.....	51
2. Konsep Rumah Layak Huni .....	52
G. Program Bedah Rumah .....	59
1. Syarat Penerima Bantuan Program Bedah Rumah.	65
2. Proses atau Mekanisme Program Bedah Rumah ...	66

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	68
B. Fokus Penelitian .....	68
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	71
D. Jenis dan Sumber Data .....	72
E. Teknik Pengumpulan Data .....	74
F. Instrumen Penelitian .....	77
G. Analisis Data .....	79
H. Keabsahan Data .....	81

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum .....	84
a) Kabupaten Mojokerto .....	84
b) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Kab. Mojokerto .....	93
B. Rencana Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2017.....	113
1. Jumlah Penduduk Miskin .....	114
2. Jumlah PMKS yang dibantu .....	116
C. Penyajian Data .....	117
1. Implementasi Program Bedah Rumah dalam Mewujudkan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mojokerto .....	118
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Program Bedah Rumah .....	144
D. Analisis Data .....	
1. Implementasi Program Bedah Rumah dalam Mewujudkan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mojokerto .....	144
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Program Bedah Rumah .....	156

### **BAB V PENUTUP**

A. KESIMPULAN .....	163
1. Implementasi Program Bedah Rumah dalam Mewujudkan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mojokerto .....	163
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Program Bedah Rumah .....	170
A. SARAN .....	171

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>173</b>
-----------------------------	------------

<b>LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN .....</b>	<b>180</b>
--	------------

## DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Mojokerto tahun 2012-2017 .....	3
2	Daftar Rumah Layak dan Tidak Layak Huni di Kabupaten Mojokerto tahun 2017 .....	9
3	Komparasi Peneliti dengan Penelitian Terdahulu .....	19
4	Data Rekapitulasi Kegiatan Bedah Rumah Kab. Mojokerto th 2012-2016 .....	61
5	Tinggi dan Luas setiap kecamatan di Kabupaten Mojokerto .....	88
6	Jumlah Penduduk Kab. Mojokerto Menurut Jenis Kelamin per kecamatan Bulan Desember th 2017 .....	90
7	Produk Domestik Regular Bruto Kab, Mojokerto tahun 2014-2016 .....	92
8	Rekapitulasi RTLH Kab. Mojokerto tahun 2016-2017 .....	122
9	Daftar Anggaran Program Bedah Rumah thn 2016-2017 .....	128
10	Data CPB Menjadi Penerima Bantuan Program Bedah Rumah .....	129

## DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan (yang disederhanakan) .....	29
2	Model Kesesuaian Implementasi Program Korten .....	36
3	Model Implementasi Van Meter dan Van Horn .....	39
4	Proses Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya .....	66
5	Proses Kegiatan Dana Alokasi Khusus .....	67
6	Komponen Analisis Data Miles and Huberman .....	79
7	Peta Kabupaten Mojokerto .....	86
8	Jumlah Desa dan Kelurahan tiap kecamatan di Kab.Mojokerto tahun 2015 .....	87
9	Struktur Organisasi DPRKPP Kab. Mojokerto .....	95
10	Grafik Perbandingan Jumlah RTLH Seluruh Kecamatan di Kab. Mojokerto thn 2016-2017 .....	122
11	Struktur Organisasi Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum .....	127

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan masalah utama dalam suatu negara, tak terkecuali Negara Indonesia. Banyak hal yang disebabkan dan menyebabkan kemiskinan terjadi. Akibat kemiskinan, jutaan bahkan milyaran masyarakat di Indonesia kesulitan mendapatkan penghidupan yang layak, terjaminnya kesehatan, kesulitan mendapatkan pendidikan yang berkualitas bahkan banyak anak-anak yang harusnya sekolah memilih putus sekolah dan mengais rezeki. Bahkan terlebih parah akibat kemiskinan banyak masyarakat yang tinggal di tempat tinggal kumuh dan tidak layak huni. Hal ini juga dijelaskan dalam penelitian Sahat Maruli (2011) :

Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk (1) memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (2) Hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum; (3) Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman; (4) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau; (5) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; (6) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; (7) Hak rakyat untuk memperoleh keadilan; (8) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan; (9) Hak rakyat untuk berinovasi; (10) Hak rakyat menjalankan hubungan spiritualnya dengan Tuhan; dan (11) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik.

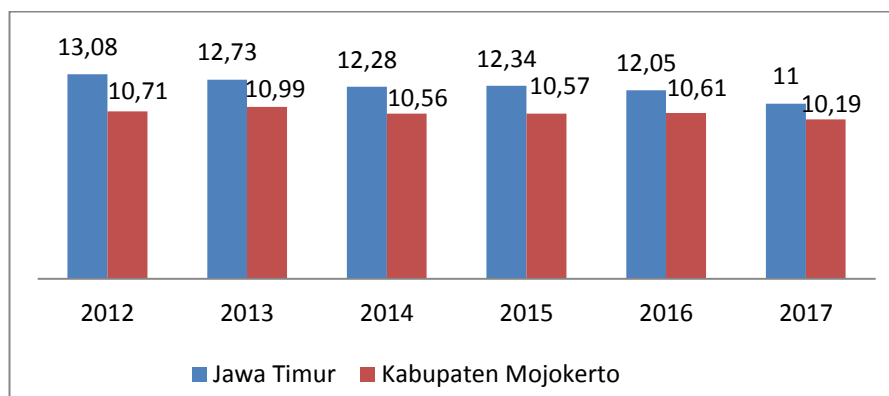
Kemiskinan biasa dikaitkan dengan Kebutuhan material, spiritual dan sosial. Ketiga kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan aktivitas, aksesibilitas dan produktivitas setiap orang, baik secara individu maupun kelompok. Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak



dapat dipenuhi, maka akan mempengaruhi aktivitas, aksesibilitas dan produktivitas, dan lebih lanjut akan mempengaruhi taraf kesejahteraan individu maupun kelompok. Oleh karena itu, kebutuhan pada setiap orang bersifat mutlak untuk dipenuhi. Kebutuhan manusia yang paling mutlak atau paling dasar harus terpenuhi adalah kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan.

Berdasar data Badan Pusat Statistik (2017) penduduk miskin yang ada di Indonesia mencapai 26,58 juta jiwa. , Provinsi Jawa Timur berada di urutan teratas daerah yang memiliki penduduk miskin terbanyak di Indonesia, sekitar 4.405.270 jiwa penduduk miskin atau berpenghasilan rendah atau sebesar 16,57 % penduduk miskin tinggal di Jawa Timur. Sebanyak 2.949.820 jiwa di antaranya berada di perdesaan. Sementara 1.455.450 jiwa tersebar di kota-kota besar. Batas penghasilan bulanan untuk sebuah keluarga miskin di Jawa Timur berkisar di angka Rp 342.092,00. Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kabupaten dengan penduduk miskin cukup rendah berdasar Badan Pusat Statistik tahun 2017 yakni 111.790 jiwa dengan total penduduk 1.138.262 jiwa, atau sekitar 9.8 % penduduk Kabupaten Mojokerto berpenghasilan rendah.





**Tabel 1 : Tingkat Kemiskinan Kabupaten Mojokerto tahun 2012-2017**

Sumber : Data sekunder diolah (BPS Jatim, 2018)

Berdasarkan gambar diatas dapat terlihat bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Mojokerto, dari tabel diatas persentase kemiskinan semenjak tahun 2012-2017 mengalami naik turun. Persentase tertinggi kemiskinan di Kabupaten Mojokerto terjadi pada tahun 2013, pada tahun 2013 persentase kemiskinan sebesar 10,99 %. Persentase kemiskinan di Kabupaten Mojokerto terendah yaitu tahun 2017, sebesar 10,19%. Peningkatan dan penurunan persentase kemiskinan salah satunya dipengaruhi oleh jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto, dimana tahun 2013 sebanyak 11.660.000 jiwa sedangkan mengalami penurunan jumlah penduduk miskin tahun 2017 sebesar 11.179.000 jiwa, yakni mengalami penurunan 481.000 jiwa. Dilihat dari tingkat garis kemiskinan bahwa tahun 2013 sebesar 280.779 (Rp/Kap/bulan) lebih rendah 64.709(Rp/Kap/bulan) dibanding tahun 2017 yakni 345.487 (Rp/Kap/bulan).

Rendahnya tingkat kemiskinan tidak luput dari peran pemerintah. Banyak undang-undang maupun peraturan pemerintah daerah yang mengatur tentang kesejahteraan masyarakatnya dari kemiskinan, seperti UU no 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, ataupun pasal 28 H Ayat 1:“Setiap orang

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Sudah sewajibnya pemerintah melayani segala kebutuhan hidup maupun kebutuhan dasar rakyatnya. Urusan wajib pemerintah daerah dalam melayani segala kebutuhan masyarakatnya pun diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dijelaskan pada pasal 12 tentang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.

Kewajiban pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34, yang berbunyi :

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34, diatas menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Hal ini menunjukan bahwa negara sangat memperhatikan setiap warga negara yang berkekurangan. Hal ini juga dijelaskan dalam penelitian Antonius Erwandi (2017) Arah penanggulangan kemiskinan lebih diprioritaskan pada pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat miskin, sehingga mereka dapat terlepas dari kemiskinan secara

mandiri dan berkelanjutan. Penanggulangan kemiskinan tentu bukan monopoli pemerintah dengan berbagai departemen sektoral yang ada, tetapi merupakan permasalahan multidimensi yang menjadi tanggung jawab seluruh pihak yang terkait.

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan hidup yang bermartabat. Berdasar penelitian Sarimah (2016) Permasalahan perumahan juga disebut sebagai salah satu yang dapat digunakan dalam menetapkan standar kemiskinan, dimana penduduk miskin menempati rumah yang tidak layak untuk dihuninya. Hal ini juga dibahas dalam penelitian Diva Dwi Syam Praditia (2017) Permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak, rendahnya mutu lingkungan permukiman, dan lemahnya perlindungan untuk mendapatkan dan menghuni perumahan yang layak dan sehat. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.

Berdasarkan rancangan kerja pemerintah daerah tahun 2016, dalam rangka menuntaskan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto, berbagai upaya dan kebijakan yang telah dilakukan pemerintah daerah, salah satunya melalui Program Bedah Rumah. Program bedah rumah merupakan salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah dalam menuntaskan kemiskinan dengan

meningkatkan kalitas rumah layak huni di Kabupaten Mojokerto. Program ini berbentuk bantuan stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan kualitas rumah yang awalnya tidak layak huni menjadi layak huni. Berdasarkan data lapangan masih banyaknya rumah-rumah tidak layak huni yang ada di Kabupaten Mojokerto, terutama daerah jauh dari pusat kabupaten atau daerah perbatasan, selain itu program bedah rumah merupakan program pemerintah daerah yang sudah lama terealisasi. Meskipun program sudah berjalan cukup lama, tetapi masih banyaknya warga awam yang kurang paham dan banyak tidak tahu tentang program bedah rumah ini, dikarenakan pemerintah hanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat berpenghasilan rendah saja.

Dasar pelaksanaan Program Bedah Rumah ini, memiliki 2 dasar hukum atau dasar pelaksanaan yakni melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pertama, dasar pelaksanaan program bedah rumah berdasarkan bantuan stimulan perumahan swadaya diatur dalam peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat no 13 tahun 2016 tentang bantuan stimulan perumahan swadaya,

“Perumahan Swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang ada di Indonesia pemerintah membuat program bantuan bedah rumah/ perumahan swadaya.”

Kedua, Regulasi atau dasar pelaksanaan Program bedah rumah berdasarkan Dana Alokasi Khusus diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 21/PRT/M/2017 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu:

“Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana Infrastruktur masyarakat yang belum mencapai Standar Pelayanan Minimal dan Norma Standar Pedoman dan Kriteria atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.”

Program bedah rumah mulai berjalan dari tahun 2012 yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto dibawah Bidang Ekonomi, dengan dibantu Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya Kabupaten Mojokerto. Dana Program ini bersumber dari dana APBD Kabupaten Mojokerto dan dana APBN . Program Bedah Rumah ini mampu mewujudkan perumahan dan pemukiman yang layak huni serta meningkatkan pelayanan dan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah. Maksud dari program bedah rumah ini yaitu tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerataan pembangunan sekaligus peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik, dalam hal ini merehabilitasi rumah yang tidak layak huni, sedangkan tujuannya yaitu, meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan perumahan dan pemukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan

teratur, mewujudkan rumah layak huni yang masuk dalam kategori rumah tangga miskin di Kabupaten Mojokerto.

Pada tahun 2012, sebanyak 1.260 unit rumah warga yang tidak layak huni mendapatkan bantuan stimulan, sebanyak 911 rumah mendapatkan bantuan stimulan yang bersumber pada dana APBN sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) per unit, dan sebanyak 349 rumah mendapatkan bantuan stimulan yang bersumber pada dana APBD sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Pada tahun 2014, meningkat sebanyak 1.596 unit rumah warga yang tidak layak huni mendapatkan bantuan stimulan, sebanyak 999 rumah mendapatkan bantuan stimulan yang bersumber pada dana APBN sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) per unit, dan sebanyak 597 rumah mendapatkan bantuan stimulan yang bersumber pada dana APBD sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), namun pada kenyataannya, berdasar Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto, sebesar 3,2% lebih rendah dari target karena penerima ada yang merantau, meninggal ataupun nama tidak sesuai dengan SK Bupati. Tahun 2015 target penerima bantuan mengalami penurunan yaitu hanya 26 unit rumah saja dengan dana sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah), dikarenakan program bantuan stimulan yang bersumber pada dana APBN tidak terealisasi. Pada tahun 2016 pun penerima bantuan hanya 280 orang dengan dana sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Mojokerto.



NO.	KECAMATAN	Jumlah Rumah ( Unit )	Rumah Layak Huni ( Unit )	Tidak Layak Huni ( Unit )
1	Dawarblandong	12.661	11.035	1.626
2	Kemlagi	15.395	13.858	1.537
3	Jetis	23.360	22.618	742
4	Gedeg	17.794	17.629	165
5	Trowulan	20.664	20.175	489
6	Sooko	18.111	17.730	381
7	Puri	19.409	19.115	294
8	Bangsals	13.752	13.604	148
9	Mojoanyar	12.753	12.606	147
10	Mojosari	20.672	20.406	266
11	Pungging	19.559	19.432	127
12	Kutorejo	15.761	15.564	197
13	Dlanggu	14.619	14.543	76
14	Ngoro	19.857	19.127	730
15	Trawas	9.491	9.401	90
16	Pacet	18.662	18.192	470
17	Jatirejo	10.727	10.110	617
18	Gondang	10.615	9.872	743
<b>Jumlah</b>		<b>293.862</b>	<b>285.017</b>	<b>8.845</b>

**Tabel 2 : Daftar Rumah Layak dan Tidak Layak Huni di Kabupaten Mojokerto th.2017**

Sumber : Data Sekunder diolah (dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto, 2018)

Pada tahun 2017 program bedah rumah mulai dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto yang baru dibentuk, dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berdasar usulan data rumah tidak layak huni tahun 2016, program bedah rumah dilanjutkan oleh dinas baru yakni Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto. Sebanyak 8.416 rumah tidak layak huni hanya mampu diberikan bantuan sebanyak 188 rumah (BSPS) dan 79 rumah

(DAK). Tetapi, pada kenyataannya dilapangan jumlah rumah tidak layak huni justru semakin bertambah menjadi 8.845 rumah tidak layak huni di Kabupaten Mojokerto.

Implementasi Program bedah rumah dapat dianalisis dan dapat dikatakan berhasil jika, sesuai dengan mekanisme atau ciri atau model implementasi, ada beberapa model implementasi yang dipelajari, salah satunya yakni model implementasi Van Meter Van Horn. Adanya enam faktor yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn yang mempengaruhi keberhasilan program, yang sangat sesuai diterapkan dalam menganalisis keberhasilan program bedah rumah, adanya satu faktor yakni komunikasi organisasi pelaksana dengan kegiatan pelaksana, yang tidak dimiliki model implementasi lainnya. Faktor komunikasi organisasi pelaksana dengan kegiatan pelaksana dalam program bedah rumah ini yakni komunikasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto dengan Pihak Luar (Tenaga Fasilitator Lapangan, Perangkat Desa dan Mitra Kerja).

Berdasarkan latar belakang serta adanya fenomena dengan didukung penelitian terdahulu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Implementasi Program Bedah Rumah dalam Mewujudkan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mojokerto”.

## **B. Perumusan Masalah**

Melalui Penjabaran di atas maka dirumuskanlah rumusan masalah sebagai berikut:



1. Bagaimana Implementasi Program Bedah Rumah dalam Mewujudkan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mojokerto ?
2. Bagaimana faktor penghambat dan faktor pendukung dari Implementasi Program Bedah Rumah dalam Mewujudkan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mojokerto?

### C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Program Bedah Rumah dalam Mewujudkan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung dari Implementasi Program Bedah Rumah dalam Mewujudkan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mojokerto.

### D. Kontribusi Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat praktis maupun teoritis, yaitu sebagai berikut :

#### A. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan sumbangsih pemikiran bagi DPRKP2 Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mojokerto
- b) Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi *stakeholder* dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi

pembangunan yang terintegrasi dalam pelaksanaan program bedah rumah.

#### B. Manfaat Teoritis

- a) Sebagai upaya pengembangan keilmuan, terutama bidang administrasi publik yang bermanfaat untuk mengembangkan intepretasi masalah yang dihadapi selama penelitian dilakukan.
- b) Hasil penelitian dapat dijadikan referensi atau bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian di masa mendatang tentang permasalahan yang sama.

#### E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini berdasarkan buku pedoman penyusunan ujian skripsi, terbagi menjadi lima bab, yaitu :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab I berisikan tentang latar belakang masalah penelitian yakni mengenai Kemitraan Strategis Pemerintah daerah dengan Bank Jatim dalam Program Bedah Rumah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Mojokerto. Terdapat rumusan masalah dalam penelitian tersebut, kontribusi penelitian yang diharapkan dengan dilakukan penelitian, dapat bermanfaat bagi pihak-pihak tertentu, dan juga sistematika penulisan pada skripsi ini.

##### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab II menjelaskan mengenai teori-teori dari berbagai literatur, buku ilmiah dan hasil penelitian lain yang berkaitan dan mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penyusunan skripsi ini, yang terdiri dari: Definisi dan Konsep Administrasi Pembangunan, Implementasi, Konsep Rumah dan Program Bedah Rumah, diperkuat dengan Penelitian Terdahulu.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab III berisikan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi, yaitu : jenis penelitian yang digunakan, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan , teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

### **BAB IV: PEMBAHASAN**

Bab IV menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data yang didapatkan mengenai Implementasi Program Bedah Rumah dalam Mewujudkan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mojokerto, dan dikaitkan dengan teori pada kajian pustaka.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab V merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran sebagai rekomendasi kearah perbaikan dalam rangka meningkatkan Rumah Layak Huni Kabupaten Mojokerto dalam program bedah rumah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan penelitian ini, maka berikut ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu berperan untuk membandingkan dan memperkuat analisis pada penelitian ini. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada periode penelitian, obyek penelitian, variabel yang digunakan. Posisi ini penting untuk membedakan penelitian peneliti dengan peneliti-peneliti terdahulu yang sudah dilakukan.

1. Ika Desiana (2016), melakukan penelitian tentang Kemampuan Masyarakat Miskin Memenuhi Persyaratan Bantuan Stimulan Bedah Rumah (Studi Kasus Di Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji). Metode penelitian yang digunakan yakni Metode Penelitian Kualitatif deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa program stimulan bedah rumah belum sepenuhnya mencapai keberhasilan dikarenakan ada beberapa masyarakat miskin di Desa Labuhan Makmur yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Penelitian ini cenderung melihat pada persyaratan pengambilan bantuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam pencapaian keberhasilan program stimulan bedah rumah.
2. Wahyu Jaya Nugraha (2015) melalui penelitiannya berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Bedah Rumah

Gerakan Gotong Royong Rakyat Bersatu (Gentong Rembes) Di Kabupaten Kulonprogo Tahun 2013-2014". Metode penelitian yang digunakan yakni Metode Kualitatif Deskriptif. Hasil penelitian ini yakni, dianalisis menggunakan Model implementasi kebijakan publik menurut Edward menunjuk 4 variabel yang berperan penting dalam keberhasilan yaitu (1) Komunikasi di tingkat masyarakat berjalan baik dengan metode sosialisasi yang telah dilakukan yaitu intensitas rapat setiap bulan. Para implementor dari sekretariat daerah, kecamatan, kelurahan, serta warga masyarakat juga cukup antusias dalam melaksanakan program ini. (2) Disposisi sikap pelaksana sudah menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan kemampuan yang dimiliki untuk mewujudkan kepentingan bersama. Pelaksanaan program bedah rumah jika dilihat dari sikap pelaksana yang menyangkut dengan kedisiplinan dan kejujuran itu meskipun itu sudah ditunjukkan oleh para implementator memang perlu menunjang keberhasilan pada implementasi program bedah rumah. (3) Dalam suatu kebijakan tentu diperlukan adanya sumber daya yang memadai baik itu dari sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Sumber daya manusia yang ada sudah mencukupi dan untuk sumber daya anggaran masih minim diperlukan tambahan anggaran lebih besar. (4) Struktur birokrasi adalah merupakan ketersediaan SOP yang mudah dipahami oleh implementator serta seberapa jauh rentang kendali antara pucuk pimpinan dan bawahan dalam struktur organisasi pelaksana.

Melihat dari pengertian tersebut maka untuk SOP dari pelaksanaan program bedah rumah ada 2 jenis yaitu dari atas dan bawah.

3. Eni dan Chikadibia Michael (2015) dengan penelitiannya berjudul *“Establishment of Strategies for Improving Affordable and Habitable Public Housing Provision in Anambra State, Nigeria ”*. Metode penelitian yang digunakan yakni Metode Penelitian Kuantitatif. Penelitian ini bertujuan mengetahui pembentukan strategi untuk meningkatkan penyediaan perumahan publik yang terjangkau dan layak huni di negara bagian nambra, Nigeria dengan melibatkan dua kota yakni Kota Awka dan Kota Onitsha. *Indeks Cronbach Alpha Technique* digunakan untuk uji reliabilitas yang memberikan nilai 0,90. Data diperoleh dengan menarik semua tanggapan positif untuk setiap kelompok penghuni (Awka atau Onitsha) sebagai tanggapan positif dan sebagai tanggapan negatif dan proporsi mereka diperoleh dan diisi di bawah kumpulan pengamatan (jumlah). Tanggapan yang belum diputuskan dibiarkan sebagai netral. Tanggapan lengkap adalah 797 yang terdiri dari 299 penghuni di Awka dan 498 penghuni di Onitsha
4. J.E Ukoje (2014) berjudul *“Implementation and the Challenges of the Mass Housing Scheme in Abuja, Nigeria”*. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menilai implementasi skema perumahan massal di Abuja untuk menentukan keterjangkauan unit perumahan bagi masyarakat. Namun, dari temuan penelitian, ditetapkan bahwa program ini dilaksanakan

tanpa perencanaan dan implementasi yang memadai dan mitra tampaknya tidak memiliki kemampuan. Hal ini berdampak pada kinerja keseluruhan skema karena tingginya biaya unit kehilangan hak penerima manfaat sasaran.

5. Emmanuel Jimenez (1983) melalui penelitiannya berjudul “*The Magnitude and Determinants of Home Improvement in Self-Help Housing: Manilas Tondo Projects*”. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kuantitatif. Penelitian ini menghasilkan bahwa perumahan swadaya proyek telah berhasil dalam merangsang investasi perumahan, dan yang lebih penting, bahwa investasi ini telah efektif dalam meningkatkan kualitas hunian rata-rata di daerah tersebut dengan besaran substansial dalam waktu singkat. Penelitian ini memiliki implikasi substansial mengenai generasi baru proyek pembangunan perkotaan, yang menekankan rasionalisasi sistem penguasaan lahan dan penggunaan swadaya. Meskipun basis data tidak memungkinkan untuk pengujian yang ketat, penelitian ini memberikan kepercayaan yang kuat kepada gagasan bahwa penyediaan jaminan kepemilikan memiliki dampak positif dan kuat pada pasokan layanan perumahan yang diduduki pemilik dari stok unit penghuni liar yang ada.
6. Arie Prayoga (2011) melalui penelitiannya berjudul “Implementasi Kebijakan Program Bedah Rumah (Studi Penelitian Tentang Bedah Rumah oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kedawung Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo)”. Metode yang Penelitian



ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, sedangkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa (1) Alasan pemerintah membuat kebijakan program bedah rumah adalah untuk membantu masyarakat agar dapat memiliki rumah sehat dan layak, dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. (2) Untuk pelaksanaan program bedah Rumah di Desa Kedawung sudah baik dan berhasil, karena memang pelaksanaan kebijakannya sudah sesuai dengan perda no 13 tahun 2010 begitu juga ada dukungan dari masyarakat setempat. (3) Kendala dalam program bedah rumah di Desa Kedawung adalah kurangnya dana yang dianggarkan mengingat ada sebagian kondisi rumah yang akan dibedah mengalami kerusakan yang parah yang tentunya membutuhkan dana tambahan.



**Tabel 3 Komparasi Peneliti dengan Penelitian terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode dan Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Ika Desiana (2016)	Kemampuan Masyarakat Miskin Memenuhi Persyaratan Bantuan Stimulan Bedah Rumah (Studi Kuantitatif, sedangkan penelitian ini 1. Target Penelitian terdahulu adalah masyarakat Kasus di Desa labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji)	Metode Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian Kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif  Hasil Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama ingin mengetahui dan menganalisa keberhasilan program stimulan bedah rumah.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu :  1. Target Penelitian terdahulu adalah masyarakat miskin penerima program stimulan bedah rumah. Sedangkan penelitian ini yaitu Pelaksana program yakni pemerintah daerah.  2. Jika penelitian terdahulu lebih membahas tentang keberhasilan program stimulan bedah rumah dengan seberapa banyak warga yang belum mendapatkan bantuan

Lanjutan Tabel 3

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode dan Hasil Penelitian	Perbedaan
				terserbut dikarenakan kemampuan masyarakat dalam memenuhi persyaratan. Sedangkan penelitian ini lebih membahas keberhasilan program dalam mewujudkan rumah layak huni.
2	Wahyu Jaya Nugraha (2015)	Faktor-Faktor Mempengaruhi Implementasi Program Bedah Rumah Gerakan Gotong Royong Rakyat Bersatu	Yang Metode Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu : 1. Hasil Penelitian terdahulu dianalisis menggunakan Model Implementasi menurut Edward, sedangkan penelitian ini menggunakan model implementasi menurut Van Metter dan van Hom.

Lanjutan Tabel 3

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode dan Hasil Penelitian	Perbedaan
		<u>(Gentong Rembes) Di Kabupaten Kulonprogo Tahun 2013-2014.</u>	Hasil penelitian terdahulu dan penelitian ini sama sama membahas implementasi program bedah rumah.	2. Penelitian terdahulu menekankan pada bagaimana faktor-faktor implementasi program bedah rumah dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi program bedah rumah di Kabupaten Kulonprogo, sedangkan penelitian ini menekankan pada bagaimana keberhasilan implementasi program dapat mewujudkan rumah layak huni berdasar PERMENPUPR di Kabupaten Mojokerto
3.	Eni dan Chikadibia Michael (2015)	<i>Establishment of Strategies for Improving Affordable and</i>	Metode penelitian terdahulu menggunakan penelitian kuantitatif	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu :

Lanjutan Tabel 3

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode dan Hasil Penelitian	Perbedaan
		<i>Habitable Public Housing Provision in Anambra State, Nigeria</i>	<p>Sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif deskriptif</p> <p>Hasil penelitian terdahulu bahwa penghuni di Awka menganggap dimensi perumahan publik ini lebih positif daripada penghuni di Onitsha.</p> <p>Perbedaan antara dua kota ini perlu ditangani untuk memvalidasi persyaratan ekuitas Adam di lingkungan binaan, sedangkan hasil penelitian ini membahas implementasi program pememintah dalam mewujudkan rumah layak huni.</p>	<p>1. Penelitian terdahulu menekankan pada strategi peningkatan penyediaan perumahan layak huni sedangkan penelitian ini menekankan pada implementasi program dalam mewujudkan rumah layak huni</p> <p>2. Teknik pengumpulan data penelitian terdahulu menggunakan kuisioner sedangkan penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur dan observasi.</p>
4	J.E Ukoje (2014)	<i>Implementation and The</i>	Metode Penelitian terdahulu dan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

Lanjutan Tabel 3

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus dan Hasil Penelitian	Perbedaan
		<i>Challenges of the Mass Housing Scheme in Abuja, Nigeria</i>	<p>penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian kualitatif Deskriptif</p> <p>Hasil Penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama membahas implementasi program yang berdampak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.</p>	<p>terdahulu yaitu: Penelitian terdahulu lebih mengarah pada kemitraan pemerintah-swasta dalam implementasi skema perumahan massal di Abuja, Nigeria. Sedangkan penelitian ini mengarah pada implementasi programnya.</p>
5	Emmanuel Jimenez (1983)	<i>The Magnitude and Determinants of Home Improvements in Self-</i>	<p>Metode penelitian terdahulu menggunakan Metode Penelitian Kuantitatif. Sedangkan</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu:</p> <p>1. Penelitian terdahulu menekankan pada</p>

Lanjutan Tabel 3

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode dan Hasil Penelitian	Perbedaan
		<i>Housing: Manila's Tondo Projects</i>	<p>Penelitian menggunakan Kualitatif deskriptif</p> <p>Hasil penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama membahas tentang program pemerintah di bidang perumahan swadaya bagi masyarakat miskin.</p>	<p>penyediaan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat liar/masyarakat yang tidak punya tempat tinggal. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada perwujudan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memang memiliki rumah dengan syarat-syarat tertentu.</p> <p>2. Penelitian terdahulu menggunakan teknik pengumpulan data dengan Kuisioner dan wawancara. Sedangkan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi.</p>



Lanjutan Tabel 3

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode dan Hasil Penelitian	Perbedaan
6	Arie Prayoga (2016)	Implementasi Kebijakan Program Bedah Rumah (Studi Penelitian tentang Bedah Rumah oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kedawung Kecamatan Kuipan Kabupaten Probolinggo)	Metode Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif Hasil penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama membahas tentang Implementasi Program Bedah Rumah yang berdampak bagi Masyarakat berpenghasilan rendah.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu : 1. Penelitian terdahulu menggunakan Model Implementasi menurut George C. Edwards, sedangkan metode penelitian ini menggunakan model implementasi menurut Van Metter dan van Hom. 2. Penyelenggara program bedah rumah di penelitian terdahulu yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat sedangkan Penyelenggara penelitian ini yakni DPRKP2 Kabupaten Mojokerto



## B. Administrasi Pembangunan

Administrasi Pembangunan merupakan pencabangan dari Ilmu Administrasi Negara yang tumbuh dan berkembang sebagai jawaban terhadap tuntutan perlunya paradigma baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan Administrasi Pembangunan tidak terlepas dari sebuah asal atau sumber ilmu tersebut berasal. Pertama, para ahli ilmu administrasi negara kemudian memberikan perhatian pula terhadap dua hal yaitu administrasi bagi negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang mengalami masa perubahan. Kedua, perhatian kepada masalah interelasi antara administrasi sebagai ilmu maupun sebagai praktek di kehidupan-kehidupan yang lain (Tjokroamidjojo, 1976:5).

Siagian (1979) dalam bukunya Administrasi Pembangunan mengungkapkan bahwa administrasi pembangunan meliputi dua pengertian yakni administrasi dan pembangunan.

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan-keputusan yang telah diambil. Sedangkan menurut Siagian (1973) dalam bukunya Filsafat administrasi, pembangunan diartikan sebagai usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*national building*).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Administrasi pembangunan menurut Siagian (1979) adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupan sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Tjokroamidjojo (1976:8),

Administrasi Pembangunan lebih berorientasi kepada peranan serta fungsi pemerintah negara-negara baru berkembang dalam pembangunan nasional secara berencana.

Montgomery dan Esman dalam (Tjokroamidjojo, 1976) mengatakan bahwa administrasi pembangunan meliputi perbaikan aparatur serta pelaksanaan daripada pemerintahan (*the development of administration*) dan juga berarti perbaikan dari pelaksanaan usaha pembangunan (*administration of the development*). Sedangkan menurut Weidner dalam (Tjokroamidjojo, 1976) berpendapat bahwa

*“development administration: public administration with a special purpose. Administration with the objective of political, economic and social development. Development administration is the process of guiding an organization toward the achievement of development objectives. It is action oriented, and it places administration at the centre in facilitating the attainment of development objectives.”*

(Administrasi pembangunan: administrasi publik dengan tujuan khusus. Administrasi dengan tujuan pembangunan politik, ekonomi dan sosial. Administrasi pembangunan adalah proses membimbing organisasi menuju pencapaian tujuan pembangunan. Ini berorientasi pada tindakan, dan menempatkan administrasi di pusat dalam memfasilitasi pencapaian tujuan pembangunan).

Kesimpulan yang dapat diambil dari pendekatan administrasi pembangunan diartikan sebagai proses dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu ke arah yang lebih baik ataupun demi kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan yang telah direncanakan oleh negara atau pemerintah.

Tjokroamidjojo (1976:10) bahwa administrasi pembangunan memiliki ciri, perumusan dan ruang lingkup administrasi pembangunan. Seperti telah diuraikan terdahulu maka cara pendekatan administrasi pembangunan lebih maju daripada administrasi negara. Cara pendekatan ini tidak saja mementingkan masalah tertib administrasi termasuk efisiensi kegiatan unit pemerintahan masa kini, melainkan ada pula berbagai ciri-ciri yang menunjukkan lebih majunya pendekatan administrasi pembangunan. Dua ciri utama yang membedakan, dan dianggap paling penting dikemukakan

## 1. Ciri-ciri Administrasi Pembangunan

Perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi dengan sangat pesat, tidak terkecuali ilmu administrasi pembangunan, sesungguhnya perkembangan ini merupakan akibat dari berbagai faktor yang semuanya berkisar pada dinamika umat islam. Begitu pula dengan disiplin ilmu administrasi pembangunan, ada beberapa ciri-ciri yang membedakan antara administrasi dengan ilmu-ilmu yang lain yaitu:

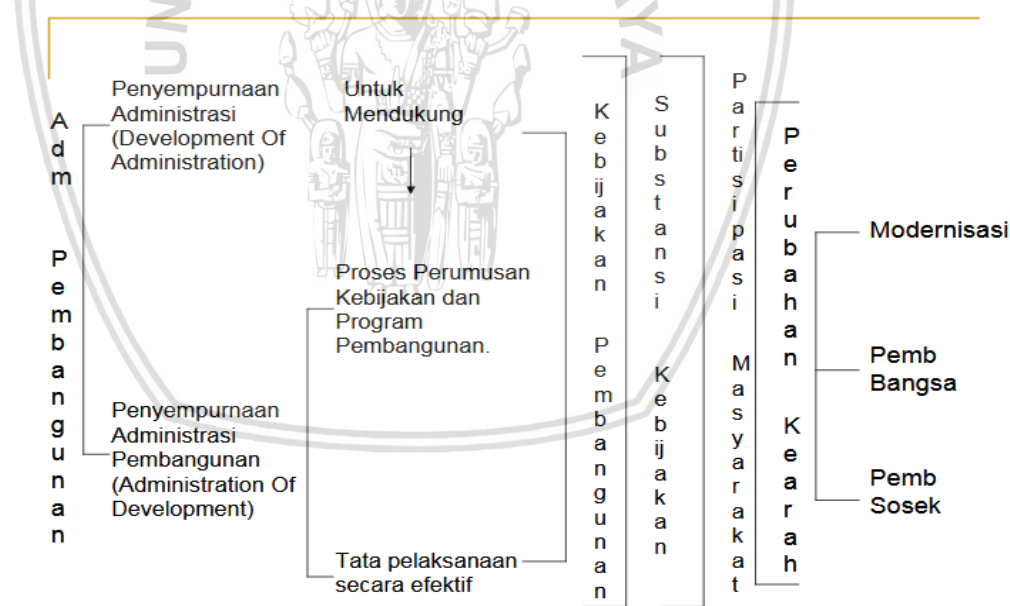
- a. Ciri pokok pertama, adalah orientasinya kepada usaha-usaha ke arah perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik. Bahkan administrasi pembangunan dimaksudkan untuk membantu dan mendorong kearah perubahan-perubahan besar (*basic changes*) diberbagai kegiatan/bidang kehidupan yang saling berkait-kait dan akan memberikan hasil akhir dari proses pembangunan.
- b. Ciri pokok kedua pendekatan administrasi pembangunan adalah bahwa perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan di bidang-idang lain seperti ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan Tjokroamidjojo sebelumnya tentang ciri pokok administrasi pembangunan, dalam buku yang sama yakni pengantar Administrasi Pembangunan, dijelaskan juga ruang lingkup administrasi pembangunan, yakni:

## 2. Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan

- a. Ruang lingkup administrasi pembangunan mempunyai dua fungsi yakni penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara. dalam hal ini usaha penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan , kepegawaian, tata kerja dan pengurusan sarana-sarana administrasi lainnya. Ini disebut *the development of*

- administration*. Fungsi lainnya adalah merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pembangunan (di berbagai bidang) serta pelaksanaannya secara efektif, ini disebut sebagai *the administration of development*.
- b. Administrasi untuk pembangunan dapat pula dibagi dalam dua sub fungsi. Pertama adalah perumusan kebijaksanaan pembangunan. Kedua, adalah pelaksanaannya secara efektif.
  - c. Pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tidak mungkin terlaksana dari hasil kegiatan pemerintahan saja. Fungsi yang lebih penting adalah membangun partisipasi masyarakat.



**Gambar 1 : Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan(yang disederhanakan)**

Sumber : Tjokroamidjoyo (1976:15)

Kedua ruang lingkup tsb saling berkaitan satu sama lain untuk menghasilkan kebijakan. Proses perumusan kebijakan masuk ke dalam ranah

administrasi negara sedangkan substansi nya bisa berasal dari ilmu lain (politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dsb) Formulasi kebijakan bisa saja merupakan proses politik maupun proses administrasi. Kebijakan yang sudah diambil, perlu ada partisipasi masyarakat. Di akhir dari dua ruang lingkup tadi adalah tercapainya perubahan suatu negara ke arah modernisasi, pembangunan bangsa, pembangunan sosial ekonomi. Kesimpulan dari ruang lingkup administrasi yaitu Administrasi Pembangunan menggunakan dua fungsi yaitu Pembangunan Administrasi dan Administrasi Pembangunan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi untuk menghasilkan suatu kebijakan. Partisipasi masyarakat diperlukan agar kebijakan tersebut bisa berhasil dan tercapailah perubahan ke arah modernisasi, pembangunan bangsa dan pembangunan sosial.

Administrasi pembangunan bukanlah satu-satunya teori yang menjadi acuan dalam penelitian ini, salah satu teori yang sangat penting dan menjadi acuan utama dalam penelitian ini yaitu teori Implementasi dan program.

### C. Konsep Implementasi

#### 1. Pengertian Implementasi

Implementasi dalam Theresia (2014:9-10) merupakan tahapan penting suatu program yang telah ditetapkan harus dilaksanakan agar tercapainya tujuan yang diinginkan serta merasakan dampaknya. Implementasi sebagai bagian suatu proses tindakan Administrasi dan Politik. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Peter S. Cleaves Solichin Abdul Wahab (2008:187), secara tegas menyebutkan, "Implementasi itu mencakup *a process of moving toward*

*a policy objective by means of administrative and political steps* (Cleaves, 1980). Secara garis besar, beliau mengatakan bahwa fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai *outcome* hasil akhir kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab itu, fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang dalam ilmu kebijakan publik disebut “*policy delivery system*” (system penyampaian/penerusan kebijakan publik) yang biasanya terdiri dari cara-cara atau saran-sarana tertentu yang dirancang atau didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan dan sasaran yang dikehendaki.

Ripley dan Franklin dalam Winarno (1986) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh seorang aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah “Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)” (Webster dalam Wahab, 2006:64).



Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2006:65). bahwa Implementasi adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Menurut Syauckani,dkk (2004:295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, *Pertama* persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. *Kedua*, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. *Ketiga*, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2005 : 65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implemetasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang



mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya yaitu program.

## **2. Pengertian Program**

Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Program menurut Kembara dalam penelitiannya (2010) adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknik Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai:

1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
5. Strategi pelaksanaan.

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperationalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan, sebagai berikut :

*“A programme is collection of interrelated project designed to harmonize and integrated various action an activities for achieving averral policy abjectives”* (suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integrasi untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan).

Menurut Charles O. Jones dalam Kembara (2010), pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran.
3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Berdasar penjelasan para ahli, dapat disimpulkan bahwa program adalah suatu kegiatan yang disusun dan direncanakan dengan sebaik mungkin untuk

mencapai tujuan yang diharapkan pelaksana maupun penikmat dari program itu, dalam hal ini yaitu pemerintah dan masyarakat.

### **3. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program**

Menurut Charles O. Jones (Siti Erna Latifi Suryana, 2009: 28) ada tiga pilar aktivitas dalam mengimplementasikan program yaitu:

#### **1. Pengorganisasian**

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

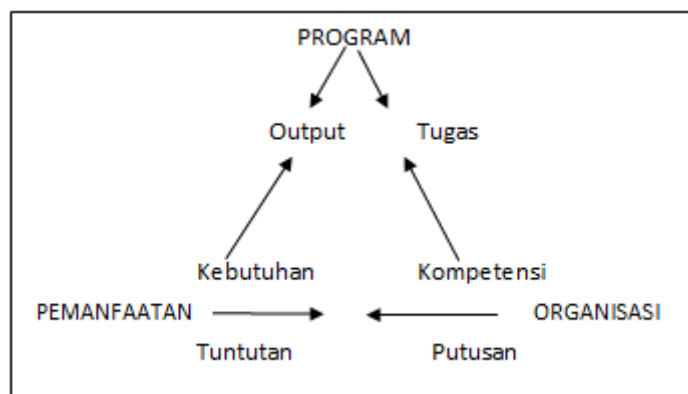
#### **2. Interpretasi**

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

#### **3. Penerapan atau Aplikasi**

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya..

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten. Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Model kesesuaian Korten digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2: Model kesesuaian Implementasi Program**

Sumber: Korten (Tarigan, 2000: 12)

Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program.

Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program (Haedar Akib dan Antonius Tarigan, 2000: 12)

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan apabila *output* program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas *output* tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan

oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan *output* program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan *output* program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat

Selain Implementasi program menurut Korten, terdapat **Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn** dalam (Agostiono, 2010). Enam variabel menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu :

1) Standar dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.

2) Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak

menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4) Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

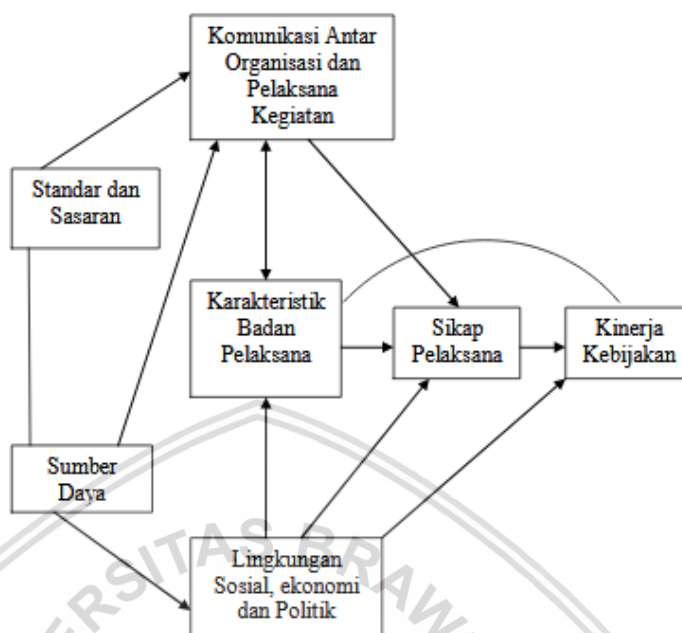
5) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam persepektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan *eksternal* turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Teori Van Metter dan Van Horn dapat digambarkan sebagai berikut.





**Gambar 3: Model Implementasi Van Metter dan Van Horn**

Sumber: Van Meter dan Van Horn dalam Indiahono (2009;40)

Dari beberapa definisi faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Oleh beberapa pakar di atas, model implementasi Van Meter dan Van Horn yang memiliki penekanan dan sangat sesuai untuk diterapkan dalam menganalisis keberhasilan Program Bedah Rumah. Implementasi program menghubungkan antara tujuan dan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah, hal ini sesuai dengan implementasi menurut Van Meter dan Van Horn bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan program direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak kepentingan.

#### 4. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi program salah satu pendapat yang sangat singkat dan tegas tentang keberhasilan atau kegagalan dari implementasi program disampaikan oleh Weimer dan Vining. Menurut Weimer dan Vining dalam Pasolong (2011:59) ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

- a) Logika yang digunakan oleh suatu program, yaitu sampai seberapa benar teori yang menjadi landasan program atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
- b) Hakikat kerja sama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerja sama merupakan suatu *assembling* produktif.
- c) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya. Implementasi program mempunyai berbagai hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Gow dan Morss dalam Pasolong (2011:59) mengungkapkan hambatan-hambatan tersebut antara lain: (1) hambatan politik, ekonomi dan lingkungan; (2) kelemahan institusi; (3) ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administratif; (4) kekurangan dalam bantuan teknis; (5) kurangnya desentralisasi dan partisipasi; (6) pengaturan waktu (*timing*); (7) sistem informasi yang kurang mendukung; (8) perbedaan agenda tujuan antara aktor; dan (9) dukungan yang berkesinambungan. Semua hambatan ini dapat dengan

mudah dibedakan atas hambatan dari dalam (faktor internal) dan dari luar (faktor eksternal). Menurut Turner dan Hulme dalam Pasolong (2011:59), hambatan dari dalam atau yang sering disebut dengan faktor internal dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan seperti sumber daya manusia, dana, struktur organisasi, informasi, sarana dan fasilitas yang dimiliki, serta aturan-aturan, sistem dan prosedur yang harus digunakan. Hambatan dari luar atau sering disebut sebagai faktor eksternal dapat dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung kepada proses implementasi program pemerintah, kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi sosial budaya dan sebaga

#### **D. Kemiskinan**

Menurut definisi World Bank, 1990 (dalam Suryono, 2010, h.233) kemiskinan adalah sebagai ketidak mampuan seorang individu memenuhi kebutuhan dasarnya. Konsep ini merupakan suatu masalah dalam pembangunan dengan ditandai oleh indikator adanya pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan dan kecemburuan sosial. Menurut Chambers (1987), kemiskinan dianggap sebagai proses interaksi dari berbagai faktor yang muncul sebagai akibat dari situasi ketidakadilan, ketidak pastian, ketimpangan, ketergantungan dalam struktur masyarakat. Menurut Robert Chamber dalam Jundi (2014) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi sedangkan kelima dimensi tersebut membentuk suatu perangkap kemiskinan (*deprivation trap*), yaitu (1) kemiskinan itu sendiri, (2)

ketidakberdayaan (*powerless*), (3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), (4) ketergantungan (*dependency*), dan (5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Penyebab kemiskinan menurut Paul Spicker dalam Jundi (2014) dapat dibagi menjadi empat :

- *Individual Explanation*

Kemiskinan yang terjadi karena karakteristik orang miskin itu sendiri, seperti malas, pilihan yang salah, gagal dalam berkerja, cacat bawaan, belum siap memiliki anak, dan sebagainya.

- *Familiar Explanation*

Kemiskinan yang terjadi karena faktor keturunan, dimana antar generasi ke generasi terjadi ketidakberuntungan yang terjadi terus menerus, sehingga tidak mampu memperoleh pendidikan yang seharusnya mampu untuk mengeluarkan dari jerat kemiskinan yang ada.

- *Subcultural Explanation*

Kemiskinan yang terjadi karena karakteristik yang terdapat dalam suatu lingkungan, yang berakibat pada moral dari masyarakat di sekitar lingkungan

- *Structural Explanation*

Kemiskinan yang terjadi karena adanya anggapan bahwa kemiskinan sebagai produk dari masyarakat, sehingga menciptakan adanya ketidakseimbangan dan ketimpangan sosial dengan membedakan status dan hak.

#### **E. Konsep Pemerintah Daerah**

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Widjaja (2013:37) mengungkapkan lebih lanjut definisi pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah adalah pelaksana fungsi-fungsi pemerintahan

daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kemudian memberikan deskripsi tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip negara kesatuan sebagai berikut:

- a. Sistem pemerintahan terdiri dari satuan pemerintahan nasional (pusat) dan satuan pemerintahan sub-nasional (pemerintah daerah). Kedaulatan yang melekat pada bangsa dan negara Indonesia tidak dibagi-bagi dalam satuan pemerintahan sub-nasional tersebut. Oleh karena itu, satuan pemerintah sub-nasional tidak memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang dasar dan undang-undang serta menyusun organisasi pemerintahannya sendiri;
- b. Pemerintah daerah merupakan hasil pembentukan dan pengembangan pemerintah pusat melalui proses hukum. Keberadaan satuan pemerintah daerah adalah tergantung (*dependent*) dan di bawah (*sub-ordinat*) pemerintah pusat. Walaupun demikian, penyelenggaraan pemerintahan Indonesia tidak akan sepenuhnya didasarkan pada atas sentralisasi belaka;
- c. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk (*pluralis*) yang mempunyai aspirasi beragam pula (*Bhineka Tunggal Ika*). Aspirasi yang beragam ini perlu diakomodasi secara kelembagaan dengan pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi di wilayah Indonesia dibentuk provinsi dan di wilayah provinsi dibentuk kabupaten dan kota sebagai daerah otonom;



d. Secara yuridis dan politis, otonomi daerah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat setempat dalam wilayah tertentu guna terselenggaranya pemerintahan sendiri sesuai dengan kondisi dan potensi masyarakat setempat. Dalam daerah otonom itulah terselenggaranya otonomi daerah.

Menurut Harris dalam (Nurcholis, 2005:20) pemerintahan daerah adalah: Unsur (turunan) pemerintahan daerah (*localself-governance*) yang diselenggarakan oleh badan-badan yang dipilih secara bebas dengan tetap mengakui supremasi pemerintahan nasional. Pemerintahan ini diberi kekuasaan, diskresi (kebebasan untuk mengambil kebijakan), tanggungjawab dan dikontrol oleh kekuasaan yang lebih tinggi. Berdasarkan penjelasan tersebut maka di dalam pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah bersama perangkatnya menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan mengadopsi dan mengakui supremasi pemerintahan nasional.

### **1. Kewenangan Pemerintah Daerah**

Pembagian urusan pemerintahan dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah. Urusan pemerintah ini adalah urusan pemerintahan yang mutlak menjadi kewenangannya dan urusan bidang lainnya yaitu bagianbagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan,

yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintahan atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/ atau pemerintah desa. Disamping itu, di luar urusan pemerintahan seperti di atas, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, atau melimpahkan sebagian urusan kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/ atau pemerintah desa berdasarkan asas tugas pembantuan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi dalam beberapa kriteria-kriteria (Widjaja, 2013:164) sebagai berikut:

- a. Kriteria eksternalitas, adalah penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan;
- b. Kriteria akuntabilitas, adalah penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan;
- c. Kriteria efisiensi, penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Widjaja (2013:165) menjelaskan bahwa Penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antar susunan pemerintahan, sebagai suatu sistem antara hubungan kewenangan pemerintah,

kewenangan pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota, atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis. Urusan lain yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib merupakan urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan warga negara antara lain: perlindungan hak konstitusional, perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketentraman, dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional. Penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara susunan pemerintahan, sebagai suatu sistem antara hubungan kewenangan pemerintah, kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota atau antar pemerintah daerah yang saling terkait, tergantung dan sinergis. Kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana yang diserahkan tersebut.

Setiap urusan pemerintahan senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, terdapat bagian yang diserahkan kepada provinsi dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada kabupaten/ kota. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang secara bertahap ditetapkan oleh pemerintah. Urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta

kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Urusan pemerintahan yang diserahkan/ dilimpahkan kepada gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan yang didekonsentrasikan.

Sunarno (2008:35) mengemukakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah merupakan urusan dalam skala provinsi dan dalam skala kabupaten/ kota, meliputi:

- Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- Penyelenggaraan tata tertib umum dan ketentraman masyarakat;
- Penanganan bidang kesehatan;
- Penyelenggaraan pendidikan
- Penanggulangan masalah sosial;
- Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- Pengendalian lingkungan hidup;
- Pelayanan pertanahan;
- Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- Pelayanan administrasi penanaman modal;
- Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan.

Menurut Dadang (2004:11-12) bahwa kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya. Kewenangan bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota adalah kewenangan di bidang pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan dan perkebunan. Lebih lanjut dijelaskan kewenangan daerah kabupaten/ kota yaitu mencakup semua kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan. Dengan demikian, pada dasarnya seluruh kewenangan sudah berada pada daerah kabupaten dan

daerah kota. Oleh karena itu, penyerahan kewenangan tidak perlu dilakukan secara aktif tetapi dilakukan melalui pengakuan oleh pemerintah.

Arenawati (2014:50) bahwa urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, baik untuk pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota meliputi urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Urusan pemerintahan yang secara nyata ada sesuai dengan kondisi dan kekhasan serta potensi yang dimiliki antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan pariwisata.

#### **F. Konsep Rumah**

Rumah (papan) merupakan kebutuhan utama atau kebutuhan primer selain sandang dan pangan. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 Tentang Bantuan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum, yaitu Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.

Menurut Budiharjo (1998) Rumah adalah salah satu jenis ruang tempat manusia beraktivitas, harus dipandang dari seluruh sisi faktor yang mempengaruhinya dan dari sekian banyak faktor tersebut, yang menjadi sentral adalah manusia, dengan kata lain, konsepsi tentang rumah harus mengacu pada tujuan utama manusia yang menghuninya dengan segala nilai dan norma yang dianutnya.

Masyarakat manusia mulai membangun rumah setelah meninggalkan cara hidup berburu dan mengumpulkan makanan. Tradisi masyarakat tradisional, rumah, lebih dari sekedar tempat bernaung dari cuaca dan segala hal yang dianggap musuh, sarat dengan makna-makna sebagai hasil pengejawantahan budaya, tradisi dan nilai-nilai yang dianut. Rumah dianggap sebagai mikrokosmos, yang merupakan bagian dari makrokosmos di luarnya serta lingkungan alam secara luas. Ini berarti bahwa manusia, konstruksi rumah, bahan bangunan serta lingkungannya seperti gunung, batu alam, pohon atau tumbuhan lainnya dapat disamakan sebagai makhluk hidup, bukan benda mati.

Menurut Aminudin (2007:12) Dalam banyak istilah rumah lebih digambarkan sebagai sesuatu yang bersifat fisik (*house, dwelling, shelter*) atau bangunan untuk tempat tinggal/ bangunan pada umumnya (seperti gedung dan sebagainya. Jika ditinjau secara lebih dalam rumah tidak sekedar bangunan melainkan konteks sosial dari kehidupan keluarga dimana manusia saling mencintai dan berbagi dengan orang-orang terdekatnya.

Jadi, dalam pandangan ini rumah lebih merupakan suatu sistem sosial ketimbang sistem fisik Hal ini disebabkan karena rumah berkaitan erat dengan manusia, yang memiliki tradisi sosial, perilaku dan keinginan-keinginan yang berbeda dan selalu bersifat dinamis, karenanya rumah bersifat kompleks dalam mengakomodasi konsep dalam diri manusia dan kehidupannya. Beberapa konsep tentang rumah:

1. Rumah sebagai pengejawantahan jati diri; rumah sebagai simbol dan pencerminan tata nilai selera pribadi penghuninya



2. Rumah sebagai wadah keakraban; rasa memiliki, rasa kebersamaan, kehangatan, kasih dan rasa aman.
3. Rumah sebagai tempat menyendiri dan menyepi; tempat melepaskan diri dari dunia luar, dari tekanan dan ketegangan, dari dunia rutin.

Kesimpulan yang dapat peneliti simpulkan dari beberapa teori para ahli yaitu Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia, rumah bukan hanya sebuah bangunan semata, tetapi rumah juga dapat diartikan wadah atau tempat yang nyaman dan tenang dari hiruk pikuk kehidupan.

### **1. Konsep Rumah Tidak Layak Huni**

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Menurut Muis dalam Praditia (2017) Adapun 9 kriteria khusus yang dikatakan sebagai rumah tidak layak huni, yaitu:

1. Luas lantai per kapita kota kurang dari empat meter persegi ( $4 \text{ m}^2$ ), desa kurang dari  $10 \text{ m}^2$ .
2. Sumber air tidak sehat, akses memperoleh air bersih terbatas.
3. Tidak ada akses MCK
4. Bahan bangunan tidak permanen atau atap/dinding dari bambu, papan, rumbia.
5. Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara.
6. Tidak memiliki pembagian ruangan.

7. Lantai dari papan bahan tidak permanen ataupun lantai dari tanah
8. Letak rumah tidak teratur dan berdempetan.
9. Kondisi rusak. Ditambah lagi dengan, saluran pembuangan air yang tidak memenuhi standar, jalan setapak menuju rumah pun tidak teratur.

## 2. Konsep Rumah Layak Huni

Menurut Hoesni (2013) Sebuah konsep akademis dikemukakan untuk menjawab maksud sebuah perumahan dan pemukiman. Pengertian layak boleh saja sangat subyektif, sehingga indikator layak bagi seseorang akan berbeda dengan orang lain, jelaslah bahwa layak itu bersifat relatif. Tentu saja dalam hal sebuah rumah dan pemukiman yang layak, harus tetap dibatasi oleh pemaknaan yang bisa diterima secara obyektif. Bertujuan agar bisa menjadi ukuran dalam rangka pengadaan rumah. Tidak hanya berlaku untuk yang berpenghasilan tinggi saja tapi juga bagi berpenghasilan rendah. Rumah yang layak harus dimaknai dari beberapa segi, diantaranya: segi sosiologis, filosofis, kesehatan, legalitas maupun dari sisi fisik, apalagi dari sisi energi yaitu hemat energi. Paling tidak rumah dan pemukiman yang layak memenuhi syarat minimal bagi kebutuhan manusia untuk hidup secara manusiawi. (<https://lizenhs.wordpress.com>).

### 1. Indikator Layak

Berdasarkan pendapat Husni (2013) Secara teoritis cukup sangat mudah menemukan kriteria rumah yang layak untuk dihuni. Secara sederhana dapat dimaknai sebuah rumah dan pemukiman yang layak adalah tempat tinggal keluarga dan warga dengan dukungan fasilitas lingkungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, mulai dari air bersih, penerangan, sanitasi saluran pembuangan limbah, serta aman bagi aktivitas penghuninya untuk meraih produktifitas. Indikator layak diantaranya: Filosofis, Sosiologis dan Legalitas.

- a) **Segi Filosofis**, dapat dikatakan bahwa rumah merupakan kebutuhan hakiki bagi makhluk hidup, selain sandang dan pangan, untuk menjaga eksistensi dan tempat berlindung bagi penghuninya.
- b) **Segi Sosiologis**, rumah harus menjadi tempat bagi penghuninya untuk beraktifitas yang produktif.

c) **Segi Legalitas**, harus ada jaminan kepastian hukum bagi penghuninya, sebagai tempat untuk berdiam, karena menyadari bahwa rumah itu miliknya secara sah. Penghuninya tidak khawatir bahwa sewaktu-waktu rumahnya akan dirampas, diusir atau digusur. Hanya bila saja rumah yang layak dari segi fisik saja.

d) **Segi Kesehatan**, terdapat beberapa prinsip yaitu:

1. Maksimalkan cahaya Matahari

Cahaya matahari dapat dimanfaatkan dengan optimal bila memperhatikan:

- a) Orientasi bangunan memperhatikan lintasan matahari. Bangunan sebaiknya mengarah ke utara atau ke selatan untuk menghindari radiasi panas matahari langsung.
- b) Ukuran ruangan dan bukaan jendela. Bukaan jendela yang lebar dianjurkan, lebar 2 kali tinggi ruangan, bertujuan agar cahaya/radiasi matahari maksimal masuk kedalam ruangan. Minimal intensitas cahaya di ruangan 60 lux dan tidak menyilaukan.

2. Ventilasi alami

Ventilasi bertujuan agar sirkulasi udara terjadi dalam ruangan secara alamiah. Ventilasi pada dinding minimal terdapat dibagian bawah dan atas, bagian bawah untuk masuk udara sejuk dan bagian atas untuk keluar udara hangat. Luas lubang udara (ventilasi) minimal 10% dari luas lantai. Aliran udara ini akan mendorong udara hangat dan CO<sub>2</sub> keluar ruangan rumah.

3. Bagian-bagian ruang seperti: lantai dan dinding tidak lembab serta tidak terpengaruh pencemaran seperti bau, rembesan air kotor maupun udara kotor.
4. Komponen-komponen dalam ruangan seperti:
  - a) Lantai, kedap air dan mudah dibersihkan.
  - b) Dinding: (1). Di ruang tidur, ruang keluarga dilengkapi dengan sarana ventilasi untuk pengaturan sirkulasi udara. (2). Di kamar mandi dan tempat cuci harus kedap air dan mudah dibersihkan. 3). Langit-langit harus mudah dibersihkan dan tidak rawan kecelakaan. 4). Bumbung rumah yang memiliki tinggi 10 meter atau lebih harus dilengkapi dengan penangkal petir. 5). Ruang di dalam rumah harus ditata agar berfungsi sebagai ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, ruang tidur, ruang dapur, ruang mandi dan ruang bermain anak. 6). Ruang dapur harus dilengkapi lubang udara sebagai sarana pembuangan asap.

#### 5. Manajemen limbah

Manajemen limbah bertujuan agar persediaan air bersih rumah tidak tercemar, artinya:

- 1). Limbah cair berasal dari rumah, tidak mencemari sumber air, tidak menimbulkan bau dan tidak mencemari permukaan tanah.
- 2). Limbah padat harus dikelola agar tidak menimbulkan bau, tidak menyebabkan pencemaran terhadap permukaan tanah dan air tanah.

#### 6. *Penampungan air hujan.*

Air hujan yang tertampung itu digunakan: 1). Menyiram kebun bunga, 2). Menyiram toilet (lubang kakus). 3). Pembersihan kendaraan dll. Cara ini akan mengefisienkan/menghemat air dari PDAM atau air yang diambil dari tanah (dipompa) atau sumur.

##### 1. *Lapisan permukaan tanah diluar bangunan*

Lapisan permukaan tanah diluar bangunan tembus air (air dapat merembes), jadi hindari permukaan tanah sekitar rumah yang kedap air. Ini bertujuan untuk menambah persediaan air tanah dan/atau mengurangi genangan air/banjir di musim hujan.

8. *Terdapat sarana penyimpanan makanan yang aman dan higienis.*

9. *Tidak terdapat binatang penular penyakit, seperti sarang tikus dirumah,dll.*

#### f) **Segi Energi**

Rumah sebaiknya hemat energi, bila tidak energi itu akan merupakan beban yang harus ditanggung (dibayar) selama rumah itu ditempati atau sebelum dirobohkan. Rumah hemat energi adalah rumah yang banyak memanfaatkan penerangan alami dari matahari di siang hari artinya tidak menyalakan lampu (penerangan) buatan di siang hari dalam rumah, jadi terdapat lubang kukaan cahaya (jendela) yang memadai untuk menerangi ruangan rumah. Demikian pula untuk menggerakkan udara, yaitu aliran udara alamiah bukan buatan Seperti kipas atau tata udara, artinya udara bergerak secara alami dengan memanfaatkan perbedaan tekanan udara di

dalam rumah dan luar rumah, artinya rumah harus mempunyai lubang udara (ventilasi) yang memadai, sehingga udara dalam ruangan dapat bergerak leluasa masuk-keluar rumah tanpa bantuan kipas atau yang sejenisnya. Hemat energi sejalan dengan rumah sehat.

Menurut Syarief (2000), indikator permukiman atau rumah yang layak huni tidak jauh berbeda dengan Hoesni, Beberapa kriteria permukiman atau kawasan permukiman yang layak adalah sebagai berikut;

a. Jaminan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum mengambil banyak bentuk, diantaranya penyewaan akomodasi (publik dan swasta), perumahan kolektif, kredit, perumahan darurat, permukiman informal, termasuk penguasaan tanah dan properti. Meskipun ada beragam jenis perlindungan hukum, setiap orang harus memiliki tingkat perlindungan hukum yang menjamin perlindungan hukum dari pengusiran paksa, pelecehan, dan ancaman lainnya. Negara Pihak harus secara bertanggung jawab, segera mengambil tindakan-tindakan yang bertujuan mengkonsultasikan jaminan perlindungan hukum terhadap orang-orang tersebut dan rumah tangga yang saat ini belum memiliki perlindungan, konsultasi secara benar dengan orang-orang atau kelompok yang terkena.

b. Ketersediaan layanan, bahan-bahan baku, fasilitas, dan infrastruktur. Tempat tinggal yang layak harus memiliki fasilitas tertentu yang penting bagi kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan nutrisi. Semua penerima manfaat dari hak atas tempat tinggal yang layak harus memiliki



akses yang berkelanjutan terhadap sumber daya alam dan publik, air minum yang aman, energi untuk memasak, suhu dan cahaya, alat-alat untuk menyimpan makanan, pembuangan sampah, saluran air, layanan darurat.

c. Keterjangkauan.

Biaya pengeluaran seseorang atau rumah tangga yang bertempat tinggal harus pada tingkat tertentu dimana pencapaian dan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar lainnya tidak terancam atau terganggu. Tindakan harus diambil oleh Negara Pihak untuk memastikan bahwa persentasi biaya yang berhubungan dengan tempat tinggal, secara umum sepadan dengan tingkat pendapatan. Negara Pihak harus menyediakan subsidi untuk tempat tinggal bagi mereka yang tidak mampu memiliki tempat tinggal, dalam bentuk dan tingkat kredit perumahan yang secara layak mencerminkan kebutuhan tempat tinggal. Dalam kaitannya dengan prinsip keterjangkauan, penghuni harus dilindungi dengan perlengkapan yang layak ketika berhadapan dengan tingkat sewa yang tidak masuk akal atau kenaikan uang sewa. Di masyarakat, dimana bahan-bahan baku alam merupakan sumber daya utama bahan baku pembuatan rumah, Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan bahan baku tersebut.

d. Layak huni.

Tempat tinggal yang memadai haruslah layak dihuni, artinya dapat menyediakan ruang yang cukup bagi penghuninya dan dapat melindungi

mereka dari cuaca dingin, lembab, panas, hujan, angin, atau ancaman-ancaman bagi kesehatan, bahaya fisik bangunan, dan vektor penyakit. Keamanan fisik penghuni harus pula terjamin. Komite mendorong Negara Pihak untuk secara menyeluruh menerapkan Prinsip Rumah Sehat yang disusun oleh WHO yang menggolongkan tempat tinggal sebagai faktor lingkungan yang paling sering dikaitkan dengan kondisi-kondisi penyebab penyakit berdasarkan berbagai analisis epidemiologi; yaitu, tempat tinggal dan kondisi kehidupan yang tidak layak dan kurang sempurna selalu berkaitan dengan tingginya tingkat kematian dan ketidaksehatan.

e. Aksesibilitas.

Tempat tinggal yang layak harus dapat diakses oleh semua orang yang berhak atasnya. Kelompok-kelompok yang kurang beruntung seperti halnya manula, anak-anak, penderita cacat fisik, penderita sakit stadium akhir, penderita HIV-positif, penderita sakit menahun, penderita cacat mental, korban bencana alam, penghuni kawasan rawan bencana, dan lain-lain harus diyakinkan mengenai standar prioritas untuk lingkungan tempat tinggal mereka.

f. Lokasi.

Tempat tinggal yang layak harus berada di lokasi yang terbuka terhadap akses pekerjaan, pelayanan kesehatan, sekolah, pusat kesehatan anak, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Di samping itu, rumah hendaknya tidak didirikan di lokasi-lokasi yang telah atau akan

segera terpolusi, yang mengancam hak untuk hidup sehat para penghuninya.

g. Kelayakan budaya.

Cara rumah didirikan, bahan baku bangunan yang digunakan, dan kebijakan-kebijakan yang mendukung kedua unsur tersebut harus memungkinkan pernyataan identitas budaya dan keragaman tempat tinggal. Berbagai aktivitas yang ditujukan bagi peningkatan dan modernisasi dalam lingkungan tempat tinggal harus dapat memastikan bahwa dimensi-dimensi budaya dari tempat tinggal tidak dikorbankan, dan bahwa, diantaranya, fasilitas-fasilitas berteknologi modern, juga telah dilengkapi dengan semestinya. (<https://lizenhs.wordpress.com>).

#### **G. Program Bedah Rumah**

Program bedah rumah di Kabupaten Mojokerto mulai terealisasi dari tahun 2012 yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mojokerto dibawah Bidang Ekonomi, dengan dibantu Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya Kabupaten Mojokerto. Dana Program ini bersumber dari dana APBD Kabupaten Mojokerto dan dana APBN. Dasar pelaksanaan program bedah rumah yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Mojokerto adalah Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial, yaitu:

“Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”

Program Bedah Rumah ini mampu mewujudkan perumahan dan pemukiman yang layak huni serta meningkatkan pelayanan dan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah. Maksud dari program bedah rumah ini yaitu tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerataan pembangunan sekaligus peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik, dalam hal ini merehabilitasi rumah yang tidak layak huni, sedangkan tujuannya yaitu, meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan perumahan dan pemukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur, mewujudkan rumah layak huni yang masuk dalam kategori rumah tangga miskin di Kabupaten Mojokerto.

N O	TAHUN	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH UNIT TERBANGUN	PAGU ANGGARAN PER UNIT (Rp)
1	2012	APBN (BSPS)	911	6.000.000
		APBD Kab. Mojokerto	349	5.000.000
		CSR	60	5.000.000
2	2013	APBN (BSPS)	999	
		APBD Kab. Mojokerto	597	6.000.000
		CSR	60	5.000.000
3	2014	APBN (BSPS)	285	
		APBD Kab. Mojokerto	488	6.000.000
		CSR	60	5.000.000
4	2015	APBN (BSPS)	-	-
		APBD Kab. Mojokerto (APBD)	26	7.000.000
		APBD Kab. Mojokerto (P-APBD)	382	7.500.000
		KODAM	1.000	5.000.000
		CSR	60	5.000.000
5	2016	APBN (BSPS)	-	-
		APBD Kab. Mojokerto	280	10.000.000
		CSR	-	-
		<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>5.557</b>	

**Tabel 4: Data Rekapitulasi Kegiatan Bedah Rumah Kabupaten Mojokerto tahun 2012-2016**

Sumber : Data Sekunder diolah, (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Mojokerto, 2018)

Pada tahun 2012, sebanyak 1.260 unit rumah warga yang tidak layak huni mendapatkan bantuan stimulan, sebanyak 911 rumah mendapatkan bantuan stimulan yang bersumber pada dana APBN sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) per unit, dan sebanyak 349 rumah mendapatkan bantuan stimulan yang bersumber pada dana APBD sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Pada Tahun 2013, Pada tahun 2014, meningkat sebanyak 1.596 unit rumah warga yang tidak layak huni mendapatkan bantuan stimulan, sebanyak 999 rumah mendapatkan bantuan stimulan yang bersumber pada

dana APBN sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) per unit, dan sebanyak 597 rumah mendapatkan bantuan stimulan yang bersumber pada dana APBD sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)., namun pada kenyataannya, berdasar Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto, sebesar 3,2% lebih rendah dari target karena penerima ada yang merantau, meninggal ataupun nama tidak sesuai dengan SK Bupati. Tahun 2015 target penerima bantuan mengalami penurunan yaitu hanya 26 unit rumah saja dengan dana sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah), dikarenakan program bantuan stimulan yang bersumber pada dana APBN tidak terealisasi. Pada tahun 2016 pun penerima bantuan hanya 280 orang dengan dana sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Mojokerto.

Pada tahun 2017 program bedah rumah berpindah tangan ke Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (DPRKP2) Kabupaten Mojokerto yang baru dibentuk, dikarenakan adanya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah bahwa program bedah rumah dilanjutkan oleh ibu baru yakni Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari dinas tersebut. Program bedah rumah yang dijalankan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, secara maksud dan tujuan tidak jauh berbeda dengan program bedah rumah yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan (2012-2016), ada 2 (dua) hal yang paling mendasar yang membedakan kedua



program tersebut, yaitu sumber dana dan proses atau mekanisme program bedah rumah. Jika pada tahun 2012-2016 sumber dana program bedah rumah berasal dari dana APBD Kabupaten Mojokerto dan dana APBN, berbeda dengan tahun 2017 yakni dananya bersumber dari APBN saja, dengan memiliki 2 dasar pelaksanaan yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pertama, dasar pelaksanaan program bedah rumah berdasarkan bantuan stimulan perumahan swadaya diatur dalam peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat no 13 tahun 2016 tentang bantuan stimulan perumahan swadaya.

Kedua, Regulasi atau dasar pelaksanaan Program bedah rumah berdasarkan Dana Alokasi Khusus diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 21/PRT/M/2017 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu:

“Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana Infrastruktur masyarakat yang belum mencapai Standar Pelayanan Minimal dan Norma Standar Pedoman dan Kriteria atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.”

Dasar pelaksanaan program bedah rumah berdasar dana APBN diatur dalam peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat no 13 tahun 2016 tentang bantuan stimulan perumahan swadaya,

“Perumahan Swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah

baru beserta lingkungan. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang ada di Indonesia pemerintah membuat program bantuan bedah rumah/ perumahan swadaya.”

Jika tahun 2012-2016, dana yang diterima penerima bantuan berupa uang langsung tunai dan diberikan langsung kepada penerima, tetapi tahun 2017 dana yang diterima penerima bantuan langsung masuk ke rekening masing-masing penerima, dan dana cair bertahap hingga pembangunan selesai.

Pada tahun 2017 ini, Berdasar usulan data rumah tidak layak huni tahun 2016 yang diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mojokerto, Sebanyak 8.416 rumah tidak layak huni hanya mampu diberikan bantuan sebanyak 188 rumah (BSPS) dan 79 rumah (DAK). Tetapi, pada kenyataannya dilapangan jumlah rumah tidak layak huni justru semakin bertambah menjadi 8.845 rumah tidak layak huni di Kabupaten Mojokerto. Dana pada program bedah rumah tahun 2017 pun meningkat, dari Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) per unit rumah menjadi Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta) per unit rumah. Sedang, target penerima bantuan tahun 2018 bertambah menjadi 588 penerima bantuan, dengan rincian 281 penerima program bedah rumah dengan dasar BSPS dan 307 penerima program bedah rumah dengan dasar DAK. Pelaksanaan kegiatan BSPS dan DAK sebenarnya sama, sama-sama bersumber dari dana APBN, proses atau mekanismenya pun sama, hanya saja jika DAK, prosesnya dilaksanakan atau dijalankan oleh Kabupaten atau Daerah, sedang BSPS langsung dari provinsi. Jika DAK dasar penerimanya hanya kecamatan-

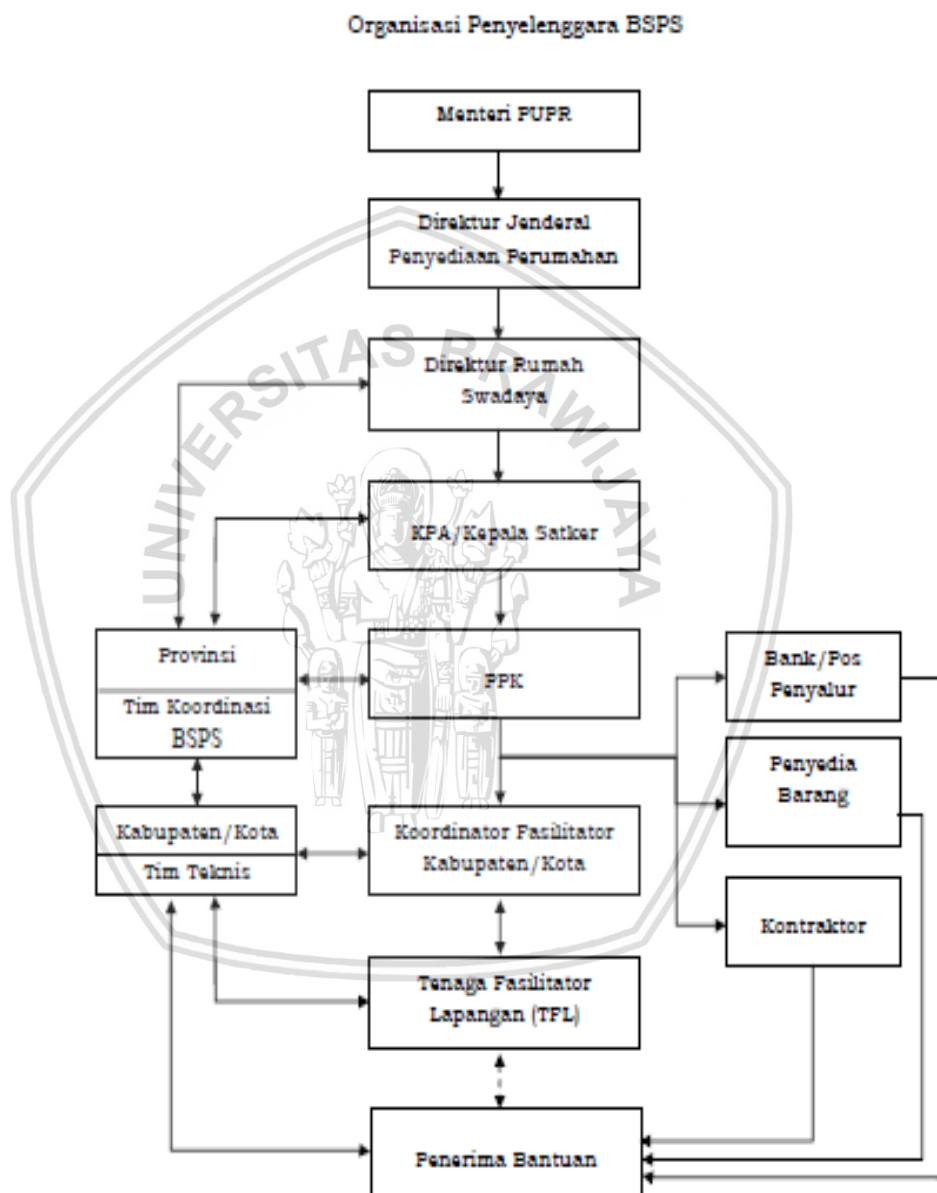
kecamatan yang masuk dalam KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) sedang BSPS, kecamatan selain kecamatan KOTAKU.

### **1. Syarat Penerima Bantuan Program Bedah Rumah**

- Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berkeluarga
- Memiliki/menguasai tanah dengan ketentuan :
  - a. Memiliki legalitas/SHM
  - b. Tidak dalam sengketa
  - c. Lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah
- Memiliki Rumah kondisi rusak/Tidak Layak Huni
- Belum pernah memperoleh bantuan serupa dari Pemerintah pusat
- Keluarga Berpenghasilan Rendah
- Siap atau mampu berswadaya,
  - a. Bahan bangunan atau material
  - b. Uang atau tabungan
  - c. Tenaga sendiri
- Bersedia membentuk kelompok maksimal 20 orang
- Bersedia membuat pernyataan sanggup berswadaya

## 2. Proses atau Mekanisme Program Bedah Rumah

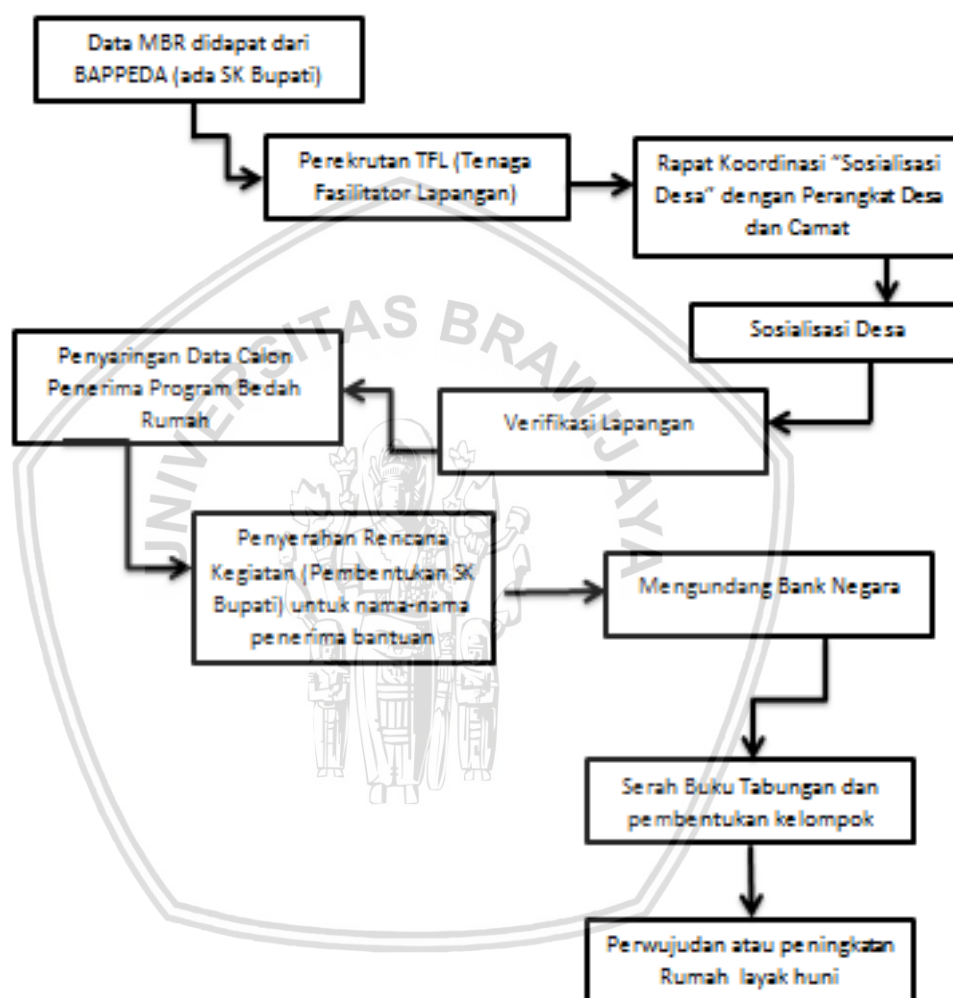
### a) Proses Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya



**Gambar 4: Proses Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya**

Sumber : Peraturan Kementerian PUPR no 13/PRT/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, 2018

## b) Proses Kegiatan Dana Alokasi Khusus



**Gambar 5 : Proses Kegiatan Dana Alokasi Khusus**

Sumber : Data Sekunder diolah, (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan)

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.,

Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik/cara kuantifikasi lainnya. (Moelong,2014:06).

Penelitian deskriptif yaitu penelitian dengan mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. (Moelong, 2014:11)

Alasan dipilihnya jenis penelitian Pendekatan Kualitatif dengan Tipe Deskriptif yaitu, pertama, peneliti bermaksud untuk memaparkan mengenai fakta-fakta yang terjadi dalam masalah penelitian, yaitu mendeskripsikan kejadian-kejadian empiris yang berkaitan dengan Implementasi Program Bedah Rumah dalam Mewujudkan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mojokerto. Alasan kedua, berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai maka jenis penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang berupaya menyajikan deskripsi atau gambaran secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan fenomena yang akan diteliti.

##### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah penempatan masalah yang menjadi titik utama penelitian, pemilihan fokus penelitian yang jelas dan tepat sangat penting dilakukan. Penetapan penelitian sebagai objek menjadi pusat perhatian penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan data yang dikumpulkan dan



dianalisis dalam suatu penelitian. Memberikan batasan terhadap fenomena atas permasalahan dalam suatu penelitian, agar penelitian lebih terarah, tidak meluas serta relevan dengan objek penelitian dan memperoleh hasil sesuai yang diharapkan. Menurut Sugiyono (2014:207) mengatakan bahwa pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan fleksibilitas masalah yang akan dipecahkan, selain juga faktor keterbatasan tenaga, waktu, dan dana atau *financial*.

Dalam penelitian ini, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain :

1. Implementasi Program Bedah Rumah dalam Mewujudkan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mojokerto.
  - a. Implementasi Program berdasar model Implementasi program Van Metter dan Van Horn, pandangan Van Meter dan Van Horn memiliki analisis dan penekanan implementasi program pada dua faktor penting yakni sebagai aktor implementasi program dalam hal ini pejabat publik dan beberapa pihak luar (TFL, Perangkat Desa) dan organisasi pemerintahan yang memiliki otoritas untuk melakukan implementasi program tersebut, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto. yakni :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan Program Bedah Rumah
  2. Sumberdaya Manusia dan Sumberdaya Anggaran
  3. Karakteristik Agen Pelaksana Program Bedah Rumah
  4. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana Program Bedah Rumah
  5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana Program Bedah Rumah
  6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik Program Bedah Rumah
2. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Bedah Rumah dalam Mewujudkan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mojokerto.
- a. Faktor Pendukung
    1. Faktor Internal
      - Dasar Pelaksanaan yang Jelas
      - Dukungan dari pihak kepentingan (Dinas, Pemerintah Kabupaten)
      - Komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan pada DPRKP2
    2. Faktor Eksternal
      - Sikap Penerima bantuan Program Bedah Rumah yang baik

- Lingkungan Penerima Bantuan yang mendukung
- Sikap mitra kerja yang kooperatif

b. Faktor Penghambat

– Faktor Internal

- Minimnya Sumber Daya Manusia pada DPRKP2

– Faktor Eksternal

- Keluarga/Lingkungan Penerima bantuan tidak mendukung
- Penerima tidak mampu memenuhi persyaratan Program Bedah Rumah
- Data Pendukung tidak sesuai di lapangan
- Tidak tepat waktu
- Kurangnya dukungan dari Perangkat Desa.

**C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi dan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan menangkap fenomena riil dari objek yang diteliti, guna mendapat data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Lokasi yang peneliti ambil yaitu Kabupaten Mojokerto. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kabupaten yang menjalankan program bedah rumah dari tahun 2012 sampai sekarang, sehingga mendukung peneliti dalam melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan

topik penelitian. Sedangkan yang menjadi situs penelitian adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Menurut Lofland dan Lofland dalam (Moelong, 2014:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data keberadaannya memegang peranan penting dalam sebuah penelitian. Sumber data yaitu subjek dimana data diperoleh, subjek disini adalah seseorang atau sesuatu hal/benda yang dijadikan sumber untuk mendapatkan data-data atau informasi. Oleh karena itu, maka dalam penelitian ini peneliti menentukan siapa dan data apa saja yang harus didapatkan untuk menjawab fokus dan tujuan dari sebuah penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Informan, yaitu seseorang yang memberikan keterangan dan penjelasan pendukung tentang suatu masalah yang akan diteliti oleh peneliti, informan biasanya orang yang sangat paham dengan situasi dan kondisi masalah penelitian. Menurut Moleong (2014:132) dalam buku Metode Penelitian Kualitatif, “Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.” Informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum , Bapak  
Gatot Soepriardi, S.Sos,MM

2. Kepala Seksi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, Bapak Adi Mahendarto, ST

b. Dokumen, yaitu sumber data yang berasal dari bahan-bahan tertulis maupun tidak tertulis, serta arsip yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen ini berhubungan dengan Implementasi Program Bedah Rumah.

Berikut macam-macam dokumen yang menjadi sumber penelitian :

3. Dokumen laporan Program Bedah Rumah dari DPRKP2 Kabupaten Mojokerto
4. Catatan hasil dari wawancara
5. Catatan pelaksanaan Program Bedah Rumah
- c. Tempat dan Peristiwa , yaitu berbagai peristiwa, situasi, kondisi, maupun kejadian yang berkaitan langsung dengan Implementasi Program Bedah Rumah dalam Mewujudkan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan sumber data yang sudah dijelaskan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi menjadi dua jenis data, yaitu :

1. Data Primer, adalah sumber data utama dalam penelitian yang berasal dari subjek. Data primer merupakan data yang digunakan sebagai pendukung dalam melakukan analisis, dalam penelitian ini data primer dapat memberikan analisis tentang Implementasi

Program Bedah Rumah dalam Mewujudkan Rumah Layak Huni di  
Kabupaten Mojokerto

2. Data Sekunder, adalah data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis primer. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku, dokumen, dan arsip-arsip implementasi program bedah rumah dari tahun ke tahun.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak mempunyai ketetapan standar data dalam melakukan penelitiannya. Menurut Moleong (2016:234) pada buku Metode Penelitian Kualitatif,

”Data dapat dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan, dari dokumen atau secara gabungan daripadanya.”

Teknik pengumpulan data ini merupakan prosedur standar untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan peneliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- a) Dokumentasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Dokumentasi juga memiliki arti pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, foto, catatan pelaksanaan program bedah



rumah, dan bahan referensi lain). Dokumentasi penelitian ini sebagai berikut :

1. Laporan Kegiatan Program Bedah Rumah tahun 2017
  2. Kegiatan Program Bedah Rumah tahun 2018
  3. Dokumen Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto
  4. Dokumen Kabupaten Mojokerto
  5. Dokumen Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Mojokerto
- b) Wawancara, yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk penelitian. Wawancara biasanya dilakukan oleh minimal dua orang, yaitu narasumber dan pewawancara. Narasumber disini berarti orang yang sangat paham dengan situasi dan lingkungan masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Biasanya narasumber disini adalah orang yang bertanggung jawab tentang suatu masalah penelitian. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk memastikan data yang diperoleh agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan realitasnya. Dalam mengumpulkan sumber data, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Menurut Sarosa (2012:47), bahwa wawancara semi terstruktur adalah kompromi antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar

permasalahan yang akan ditanyakan. Adapun wawancara, dilakukan kepada pihak-pihak terkait, seperti :

1. Bapak Gatot Soepriardi, S.Sos,MM selaku Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum, DPRKP2
  2. Bapak Adi Mahendarto, ST selaku Kepala Seksi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum DPRKP2
  3. Bapak Ahmad Yani selaku Koordinator Fasilitator Program Bedah Rumah Dana Alokasi Khusus.
  4. Bapak Doddy Prasetyo,ST selaku Kasubid Pembiayaan Pembangunan Daerah, BAPPEDA
  5. Calon Penerima Bantuan (10 orang dari Calon Penerima bantuan di Setiap Kecamatan)
    - Kecamatan Bangsal
    - Kecamatan Gedeg
    - Kecamatan Mojoanyar
    - Kecamatan Ngoro
    - Kecamatan Puri
    - Kecamatan Dawar Blandong
    - Kecamatan Sooko
- c) Observasi, adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung dan melihat suatu permasalahan yang akan diteliti dari dekat, sehingga peneliti dapat mencatat peristiwa maupun perilaku yang berkaitan dengan fokus penelitian sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya. Menurut Moelong (2014:174) bahwa teknik pengamatan ini memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan pada Implementasi Program Bedah Rumah dalam Mewujudkan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan observasi partisipatif, yang dimaksud observasi partisipatif, adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari narasumber, sembari melakukan pengamatan, peneliti turut melakukan apa yang dilakukan oleh narasumber, dan merasakan suka dukanya, selain itu observasi dilakukan dengan teknik observasi terstruktur. Hasil observasi peneliti berupa foto dokumentasi

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen Penelitian merupakan alat bantu yang dapat memudahkan peneliti dalam memperoleh dan menyimpan data yang berkaitan dengan penelitian. Sesuai kebutuhan peneliti, maka instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Peneliti Sendiri**

Pertama, dan yang paling utama dalam instrumen penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Seperti pendapat Sugiyono (2014) Instrumen penelitian, yaitu

“Suatu cara atau suatu proses yang berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu

sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun non akademik. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Selain peneliti sendiri, instrumen penelitian dalam penelitian ini yakni ada pedoman wawancara, dan hasil dokumentasi.

## 2. Pedoman Wawancara

Kedua, hal yang dibutuhkan peneliti adalah pedoman wawancara, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kegiatan wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait penelitian ini, maka dibutuhkan pedoman wawancara untuk mengarahkan dan membatasi peneliti dalam melakukan wawancara agar sesuai dengan konteks penelitian.

## 3. Catatan Lapangan

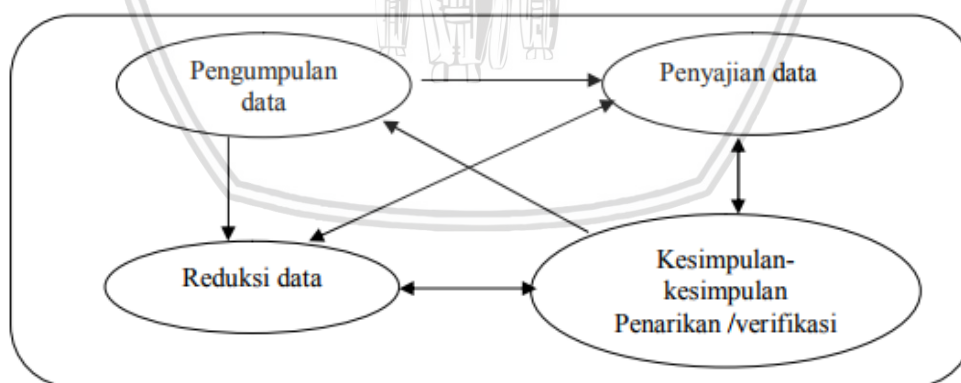
Instrumen Penelitian Ketiga, yakni Catatan Lapangan. Catatan lapangan berasal dari hasil penelitian peneliti di lapangan yang telah di dengar, dilihat, dan sipikirkan selama prose pengumpulan data.

## 4. Koneksi Internet

Koneksi internet pun menjadi instrumen penelitian yang dibutuhkan peneliti dalam mendapatkan informasi melalui situs-situs internet yang berkaitan dengan penelitian ini ataupun web resmi Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dan web resmi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto.

## G. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu langkah untuk mengolah data primer maupun data sekunder. Analisa data menurut Bogdan, seperti dikutip oleh Sugiyono (2014:244) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model *Miles and Huberman*. (2014), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).



**Gambar 6 : Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif**

Sumber: Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 14)

Analisis data kualitatif model Miles dan Huberman terdapat 3 (tiga) tahap:

### 1. Reduksi Data

Proses pemilihan hal-hal yang pokok, merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Proses reduksi data, peneliti akan mengumpulkan dan memilah data-data yang telah didapat peneliti selama penelitian berlangsung seperti hasil-hasil wawancara pada masyarakat penerima bantuan, dokumen pendukung ataupun data penelitian dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto, dan bukti dokumentasi. Setelah dokumen maupun data-data yang didapat, peneliti kemudian merangkum dan menjadikan satu kerangka atau garis besar jawaban dari fokus penelitian.

## 2. *Display* (Penyajian) Data

Melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian, diusahakan membuat petunjuk, table, grafik, dan sejenisnya. Melalui, penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Proses penyajian ini merupakan kelanjutan dari proses sebelumnya (Proses Reduksi/ pemilihan data), setelah data dirangkum. Peneliti membuat petunjuk dan membuat kerangka hubungan atas jawaban dari Implementasi Program Bedah Rumah dalam mewujudkan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mojokerto. Selain itu dalam proses ini peneliti meringkas data berupa penjelasan secara deskriptif ke dalam bentuk tabel ataupun grafik sehingga mempermudah proses analisis permasalahan Implementasi Program Bedah Rumah.



### 3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Mencari makna pola, model, karakteristik. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Proses verifikasi merupakan proses terakhir dari teknik analisis data menurut *Miles and Huberman* namun, dalam proses jikalau dirasa data pendukung yang diambil kurang, dan kurang menggambarkan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti, peneliti dapat mengambil data, tanpa melewati serangkaian alur yang telah dilewati sebelumnya, dan kesimpulan yang dikemukakan masih bisa dirubah dengan dilengkapi data pendukung yang baru.

## H. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2014:270) dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data meliputi:

1. Derajat kepercayaan (*credibility*) Teknik ini dapat dijalankan dengan :
  - a. Perpanjangan pengamatan dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan narasumber yang pernah ditemui maupun yang baru dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbuka. Sehingga memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan yang ada.

- b. Meningkatkan ketekunan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.

- c. Triangulasi

Triangulasi dalam penelitian kualitatif diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

- d. Kecukupan Refrensi

Penelitian kualitatif kecukupan refrensi diartikan sebagai pengumpulan data dari berbagai bahan-bahan yang berupa catatan-catatan dan rekaman-rekaman yang dapat digunakan dalam melakukan analisis data.

## 2. Uji Keteralihan (*transferability*)

Uji keteralihan merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.

## 3. Kebergantungan (*dependability*), dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan

proses penelitian. Apabila dalam proses penelitian tidak dilakukan uji dependability dan peneliti memiliki data maka peneliti tidak *reliable*.

4. Kepastian (*confirmability*), dalam penelitian kualitatif uji kepastian mirip dengan uji ketergantungan, sehingga pengujianya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasil ada.



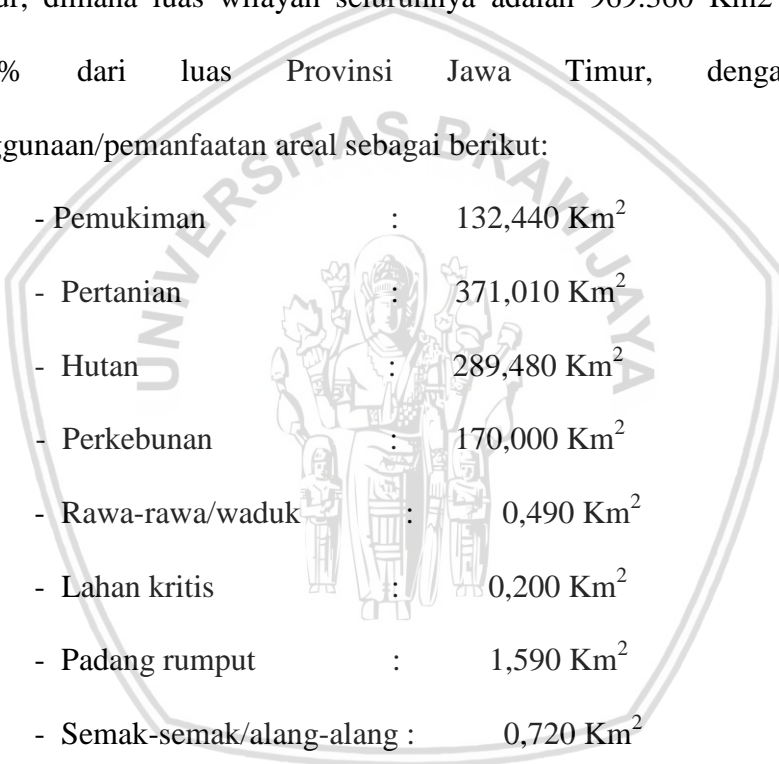
## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum

##### a) Kabupaten Mojokerto

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, dimana luas wilayah seluruhnya adalah 969.360 Km<sup>2</sup> atau sekitar 2,09% dari luas Provinsi Jawa Timur, dengan rincian penggunaan/pemanfaatan areal sebagai berikut:



- Pemukiman	:	132,440 Km <sup>2</sup>
- Pertanian	:	371,010 Km <sup>2</sup>
- Hutan	:	289,480 Km <sup>2</sup>
- Perkebunan	:	170,000 Km <sup>2</sup>
- Rawa-rawa/waduk	:	0,490 Km <sup>2</sup>
- Lahan kritis	:	0,200 Km <sup>2</sup>
- Padang rumput	:	1,590 Km <sup>2</sup>
- Semak-semak/alang-alang	:	0,720 Km <sup>2</sup>

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Mojokerto ini dari tahun ke tahun mengalami peralihan fungsi, misalnya lahan pertanian yang berubah fungsi menjadi lahan pemukiman, pekarangan, bangunan dan lahan industri serta sebagian lagi dialihkan menjadi jalan.

Kabupaten Mojokerto merupakan kabupaten yang lekat dengan sejarah Kerajaan Majapahit ini memiliki visi dan misi dalam pembangunannya. Visi Kabupaten Mojokerto yakni “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto

Yang Mandiri, Sejahtera Dan Bermartabat Melalui Penguatan Dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan Serta Kesehatan”, dengan beberapa misi yakni :

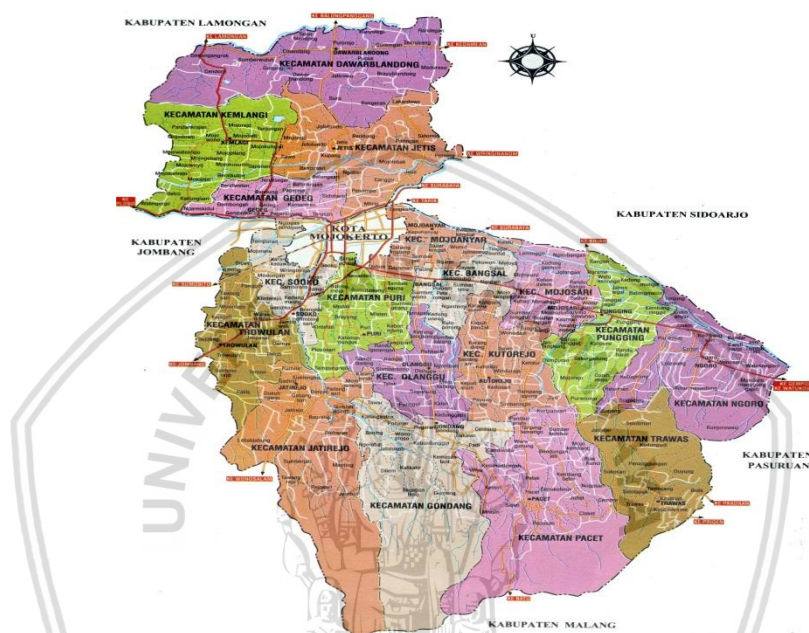
1. Meningkatkan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara yang selaras dengan Semangat Revolusi Mental untuk Memperkuat Citra PNS Sebagai Abdi Negara Sekaligus Pelayan Masyarakat ;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Akuntabel, Bersih dan Berwibawa melalui Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan yang lebih Profesional, Partisipatif dan Transparan;
3. Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Melalui Penguatan Struktur Ekonomi yang Berorientasi pada Pengembangan Jaringan Infrastruktur, UMKM, Agrobisnis, Agroindustri dan Pariwisata;
4. Membuka Ruang Komunikasi yang Efektif dan Efisien untuk Menumbuhkan Kepercayaan Sosial (social trust) dan Menstimulasi Kreativitas serta Inovasi Masyarakat berlandaskan pada Etika Budaya dan Kearifan Lokal yang Lebih Berkarakter;
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan cara Memperbesar Peluang Akses Pendidikan yang lebih Baik untuk mengoptimalkan Kemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
6. Memperlebar Akses dan Kesempatan untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua Lapisan Masyarakat;
7. Memperkuat Kondusifitas Ketertiban dan Keamanan serta Peningkatan Pemberian Pelayanan Prima di semua Sektor bagi Masyarakat;

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Mojokertodari tahun ke tahun terhitung dinamis, artinya selalu mengalami peralihan fungsi, misalnya lahan pertanian yang berubah fungsi menjadi lahan pemukiman, pekarangan, bangunan dan lahan industri serta sebagian lagi dialihkan menjadi jalan. Kabupaten Mojokerto memiliki batas-batas administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik
- Sebelah Timur : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan

- Sebelah Selatan : Kota Batu dan Kabupaten Malang
- Sebelah Barat : Kabupaten Jombang
- Sedangkan ditengah-tengah terdapat wilayah Kota Mojokerto.

### PETA KABUPATEN MOJOKERTO



**Gambar 7 : peta Kabupaten Mojokerto**

Sumber : Data Sekunder diolah ( <http://www.mojokertokab.go.id/> , 2018)

#### - Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis wilayah Kabupaten Mojokerto terletak antara  $111^{\circ}20'13''$  s/d  $111^{\circ}40'47''$  Bujur Timur dan antara  $7^{\circ}18'35''$  s/d  $7^{\circ}47''$  Lintang Selatan yang merupakan bagian integral dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif Kabupaten Mojokerto masuk Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro, sedangkan secara spatial Tata Ruang Jawa Timur adalah masuk dalam kawasan pengembangan “Gerbang Kertosusila”. Kabupaten



Mojokerto terdiri atas 18 Kecamatan, 299 Desa dan 5 Kelurahan dengan perincian berikut ini :

**Jumlah Desa dan Kelurahan tiap Kecamatan Tahun 2015**

No.	Kecamatan	Jumlah	
		Kelurahan	Desa
1.	Trowulan	-	16
2.	Soko	-	15
3.	Puri	-	16
4.	Bangsar	-	17
5.	Mojoanyar	-	12
6.	Gedeg	-	14
7.	Kemlagi	-	20
8.	Dawarblandong	-	18
9.	Jetis	-	16
10.	Mojosari	5	14
11.	Ngoro	-	19
12.	Pungging	-	19
13.	Kutorejo	-	17
14.	Dlanggu	-	16
15.	Jatirejo	-	19
16.	Gondang	-	18
17.	Pacet	-	20
18.	Trawas	-	13
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>299</b>

**Gambar 8: Jumlah desa dan kelurahan tiap kecamatan di Kabupaten Mojokerto th 2015**

Sumber : Data sekunder diolah ([www.mojokertokab.go.id](http://www.mojokertokab.go.id),2018)

Berdasarkan struktur tanahnya, wilayah Kabupaten Mojokerto cenderung cekung ditengah-tengah dan tinggi di bagian selatan dan utara. Bagian selatan merupakan wilayah pegunungan dengan kondisi tanah yang subur, yaitu meliputi Kecamatan Pacet, Trawas, Gondang, dan Jatirejo. Bagian tengah merupakan wilayah dataran sedang, sedangkan

bagian utara merupakan daerah perbukitan kapur yang cenderung kurang subur..

#### Tinggi dan Luas Daerah Menurut Kecamatan

N O	Kecamatan	Tinggi Rata- Rata dari Permukaan Laut (m)	Luas Daerah*) (Km2)
1	Jatirejo	140	32,98
2.	Gondang	240	39,11
3.	Pacet	470	45,16
4.	Trawas	600	29,86
5.	Ngoro	120	57,48
6.	Pungging	100	48,14
7.	Kutorejo	170	42,83
8.	Mojosari	100	26,65
9.	Bangsar	60	24,06
10.	Mojoanyar	54	23,02
11.	Dlanggu	120	35,42
12.	Puri	70	35,65
13.	Trowulan	60	39,20
14.	Sooko	64	23,46
15.	Gedeg	36	22,98
16.	Kemlagi	52	50,05
17.	Jetis	60	57,17
18.	Dawarblandong	75	58,93
<b>Kab. Mojokerto</b>		<b>64</b>	<b>692,15</b>
Keterangan : *) Luas daerah tidak termasuk hutan negara			

**Tabel 5: Tinggi dan luas setiap kecamatan di Kabupaten Mojokerto**  
Sumber : Data sekunder diolah ([www.mojokertokab.go.id](http://www.mojokertokab.go.id),2018)

Sekitar 30% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Mojokerto, tingkat kemiringan tanahnya lebih dari 15 derajat, sedangkan sisanya merupakan wilayah dataran sedang dengan tingkat kemiringan kurang dari 15 derajat. Pada umumnya tingkat ketinggian wilayah di Kabupaten

Mojokerto rata-rata berada kurang dari 500 meter diatas permukaan laut, dan hanya Kecamatan Pacet dan Trawas yang merupakan daerah terluas yang memiliki daerah dengan ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut.

- **Kondisi Penduduk**

Kondisi demografi adalah suatu kondisi dinamika kependudukan, meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi serta penuaan. Kondisi demografi juga dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk meliputi jumlah persebaran dan komposisi penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk ini selalu berubah-ubah Karena disebabkan oleh proses demografi yakni kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan juga migrasi atau perpindahan penduduk. Perkembangan penduduk kabupaten Mojokerto laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sensus penduduk tahun 2017 mencatat bahwa Kabupaten Mojokerto dihuni 1.138.262 jiwa, dengan penduduk laki-laki-laki sebanyak 573.415 jiwa lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yang hanya sebesar 564.847 jiwa seperti yang tertera pada tabel berikut:

**JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN  
KABUPATEN MOJOKERTO  
BULAN DESEMBER TAHUN 2017**

NO	NAMA KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	JATIREJO	22.620	21.908	44.528
2	GONDANG	22.119	21.811	43.930
3	PACET	29.986	29.752	59.738
4	TRAWAS	15.670	15.622	31.292
5	NGORO	41.740	41.912	83.652
6	PUNGGING	39.701	39.330	79.031
7	KUTOREJO	33.674	32.701	66.375
8	MOJOSARI	40.593	39.785	80.378
9	DLANGGU	28.813	28.487	57.300
10	BANGSAL	26.566	25.981	52.547
11	PURI	39.158	38.495	77.653
12	TROWULAN	38.687	37.676	76.363
13	SOOKO	37.603	36.814	74.417
14	GEDEG	30.003	29.841	59.844
15	KEMLAGI	30.200	30.141	60.341
16	JETIS	44.360	42.791	87.151
17	DAWARBLANDONG	26.414	26.717	53.131
18	MOJOANYAR	25.508	25.083	50.591
<b>TOTAL</b>		<b>573.415</b>	<b>564.847</b>	<b>1.138.262</b>

**Tabel 6: Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Bulan Desember Tahun 2017**

Sumber : Data sekunder diolah ([www.mojokertokab.go.id](http://www.mojokertokab.go.id),2018)

**- Kondisi Perekonomian**

Kondisi ekonomi Kabupaten Mojokerto berdasarkan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dalam kurun waktu antara tahun 2014 hingga tahun 2016. Pada tahun 2014 PDRB Kabupaten Mojokerto berjumlah sebesar 53,203,566 (juta rupiah), sedangkan pada tahun 2015 sebesar 58,823,631(juta rupiah), dan

tahun 2016 sebesar 63,62,150 (juta rupiah). Penyumbang terbesar dari PDRB di Kabupaten Mojokerto berasal lapangan usaha jasa-jasa, masing-masing pada tahun 2014 menyumbangkan sebesar 53,203,567 (juta rupiah), . tahun 2015 sebesar 58,823,632 (juta rupiah), dan tahun 2016 menyumbangkan sebesar 64,629,150 (juta rupiah). Menurut perhitungan PDRB atas dasar harga konstan justru mengalami naik turun, sama halnya dengan perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku. Tahun 2014 PDRB Kabupaten Mojokerto atas dasar harga konstan sebesar 44.291.995 (juta rupiah), Tahun 2015 sebesar 46.792.327 (juta rupiah) dan PDRB di tahun 2016 sebesar 49.321.921 (juta rupiah).

Penyumbang terbesar dari PDRB Kabupaten Mojokerto atas dasar harga konstan tahun 2014 hingga tahun 2016 adalah dari lapangan usaha industri pengolahan. Pada tahun 2014 lapangan usaha industri pengolahan menyumbangkan 23.451 juta rupiah bagi PDRB Kabupaten Mojokerto atas dasar harga konstan, di tahun 2015 menyumbangkan sebesar 24.996 juta rupiah, serta pada tahun 2016 menyumbangkan sebesar 26.418 juta rupiah. Sedangkan penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Mojokerto atas dasar harga berlaku tahun 2014 hingga tahun 2016 yakni sama-sama diperoleh dari lapangan usaha industri pengolahan. Pada tahun 2014 industri pengolahan menyumbangkan sebesar 27.823 juta rupiah, pada tahun 2015 industri pengolahan 30 685 juta rupiah, serta pada tahun 2016 industri juga menyumbangkan sebesar 33.660 juta rupiah.

Jadi, PDRB Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu antara tahun 2014 hingga tahun 2016 untuk atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku banyak diperoleh dari laba lapangan usaha industri pengolahan. melihat perhitungan dari 2 kategori PDRB tersebut, industri pengolahan menjadi potensi dan aset yang sangat berharga bagi Kabupaten Mojokerto. Seperti terlihat pada tabel 7 berikut :

**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mojokerto Tahun 2014-2016**

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB Berdasarkan Harga Konstan (Juta Rupiah)			PDRB Berdasarkan Harga Berlaku (Juta Rupiah)		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
1.	Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	3.429,40 4,7	3 495 257,8	3 611 058,1	4 602 836,1	5 076 102,2	5 451 809,7
2.	Kehutanan dan Penebangan Kayu	193 969,9	203 792,7	184 732,2	287 330,3	325 592,1	318 607,7
3.	Perikanan	40 044,7	42 838,6	45 258,9	57 118,1	65 862,3	72 114,9
4.	Pertambangan dan Penggalian	431 802,6	440 318,5	454 364,6	548 228,0	597 071,9	637 647,9
5.	Industri Pengolahan	23 451 002,9	24 995 185,9	26 417 688,0	27 823 078,1	30 85 910,8	33 660 116,0
6.	Pengadaan Listrik dan Gas	32 878,8	33 795,1	34 946,1	29 926,8	34 316,9	37 038,6
7.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	31 229,9	32 042,7	33 603,1	34 883,0	36 874,6	40 384,3
8.	Konstruksi	4 110 407,1	4 245 331,3	4 398 919,7	5 366 535,8	5 932 495,9	6 576 757,5
9.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4 715 267,1	4 966 315,7	5 260 447,0	5 408 064,9	5 953 049,7	6 641 874,3
10.	Transportasi dan Pergudangan	522 268,7	552 929,4	589 260,0	646 799,3	733 431,9	823 198,4
11.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	809 107,9	878 937,0	952 991,7	1 071 299,7	1 229 759,2	1 401 424,1
12.	Informasi dan Komunikasi	2 838 896,4	3 026 238,5	3 248 969,7	2 893 411,5	3 158 286,5	3 494 737,9
13.	Jasa Keuangan dan Asuransi	648 665,7	693 451,8	741 327,0	827 175,0	951 283,7	1 068 681,5
14.	Real Estate	715 805,8	754 266,3	795 147,5	806 971,3	930 724,4	1 011 474,2
15.	Jasa Perusahaan	69 252,5	73 181,8	76 775,0	84 274,0	95 847,7	105 009,8
16.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	1 059 415,3	1 104 664,2	1 156 252,1	1 282 065,7	1 424 195,4	1 570 994,7
17.	Jasa Pendidikan	584 578,4	623 925,7	659 801,5	746 460,2	835 266,9	903 331,8
18.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	178 019,6	183 994,7	194 832,0	212 500,1	237 826,6	258 485,8
19.	Jasa lainnya	429 977,2	445 859,8	465 547,6	474 609,3	519 733,2	555 461,8
	<b>Total</b>	<b>44 291 995,2</b>	<b>46 792 327,3</b>	<b>49 321 921,7</b>	<b>53 203 567,0</b>	<b>58 823 632,0</b>	<b>64 629 150,9</b>

**Tabel 7: Produk Domestik Regular Bruto Kabupaten Mojokerto thn 2014-2016**

Sumber : Data sekunder diolah ([www.mojokertokab.bps.go.id](http://www.mojokertokab.bps.go.id), 2018)



**b) Peran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto**

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang perhubungan dan bidang pertanahan. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dibidang perhubungan dan bidang pertanahan. Hal ini diatur dalam Peraturan Bupati nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dibidang perhubungan dan bidang pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dibidang perhubungan dan bidang pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dibidang perhubungan dan bidang pertanahan;
4. Pelaksanaan administrasi dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dibidang perhubungan dan bidang pertanahan;

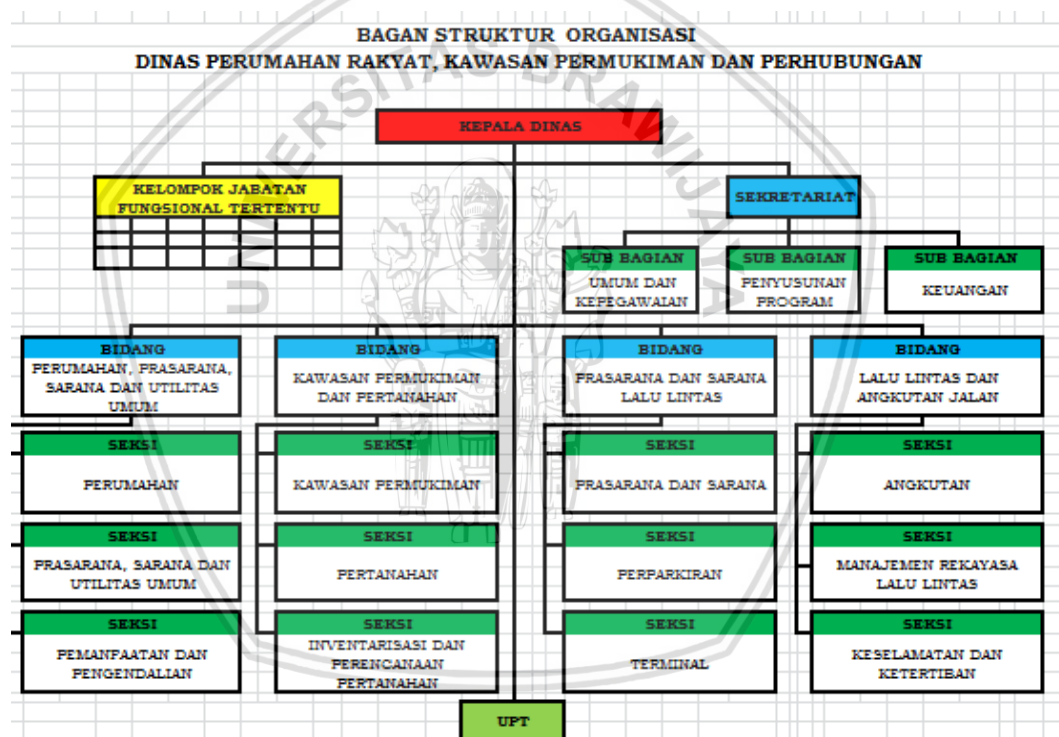
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi :
  - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - c) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, membawahi :
  - a) Seksi Perumahan;
  - b) Seksi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
  - c) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian.
4. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan, membawahi :
  - a) Seksi Kawasan Permukiman;
  - b) Seksi Pertanahan;
  - c) Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Pertanahan.
5. Bidang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas, membawahi :
  - a) Seksi Prasarana dan Sarana;
  - b) Seksi Perpakiran
  - c) Seksi Terminal
6. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahi :
  - a) Seksi Angkutan;

- b) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
- c) Seksi Keselamatan dan Ketertiban.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- 8. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**Gambar 9: Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto**

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto, 2018

### Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan untuk mengkoordinasikan bidang-bidang

dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, . penyusunan program dan keuangan. Sekretariat, mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b) Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- d) Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- e) Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
- f) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT di Lingkungan Dinas
- g) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- h) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas :

- a) Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b) Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

- c) Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d) Menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- e) Melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
- f) Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT di Lingkungan Dinas dibidang administrasi umum dan kepegawaian ;
- g) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h) Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**Sub Bagian Penyusunan Program**, mempunyai tugas :

- a) Menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b) Menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
- c) Melakukan pengelolaan data dan perencanaan program;
- d) Menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan penataan organisasi;
- e) Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT di Lingkungan Dinas dibidang penyusunan program;
- f) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g) Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**Sub Bagian Keuangan**, mempunyai tugas :

- a) Menyusun bahan koordinasi dan menyusun anggaran keuangan;
- b) Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- c) Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
- d) Menyusun laporan keuangan;
- e) Menyusun bahan koordinasi dibidang keuangan;
- f) Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT di Lingkungan Dinas dibidang Keuangan;
- g) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h) Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### **BIDANG PERUMAHAN, PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM**

**Bidang Perumahan, Prasarana Sarana dan Utilitas Umum**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan meliputi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum serta pemanfaatan dan. Bidang Perumahan, Prasarana Sarana dan Utilitas Umum, mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- b) Pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah;



- c) Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- d) Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
- e) Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan;
- f) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

**Seksi Perumahan**, mempunyai tugas :

- a) Melakukan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- b) Melakukan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah;
- c) Melakukan pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- d) Melakukan pemberian rekomendasi penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
- e) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- f) Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan, Prasarana Sarana, dan Utilitas Umum.

**Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum**, mempunyai tugas :

- a) Menyusun bahan kebijakan dibidang prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;

- b) Merancang dan melakukan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan
- c) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- d) Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan, Prasarana Sarana dan Utilitas Umum.

**Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian**, mempunyai tugas :

- a) Melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pembangunan rumah;
- b) Melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penyehatan lingkungan perumahan;
- c) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- d) Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan, Prasarana Sarana dan Utilitas Umum.

## **BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

**Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan meliputi kawasan permukiman, pertanahan serta inventarisasi dan perencanaan pertanahan. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan, mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;

- b) Pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
- c) Pelaksanaan pencegahan kawasaan permukiman kumuh;
- d) Pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) hektar;
- e) Pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- f) Pelaksanaan pem berian rekomendasi izin lokasi dalam 1 (satu) daerah;
- g) Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah garapan;
- h) Pelaksanaan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah;
- i) Pelaksanaan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah, kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- j) Pelaksanaan penetapan tanah ulayat;
- k) Pelaksanaan penyelesaian masalah tanah kosong;
- l) Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
- m) Pelaksanaan penerbitan izin membuka tanah;
- n) Pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten;
- o) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- p) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Seksi Kawasan Permukiman**, mempunyai tugas :

- a) Melakukan penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- b) Melakukan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan tentang pembangunan dan perbaikan permukiman;
- c) Melakukan pengawasan, pengendalian dan pengembangan permukiman;
- d) Melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) hektar;
- e) Melakukan pencegahan kawasan permukiman kumuh;
- f) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g) Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

**Seksi Pertanahan**, mempunyai tugas :

- a) Melakukan pemberian rekomendasi izin lokasi dalam 1 (satu) daerah;
- b) Melakukan penerbitan rekomendasi izin membuka tanah;
- c) Menyusun konsep penyelesaian sengketa tanah garapan;
- d) Melakukan analisis penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah, kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- e) Menyusun penetapan tanah ulayat;
- f) Melakukan penyelesaian masalah tanah kosong;

- g) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h) Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

**Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Pertanahan**, mempunyai tugas:

- a) Melakukan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
- b) Melakukan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah;
- c) Melakukan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah ;
- d) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- e) Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

#### **BIDANG PRASARANA DAN SARANA LALU LINTAS**

**Bidang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, meliputi prasarana, dan sarana, perpakiran serta terminal. **Bidang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas** mempunyai fungsi :

- a) Perumusan bahan penyusunan rencana program kerja dan kebutuhan anggaran kegiatan prasarana dan sarana lalu lintas;
- b) Perumusan bahan kebijakan umum dan teknis bidang prasarana dan sarana lalu lintas;

- c) Pelaksanaan pembinaan teknis operasional, prasarana dan sarana lalu lintas, perpakiran, dan terminal;
- d) Perumusan bahan penetapan prasarana dan sarana lalu lintas, perpakiran dan terminal;
- e) Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pelayanan teknis di bidang prasarana dan sarana lalu lintas, perpakiran dan terminal;
- f) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Seksi Prasarana dan Sarana** mempunyai tugas :

- a) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana pengembangan dan pemeliharaan prasarana dan sarana;
- b) Menyusun bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pemeliharaan prasarana dan sarana;
- c) Melakukan inventarisasi, pengolahan data, penyusunan rencana teknik, pengembangan prasarana dan sarana penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- d) Menyusun pedoman teknis dan pengembangan prasarana dan sarana penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- e) Melakukan bimbingan dan petunjuk-petunjuk teknis kepada perusahaan angkutan, perusahaan karoseri dan bengkel kendaraan bermotor;



- f) Melakukan kajian teknis pengembangan prasarana dan sarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- g) Melakukan pembinaan dan pengawasan bengkel umum untuk teknis kelaikan jalan kendaraan bermotor;
- h) Menyusun bahan kajian teknis pengembangan prasarana dan sarana penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- i) Menyusun bahan koordinasi teknis penyelenggaraan dan pengembangan prasarana dan sarana lalu lintas dan angkutan jalan dengan instansi terkait;
- j) Menyusun rencana, penetapan lokasi dan jumlah kebutuhan prasarana dan sarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- k) Menyusun bahan rencana pengadaan, pemasangan prasarana dan sarana penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- l) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- m) Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas.

**Seksi Perpakiran**, mempunyai tugas:

- a) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja perpakiran;
- b) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perpakiran;
- c) Melakukan inventarisasi, monitoring dan evaluasi lokasi parkir;

- d) Menyusun bahan kajian dan pengembangan lokasi perpakiran
- e) Menyusun bahan koordinasi penertiban perpakiran;
- f) Melakukan pembinaan pengelola penyelenggara perpakiran dan petugas bidang parkir;
- g) Memproses dan memberikan bahan rekomendasi teknis perpakiran pada penyelenggara perpakiran;
- h) Menyusun rencana program kerja berkelanjutan dan penyusunan pedoman teknis perpakiran dan pengelolaannya;
- i) Merancang pemasangan rambu-ramu parkir;
- j) Melakukan penetapan lokasi fasilitas parkir tepi jalan dan tempat khusus serta desain lokasi parkir dan operasionalnya;
- k) Menyusun bahan koordinasi pemungutan retribusi parkir;
- l) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- m) Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas.

**Seksi Terminal**, mempunyai tugas :

- a) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja sub terminal;
- b) Menyusun bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional sub terminal;
- c) Melakukan pengelolaan sub terminal;

- d) Menyusun bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang sub terminal;
- e) Melakukan pengaturan dan pengawasan operasional sub terminal;
- f) Menyusun bahan desain terminal penumpang dan barang;
- g) Menyusun bahan draf kerjasama dengan pihak lain;
- h) Melakukan pengawasan penarikan retribusi terminal;
- i) Menyusun bahan usulan penetapan lokasi terminal penumpang tipe C dan sub terminal;
- j) Menyusun bahan usulan penetapan dan pengoperasian terminal angkutan barang;
- k) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- l) Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas.

### **BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan meliputi angkutan, manajemen rekayasa lalu lintas serta keselamatan dan ketertiban.

**Bidang Penelitian, Pengembangandan Pelaporan**, mempunyai fungsi:

- a) Perumusan bahan penyusunan rencana program kerja dan kebutuhan anggaran kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan;

- b) Perumusan bahan rumusan kebijakan umum dan teknis bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- c) Pelaksanaan pembinaan teknis operasional dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- d) Perumusan bahan penetapan jaringan jalan, perlengkapan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- e) Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, dan pelayanan teknis dibidang angkutan jalan;
- f) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

**Seksi Angkutan** mempunyai tugas :

- a) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan angkutan;
- c) Menyusun bahan koordinasi penyusunan peta jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan analisa kebutuhan angkutan di wilayah kabupaten;
- d) Menyusun bahan penyusunan/penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan angkutan taksi atau angkutan tidak dalam trayek lainnya yang pelayanannya di wilayah kabupaten;

- e) Menyusun bahan penilaian atas permohonan izin usaha angkutan dalam trayek dan pemberian izin trayek dalam wilayah kabupaten;
- f) Menyusun bahan penilaian atas permohonan izin usaha angkutan tidak dalam trayek dan mempersiapkan bahan rekomendasi izin operasi;
- g) Memproses pemberian rekomendasi operasi angkutan;
- h) Melakukan penilaian dan monitoring jumlah, kelengkapan administrasi angkutan dan penyiapan bahan rekomendasi izin;
- i) Melakukan analisa perhitungan biaya pengangkutan dengan kendaraan umum dan penetapan tarif penumpang kelas ekonomi;
- j) Melakukan inventarisasi, bimbingan, pelayanan izin dan pengawasan angkutan
- k) Menyusun bahan izin bongkar muat angkuta, izin mutasi keluar dan masuk angkutan;
- l) Menyusun bahan rekomendasi perubahan bentuk dan sifat angkutan;
- m) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- n) Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas**, mempunyai tugas :

- a) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja manajemen dan rekayasa lalu lintas;

- b) Menyusun bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional manajemen rekayasa lalu lintas;
- c) Menyusun bahan rancangan jaringan transportasi, pemberian bimbingan dan pengawasan teknis penetapan lokasi sarana dan prasarana kelengkapan jalan;
- d) Melakukan pembangunan dan pengoperasian tempat pemberhentian kendaraan dan perpakiran pada jalan kabupaten;
- e) Melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan dan analisis data lalu lintas (survei lalu lintas) secara berkala;
- f) Menyusun bahan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan kabupaten;
- g) Menyusun bahan koordinasi penyusunan perencanaan, pengadaan, pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pengendali isyarat lalu lintas dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya pada jalan kabupaten;
- h) Melakukan identifikasi, analisis dan penetapan penanganan masalah lalu lintas pada jalan wilayah kabupaten;
- i) Menyusun bahan pemberian rekomendasi teknis analisis dampak lalu lintas rencana pembangunan/usaha pada jalan kabupaten dan provinsi;
- j) Menyusun bahan pembinaan ketertiban lalu lintas di wilayah kabupaten;



- k) Menyusun bahan pemberian rekomendasi izin penggunaan jalan di wilayah hukum kabupaten selain kepentingan lalu lintas;
- l) Menyusun bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- m) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- n) Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Seksi Keselamatan dan Ketertiban**, mempunyai tugas :

- a) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja keselamatan dan ketertiban lalu lintas;
- b) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional keselamatan dan ketertiban lalu lintas;
- c) Merancang dan melakukan pengumpulan data bahan perumusan pengawasan, inventarisasi data kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kota, analisis dan penentuan karakteristik tempat-tempat tertentu yang dinilai rawan kecelakaan lalu lintas, penyuluhan dan bimbingan keselamatan, pengendalian dan ketertiban pada masyarakat dibidang lalu lintas dan angkutan;
- d) Melakukan kegiatan inventarisasi data kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang

menjadi isu kota, analisis dan penentuan karakteristik tempat-tempat tertentu yang dinilai rawan kecelakaan lalu lintas, penyuluhan dan bimbingan keselamatan, pengendalian dan ketertiban pada masyarakat dibidang lalu lintas dan angkutan;

- e) Menyusun bahan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi, inventarisasi data kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu, analisis dan penentuan karakteristik tempat-tempat tertentu yang dinilai rawan kecelakaan lalu lintas, penyuluhan dan bimbingan keselamatan, pengendalian dan ketertiban pada masyarakat dibidang lalu lintas dan angkutan;
- f) Melakukan pemberian rekomendasi usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi;
- g) Melakukan sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan keselamatan dan ketertiban lalu lintas jalan pada pelajar usia dini dan masyarakat dibidang lalu lintas dan angkutan;
- h) Melakukan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan keselamatan dan ketertiban pengemudi dan penumpang angkutan umum;
- i) Menyusun dan menetapkan rencana lokasi kebutuhan fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZOSS);
- j) Merancang rekomendasi pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan fasilitas penunjang jalan;

- k) Melakukan audit keselamatandan ketertiban jalan;
- l) Melakukan motivasi pembinaan, koordinasi, pengawasan, pengendalian, dan penilaian pelaksanaan tugas atau kegiatan yang dilakukan oleh staf yang menjadi bawahannya;
- m) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- n) Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pelaporan.

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU**

Kelompok jabatan fungsional tertentu mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan

### **B. Rencana Kerja Kabupaten Mojokerto tahun 2017**

#### **Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Untuk mengukur akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat maka setiap SKPD harus memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM merupakan acuan bagi SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan adanya SPM tersebut diharapkan pelayanan pada SKPD dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

- **Sosial**

Urusan sosial diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warganegara agar dapat hidup layak dan mampu

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

### **(1) Jumlah Penduduk Miskin**

Untuk menilai tingkat perlindungan sosial kepada masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengentasan kemiskinan di masyarakat. Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin sebesar 115,38 ribu jiwa. Terhadap Jumlah Penduduk Miskin, maka beberapa program yang dilaksanakan untuk penuntasan kemiskinan antara lain adalah:

- Program bantuan Siswa Miskin (BSM)
- Program Pelayanan Pondok Kesehatan Desa (PONKESDES)
- Program Penanggulangan Kurang Energi Protein (Kep), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (Gaky), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro
- Program PMT Pemulihan Balita Gizi Buruk
- Program Pembangunan jamban keluarga
- Program Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS, TB Paru, dan Kusta

- Program Penerbitan Surat Pernyataan Miskin
- Program Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesda)
- Program Bedah Rumah/RTLH
- Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
- Program Penunjang Kegiatan Peningkatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP II)
- Program Pengelolaan Sektor Irigasi dan Sumber Daya Air (*Water Resources and Irrigation Sector Management Program /WISMP*)
- TNI Manunggal Membangun Desa TMMD
- Program Penunjang Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)
- Program Fasilitasi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)
- Program Bimbingan Ketrampilan Usaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi
- Program Keluarga Harapan (PKH)
- Program Operasi Razia PSK (Wanita Harapan), Gepeng dan Anjal
- Program Pemberdayaan fakir miskin
- Program Pemberdayaan para penyandang cacat
- Program Pembinaan Eks Penderita Kusta di Sumberglagah
- Program Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

- Program Pemulangan orang terlantar
- Program Penanggulangan dan Pemberdayaan Pengemis dan Gelandangan
- Program Peningkatan Kesejahteraan Panti Werdha
- Program Revitalisasi Pendataan PMKS dan PSKS
- Program Jaring Pengaman Sosial Operasi Pasar Khusus(JPS OPK) Raskin
- Program PNPM Mandiri Perdesaan
- Program Pokjanal Posyandu
- Program Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif
- Program Pelatihan Peningkatan Ekonomi Korban KDRT
- Program PNPM Mandiri Perkotaan
- Program Pengembangan Usaha Kecil Menengah
- Program Kemitraan Bina Lingkungan/ *Coporate Sosial Responsibility* (CSR)
- Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
- Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
- Program Bantuan Kambing Maskin

## **(2) Jumlah PMKS yang dibantu**

Untuk menilai perlindungan dan penanganan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat maka pemerintah kabupaten mempunyai tanggungjawab



untuk mengurangi jumlah PMKS yang ada. Pengurangan PMKS dilakukan melalui upaya memberdayakan PMKS dan mengurangi faktor penyebab meningkatnya PMKS. Jenis PMKS yang dibantu, diantaranya anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, Anak Dengan Kedisabilitas (ADK), anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP), orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA, korban *trafficking*, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial (PMBS), korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, keluarga fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis, dan komunitas adat kecil.

### C. PENYAJIAN DATA

Penyajian data fokus pada suatu kegiatan yang menyajikan dan memaparkan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti selama kegiatan pengamatan di lapangan sesuai dengan fokus penelitian yang disajikan secara objektif yang selanjutnya digunakan sebagai bahan analisis. Data yang dipaparkan disini merupakan data yang diperoleh peneliti dari data primer (hasil wawancara dengan beberapa narasumber) dan data sekunder dari laporan kegiatan dan dokumentasi kegiatan. Berikut akan dipaparkan atau dijelaskan mengenai data sesuai dengan fokus penelitian.

## 1. Implementasi Program Bedah Rumah dalam Mewujudkan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mojokerto

### a) Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni

Berdasar RKPD Kabupaten Mojokerto dalam mengentaskan atau mengurangi kemiskinan, terdapat 37 program, salah satu diantaranya yakni program bedah rumah. Program yang sudah berjalan kurang lebih 6 tahun, dan telah memberikan dampak positif yang dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah. Banyak masyarakat yang berharap mendapatkan program bedah rumah ini, untuk membantu mewujudkan rumah mereka dari yang awalnya tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Hal ini ditunjukkan melalui wawancara dengan beberapa warga calon penerima bantuan, yakni sebagai berikut.

*“...itu lihat mba, kusen pintunya wes mulai keropos dimakan rayap, atap e yo nek hujan mesti bocor, belum ada duit buat benerin mba, yo begini ini mba kondisi rumah e, yo mugo-mugo diparingi gusti Allah rezeki mba, mugo-mugo rezekine isok dapet bantuan”*

*“...nak dipake sendale, yo ngene iki griyane mbah, elek, latar e jek lemah, ga duwe duwit nak gawe nekel, atap e yo mesti bocor nek udan nak, yo mugo-mugo rezeki ne diparingi tekan gusti Allah nggeh ”*

*“...niki mesti kantuk bantuan nopo mba? Kulo niki seumur-umur dereng kantuk bantuan blas ndugi pemerintah, nggeh mugi-mugi niki kulo kantuk bantuan nggeh mba, badhe renovasi griyo, tapi mboten wonten dana e niku hehe, niki sae mba program e, alhamdullillah nggeh nek wangsul niki program membantu sanget”*

*“.. yo mugo-mugo ae yo mbak, nek pancen rezekine, yo onok ae dalan e. Iki nek entuk pingin mbenakno ubin, pingin dikeramik, kan iki jek di plester”*

“iyaa mbak, ini sudah pasti dapatkah mba? Soalnya ndak pernah mbak, dari jaman dulu dapet bantuan dari pemerintah, bantuan apapun iku mbak, makane nek dapet yo alhamdulillah. Iki plafon *e wes podo* bocor mbak, ndak ada duit buat ganti, nek dapet kan yo alhamdulillah *toh* mba”

“....semoga ya mbak, bantu doanya nggeh mbak *nggeh*, kan lumayan banget. *Seneng kulo wonten bantuan ngeten mbak, memang nggeh butuh sanget bantuan ngenten*”

Jadi, dapat disimpulkan dari wawancara dengan beberapa masyarakat calon penerima bantuan, rata-rata jawaban mereka sama, dan sangat berharap bahwa program bedah rumah ini, merupakan salah satu solusi dari pemerintah untuk membantu masyarakatnya yang berpenghasilan rendah dan memiliki rumah yang jauh dari kata layak huni.

Berdasar pada Laporan Akhir *Updating* Program Bedah Rumah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto, jumlah Rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2016, dengan hasil pemetaan pada 18 Kecamatan di tahun 2016, jumlah akhir RTLH yang didata mencapai 8.604 RTLH. Dari 18 Kecamatan dapat diketahui bahwa jumlah RTLH dengan jumlah yang tinggi di Kecamatan Dawarblandong sejumlah 1.675 RTLH, sementara jumlah RTLH yang paling sedikit jumlahnya pada kecamatan Dlanggu sejumlah 77 RTLH. Pada Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Mojokerto melaksanakan kegiatan *Updating* Informasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada 18 kecamatan dengan tujuan agar dapat memperbarui

dan menghasilkan data jumlah RTLH yang sesuai dengan perkembangan di masyarakat. Berdasarkan kegiatan updating ini, didapatkan hasil bahwa Total RTLH pada tahun 2017 di Kabupaten Mojokerto sebesar 8745, dimana jumlah tersebut meliputi pengurangan serta penambahan pada beberapa wilayah kecamatan. Penambahan paling banyak terjadi pada Kecamatan Jetis, dimana pada tahun 2016 jumlah RTLH sebesar 636 dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 738. Sedangkan Kecamatan Kemlagi mengalami pengurangan cukup signifikan, dimana pada tahun 2016 memiliki RTLH sebesar 1464 dan pada tahun 2017 berkurang menjadi 1415. Rekapitulasi serta perbandingan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Mojokerto Pada Tahun 2016 – 2017.

Data jumlah Rumah Tidak Layak Huni merupakan data yang bersifat dinamis, dapat berubah (bertambah maupun berkurang) seiring dengan perkembangan sosial ekonomi di masyarakat. Beberapa program pemerintah khususnya terkait bantuan rehabilitasi RTLH juga turut memberikan kontribusi terhadap pengurangan jumlah RTLH yang ada. Namun, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang senantiasa berubah, juga dapat mengakibatkan bertambahnya jumlah RTLH.

Pada tahun 2016, program mengalami masa peralihan akibat adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang akhirnya dibentuknya dinas

baru yakni Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yakni pembangunan perumahan. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara peneliti dengan Bapak Dody Prasetyo, selaku Kasubid Pembiayaan Pembangunan Daerah sebagai berikut :

“...program bedah rumah ini sudah berjalan dari tahun 2012 mba, dibawah bidang ekonomi. Sebenarnya program bedah rumah ini bukan program asli badan perencanaan pembangunan, Cuma dari pemerintah meminta tolong program ini dilaksanakan oleh BAPPEDA. Program bedah rumah ini, berasal dari dana APBD mba. Program ini bentuknya bantuan stimulan, jadi ga sepenuhnya mba. Tapi, yagitu namanya masyarakat desa, duitnya justru dibuat bayar utang, buat beli sembako. Wah kayak gitu kita yang repot mba bikin laporan pertanggungjawabannya. Tetapi, tahun 2016 itu, karena ada peraturan pemerintah tentang Perangkat Daerah, akhirnya program bedah rumah dijalankan oleh DPRKP2 sesuai dengan tupoksinya memang. Jadi mulai tahun 2017 program bedah rumah sudah dilaksanakan oleh DPRKP2 mba.” (Wawancara pada hari senin tanggal 26 Maret 2018)

Berdasar hasil penelitian, program bedah rumah memang mengalami peralihan dari BAPPEDA ke DPRKP2, begitu pun dasar pelaksanaannya, yang awalnya dari tahun 2012-2016 dasar pelaksanaan program bedah rumah yakni Peraturan Bupati tahun 2017 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial, dan dana berasal dari APBD. sedangkan tahun 2017, program bedah rumah bersumber dari dana





**b) Proses Implementasi program Bedah Rumah dalam Mewujudkan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mojokerto**

Keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan awal dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Agostiono, 2010), implementasi suatu program akan berhasil jika, didukung oleh beberapa faktor, antara lain standar dan sasaran kebijakan/program dan tujuan kebijakan/program, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi, dan lingkungan sosial. Faktor-faktor ini yang menentukan apakah Program Bedah Rumah berhasil dalam mewujudkan rumah layak huni di Kabupaten Mojokerto.

**1. Standar dan Tujuan Kebijakan/Program**

Setiap pelaksanaan memiliki arah atau tujuan yang ingin dicapai atau biasa disebut sebagai sasaran kegiatan. Begitupun, dalam program bedah rumah sendiri, setiap kegiatan yang telah direncanakan dan disusun, dilaksanakan sesuai dengan juklak juknis program, selain itu syarat-syarat penerima bantuan pun juga sudah ditetapkan oleh pemerintah dan diatur dalam peraturan Menteri PUPR nomor 21/PRT/M/2017 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan DAK Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Peraturan Menteri nomor 13/PRT/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Tujuan program bedah rumah ini, yaitu mendorong kemampuan masyarakat

berpenghasilan rendah, untuk berswadaya, pemerintah tidak hanya memberikan dana atau bantuan secara gratis, tetapi pemerintah ingin masyarakat juga berjuang dan berusaha untuk mewujudkan rumah layak huni, selain itu untuk menambah rasa gotong royong antar masyarakat yang akhir-akhir ini sudah jarang ditemui di kawasan pedesaan. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Gatot Soepriardi, Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum DPRKP2 Kabupaten Mojokerto.

“ Program bedah rumah ini, jelas mba, tujuannya adalah untuk memberikan bantuan stimulan atau swadaya masyarakat dalam perbaikan atau peningkatan rumah layak huni. Sasaran penerima bantuan sudah jelas yakni Masyarakat Berpenghasilan rendah, yang rumahnya sudah tidak layak huni. Target penerima bantuan tahun 2016, karena program masih dalam masa peralihan dari BAPPEDA ke DPRKP2, jadi saya kurang tau mba. Kalau tahun 2017, program dari DAK ada 79 rumah, dan BSPS ada 188 rumah. Kalau tahun ini, meningkat menjadi 307 rumah dari DAK, dan dari BSPS 281 target. Kami tidak asal menentukan calon penerima bantuan, syarat-syarat calon penerima, dana ataupun indikator rumah tidak layak huni pun sudah diatur dalam peraturan kementerian PUPR tentang BSPS dan peraturan kementerian tentang DAK. Sebelum program berjalan juga, kita memberikan sosialisasi ke desa-desa, lalu verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan, dari awal kita mulai mengenalkan program ke masyarakat hingga program selesai dilaksanakan. Selalu didampingi oleh perangkat desa, terkadang pihak dari kecamatan juga ikut, dan selalu dipantau dan dibimbing oleh Tenaga Fasilitator Lapangan, dan semua itu sudah diatur dalam peraturan kementerian PUPR tadi mba... ”  
(Wawancara pada tanggal Hari Senin, tanggal 30 April 2018 di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto).

Berdasar hasil wawancara yang peneliti lakukan, bahwa dalam melaksanakan program mereka mengacu pada Peraturan kementerian PUPR, dan setiap tindakan mereka sesuai dengan juklak

dan juknis program bedah rumah. selain itu, sasaran program bedah rumah pun jelas, yakni Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Adi Mahedarto selaku Kepala Seksi Bidang Sarana Prasana dan Utilitas, yakni

“.....ya kalo program bedah rumah, semuanya sudah diatur dalam peraturan kementerian mba, sudah ada juklak dan juknisnya mba, kita tinggal mengikuti saja, kecuali yang DAK mba, ada beberapa kewenangan murni dari daerah, yang BSPS kewenangannya dari provinsi, kita tinggal menjalankan.” (wawancara pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018).

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa pelaksanaan program bedah rumah di Kabupaten Mojokerto, dilakukan sesuai dengan juklak dan juknis yang terdapat pada peraturan kementerian nomor 13 dan nomor 21 agar mencapai hasil yang diinginkan, berikut capaian hasil dari program bedah rumah tahun 2017.

Hasil kegiatan Updating Informasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Mojokerto, didapatkan bahwa :

1. Terjadi penambahan jumlah RTLH pada hampir semua kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Jumlah yang tetap ada pada Kecamatan Bangsal dan Pungging.
2. Akan tetapi, juga terdapat pengurangan karena pada beberapa wilayah terdapat RTLH hasil pemetaan Tahun 2016 yang telah diperbaiki (baik swadaya maupun bantuan pemerintah).
3. Beberapa rumah ada yang tidak memiliki sertifikat tanah dan berada pada lahan milik pemerintah

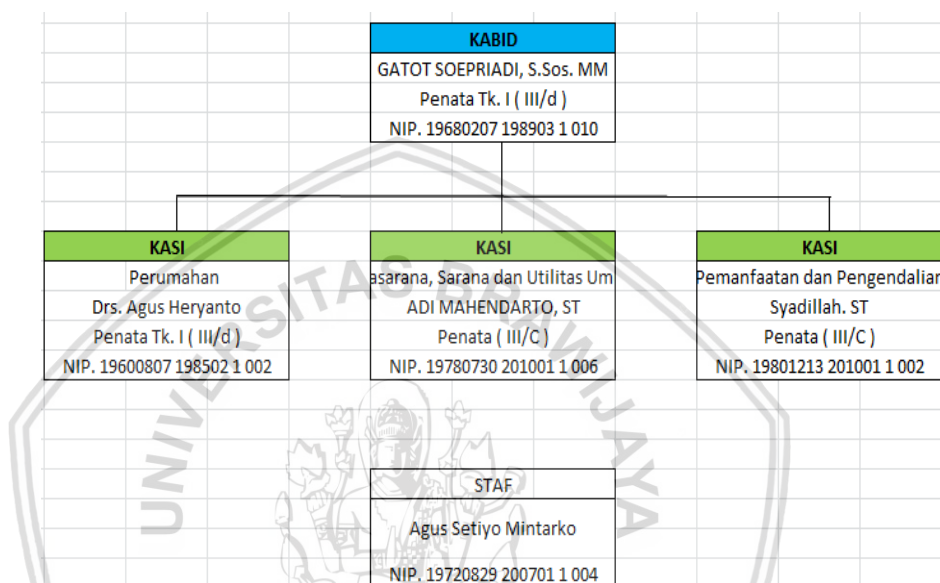
4. Beberapa rumah juga ada yang tidak berpenghuni

## 2. Sumberdaya

Proses kebijakan ataupun suatu pelaksanaan program dan kegiatan pasti dibutuhkannya sumberdaya aparatur dari pelaksana, perencana dan pembuat kebijakan. karena bagaimanapun jelas konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai keahlian untuk melakukan pekerjaan di bidangnya, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif dan efisien. Sumberdaya disini ada dua yakni, sumberdaya manusia dan sumber daya dalam bentuk materi. Pada pelaksanaan program bedah rumah, sumberdaya manusia yakni Pegawai Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto, Tenaga Fasilitator Lapangan, Pihak kecamatan, Perangkat Desa, dan Masyarakat baik masyarakat penerima bantuan ataupun masyarakat umum. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Adi Mahendarto, selaku Kepala Seksi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum, DPRKP2

“... program bedah rumah ini, selain diurus Dinas Perumahan Rakyat, kami juga dibantu oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), nanti diketuai oleh Koordinator Fasilitator. TFL ini sistemnya *recruitment* mba, jadi dari dinas dan Koordinator Fasilitator yang menyeleksi, mereka-mereka nanti yang lebih ke teknis, verifikasi dan survei rumah calon penerima bantuan, selain itu mereka juga yang mendampingi dan membimbing penerima bantuan dalam merancang kebutuhan-kebutuhannya,

dibantu oleh kepala desa setempat. Nanti dari dinas, yang mengurus segala berkas administrasi penerima bantuan untuk diajukan ke bupati dan diteruskan ke Kementerian PUPR, agar dana cair dan diakui legalitasnya...” (wawancara pada Hari Rabu, 25 April 2018 di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan).



**Gambar 11 : Struktur Organisasi Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum**

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, 2018

Sumberdaya Materi disini yakni Anggaran Program Bedah Rumah yang murni menggunakan dana APBN baik pada kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Gatot Soepriardi, selaku Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum, DPRKP2 Kabupaten Mojokerto.

“... Kalau sumber dana program bedah rumah itu sendiri baik dari kegiatan DAK ataupun Kegiatan BSPS, dua-duanya menggunakan dana APBN, langsung dari pusat mba. Dana yang diperoleh penerima bantuan sebesar Rp 15.000.000 ( Lima Belas Juta Rupiah) per unit rumah. Ini dana juga sifatnya

bantuan mba, jadi dananya hanya dipakai untuk pembelian bahan bangunan saja mba, untuk biaya tukang, ya dari penerima bantuan, atau kebanyakan penerima bantuan memilih berswadaya tenaga.” Wawancara pada tanggal Hari Senin,

N O	Jenis Kegiatan	Target Penerima 2017	Target Penerima 2018	Jumlah Dana 2017	Jumlah Dana 2018
1	DAK	79	307	Rp 1.185.000.000	Rp 4.605.000.000
2	BSPS	188	281	Rp 2.820.000.000	Rp 4.215.000.000

tanggal 30 April 2018) Berikut rincian dana program bedah rumah tahun 2016 dan tahun 2017

**Tabel 9 : Daftar Anggaran Program Bedah Rumah Tahun 2016-2017**

Sumber: Data Sekunder diolah (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto, 2018)

### 3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Setiap Perangkat Daerah sudah jelas tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Termasuk dalam program bedah rumah ini, untuk perizinan atau masalah administrasi dan pengenalan program kepada masyarakat calon penerima bantuan, Pemilihan Koordiantor Fasilitator, dan perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan bersama dengan Koordinator Fasilitator termasuk tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dibawah Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum. Karakteristik organisasi pelaksana memang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Mojokerto nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto.



#### 4. Sikap Para Pelaksana

Program bedah rumah dilaksanakan oleh DPRKP2 Kabupaten Mojokerto sebagai penyusun program yang berdasar atau berkiblat pada program pemerintah pusat yakni program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Kegiatan yang termasuk dalam Dana Alokasi Khusus. Kemudian, dalam pelaksanaan di lapangan dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan. Masing-masing peran atau pihak dalam program bedah rumah memang dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan tupoksinya masing-masing, dibuktikan dalam temuan kondisi lapangan yang peneliti dapat, bahwa pihak-pihak yang terkait dalam program ini, memang benar-benar mengerti permasalahan kondisi masyarakat calon penerima bantuan yang ada di Kabupaten Mojokerto.

Sikap pelaksana dalam program bedah rumah, menunjukkan respon yang sangat positif. Berdasar data transkrip wawancara dengan Calon Penerima bantuan di beberapa kecamatan di Kabupaten Mojokerto, adalah sebagai berikut :

No	Kecamatan	CPB	Realisasi CPB	
			BSPS	DAK
1.	Kecamatan Bangsal	10	3	
2.	Kecamatan Gedeg	10		2
3.	Kec. Mojoanyar	10		3
4.	Kecamatan Ngoro	10	5	
5.	Kecamatan Puri	10		4
6.	Kec. Dawarblandong	10	7	
7.	Kecamatan Sooko	10		2
<b>Total</b>		70	15	11

**Tabel 10 : Data CPB menjadi Penerima Bantuan Program Bedah Rumah**  
Sumber : Data Sekunder diolah (DPRKP2 Kabupaten Mojokerto, 2018)

Berdasar data tabel sebelumnya, dapat diketahui beberapa calon penerima bantuan berhasil mendapatkan program bantuan bedah rumah. dilihat dari data tabel sebanyak 11 orang menerima program bedah rumah berdasarkan kegiatan Dana Alokasi Khusus, dan 15 orang menerima bantuan bedah rumah berdasar kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Pada tahun 2017 sendiri, penerima pogram bantuan bedah rumah dari kegiatan DAK sebanyak 79 rumah dan BSPS sebanyak 188 rumah. sebanyak 13% yakni, 11 orang dari 79 penerima bantuan kegiatan DAK, yang berhasil menjadi narasumber penulis dan berhasil mendapatkan program bedah rumah. Sebanyak 7,9% yakni, 15 orang dari 188 penerima bantuan kegiatan BSPS, yang berhasil menjadi narasumber penulis dan berhasil mendapatkan program bedah rumah. pada temuan lapangan, kondisi rumah narasumber memang ada beberapa yang cukup tidak layak huni, contohnya seperti rumahnya sudah berdinding tembok, meskipun tidak mempunyai plafon, atau kusen pintu dan jendela yang sudah rapuh, dan beberapa sangat tidak layak huni, seperti, lantai masih beralaskan tanah, dinding masih dari anyaman bambu, dan tidak mempunyai kamar mandi. Selain, data tabel, bukti respon atau dukungan masyarakat yang baik juga dapat dilihat dari hasil wawancara dan temuan peneliti di lapangan. Beberapa hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa calon penerima bantuan atau masyarakat umum.

“...waah mba, alhamdulillah ada program bantuan-bantuan gini, yo maklum mba, *wong ndak punya*, benerin rumah *ae ndak bisa*. Belum pernah dapat bantuan apa-apa mba, yo nek dapat, yo lumayan buat *benerno* iku plafon *e podo rusak kabeh mba*, pingin dikeramik *rumah e*” (Ibu Laila, Desa Balongmojo)

“.....nggeh mba, mbah nggeh nyuwun panyugih, nggeh mugimugi rezekine, wangsul programipun. Niki griyane mbah nggeh ngoten niki, dinding *e tasik gedeg*, niki alas *e tasik tanak mba*. Nggeh bismillah” (Mbah Sripah, Desa Kemantren)

“....iya mba, ini rumahnya wes rusak mba, yo alhamdulillah kalau dapat mba, setiap hujan itu, atapnya sering bocor mba, kasian lihatnya” (tetangga Ibu Laila)

“*Seneng kulo mbak wonten bantuan ngenten-ngenten niki, nggeh mugimugi bantuan e ditambah niku penerimane*. (Bapak Sujak, Desa Gayaman)”

“..iya mba, di desa kemantren ini banyak memang rumah-rumah warga yang kurang layak huni, banyak memang yang rumahnya masih plesteran mbak. makanya waktu dari kecamatan bilang ada bantuan bedah rumah, wah yo tak sambut gembira mbak, alhamdulillah. (Pak Ibnu, Kepala Desa Kemantren)”

“..ya, semoga apanamanya bantuan ini, semakin diperbanyak lagi penerimanya, dan semoga juga dananya semakin besar, lak gitu a mbak (Ibu Tyas, Kecamatan Mojoanyar)”

Beberapa pendapat lainnya pun semuanya merespon baik dan mendukung berjalannya program bedah rumah ini. karena, memang rumah adalah kebutuhan yang penting dalam kehidupan, kelayakan dan kenyamanan sebuah rumah memang, terkadang menjadi masalah yang harus segera ditangani.

## 5. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan

Komunikasi merupakan komponen atau kebutuhan yang sangat penting dalam sebuah program ataupun kebijakan. Jika, komunikasi terganggu, maka tidak dapat dipungkiri, kebijakan akan

mengalami hambatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh

Bapak Adi Mahendarto, dalam wawancara sebagai berikut :

“...Jadi dalam program bedah rumah ini data calon penerima kita dapat dari Bappeda atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto karena memang program bedah rumah ini awalnya dilaksanakan oleh dari Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya Setelah data didapat kami melakukan perekrutan tenaga fasilitator lapangan, setelah dibentuk tenaga fasilitator lapangan, kami melakukan rapat koordinasi sosialisasi desa dengan perangkat desa camat untuk berdiskusi atau berkoordinasi terkait dengan dengan sosialisasi Desa setelah waktu yang sudah ditentukan, selanjutnya tahap sosialisasi desa dan memperkenalkan TFL kepada para calon penerima bantuan dan menjelaskan syarat-syarat penerima bantuan dan bagaimana indikator rumah tidak layak huni tersebut. Kemudian, TFL peserta kepala desa mengunjungi atau mensurvei rumah-rumah calon penerima bantuan satu persatu. Setelah survei tadi, TFL beserta dinas berkoordinasi menentukan calon penerima bantuan yang memang rumahnya sudah tidak layak huni dan layak mendapat bantuan sesuai persyaratan yang ditentukan, dan rumahnya masih layak huni tapi memang perlu mendapat bantuan itu akan diusulkan untuk tahun depan. Kemudian, nama-nama penerima bantuan tersebut dan sesuai dengan jumlah target yang memang direncanakan dari awal kegiatan itu nanti diteruskan dinas ke bupati untuk mendapatkan Surat Keputusan nama penerima bantuan program bedah rumah. Setelah mendapatkan SK Bupati tentang nama penerima bantuan program bedah rumah, dari dinas yang akan mengajukan dan diusulkan ke Kementerian untuk segera mendapat persetujuan untuk pencairan dana kemudian dinas mengundang beberapa bank negara yaitu ada 3 bank yang akan diundang untuk menjadi Mitra dalam program bedah rumah ini yaitu rencananya Bank BRI, Bank Jatim, dan Bank BNI. Setelah ditentukan bank mana yang memang dia setuju dengan segala persyaratan dan setuju menjadi Mitra program beda rumah ini selanjutnya pemerintah bersama dengan Bank ke Kecamatan atau ke desa setempat untuk selanjutnya serah terima buku tabungan dan untuk membentuk kelompok, setelah adanya serah terima buku tabungan itu nanti ketua kelompok masing-masing desa menentukan kontrak dengan toko bangunan yang memiliki NPWP, dibantu rekomendasi dari dinas. setelah itu, program rehabilitasi rumah layak huni mulai dilaksanakan dengan dibantu, didampingi, dan dibimbing oleh tenaga fasilitator lapangan, kepala desa, dan camat. Tugas dari tenaga fasilitator lapangan sendiri di sini, yaitu untuk membantu mendampingi dan membimbing penerima bantuan dalam menyusun kebutuhan materialnya dalam menyusun laporan

pertanggungjawaban dari awal pembangunan hingga pembangunan itu berakhir. Kalau BSPS, ya sama saja seperti DAK mba, Cuma bedanya TFL nya langsung di rekrut oleh provinsi, sama Kecamatan yang dapat juga Kecamatan yang tidak termasuk kedalam KOTAKU (Gedeg, Mojosari, Mojoanyar, Puri, Sooko)” (Wawancara pada Hari Rabu, tanggal 25 April 2018)

Berdasar hasil wawancara yang dijelaskan oleh Bapak Adi, bahwa perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan, memang sudah diatur dalam peraturan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, namun syarat-syarat TFL itu sendiri ditentukan oleh Dinas jika kegiatan DAK, dan ditentukan Provinsi jika kegiatan BSPS. Dari hasil temuan wawancara dan temuan peneliti di lapangan, bahwa komunikasi yang terjalin antara Dinas dengan pihak-pihak yang terlibat (TFL, Perangkat Desa, Kecamatan) saling membutuhkan antar pihak dan berkesinambungan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

## **6. Kondisi Ekonomi, Sosial, Politik**

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi suatu program adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi suatu program, berikut penjelasan pengaruh lingkungan sosial, ekonomi dan politik :

#### a) Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial merupakan pengaruh sosial yang terjadi sesudah berjalannya suatu program dan merupakan perubahan yang terjadi pada manusia, misalnya hubungan atau interaksi antar individu. pembangunan/perbaikan rumah warga penerima bantuan menjalin kerjasama dan gotong royong dengan saudara dan para tetangga, agar terselesainya perbaikan rumah sesuai waktu yang telah ditentukan, selain itu dana yang mereka terima hanya boleh digunakan untuk membeli material/bahan bangunan saja, jadi untuk tukang/tenaga ahli mereka memanfaatkan bantuan dari sanak saudara dan tetangga untuk meminimalisir biaya. Hal ini menunjukkan bahwa warga memiliki hubungan sosial yang baik antar sesama dengan mampu bekerja secara kelompok dan bekerjasama untuk membantu menyelesaikan proses pembangunan/perbaikan rumah.

Manusia disebut sebagai makhluk sosial yang artinya manusia tidak mampu hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Dengan demikian Program Bedah Rumah memberikan dampak sosial yang positif kepada warga penerima bantuan dengan warga yang ada disekitarnya. Adanya Program Bedah Rumah ini mampu meningkatkan jiwa sosial warga dengan membantu warga yang membutuhkan. Selain, adanya kerjasama yang tejalin, rasa empati dan simpati masyarakat dengan orang



di sekitarnya juga lebih terbangun dan lebih peka, ini sangat dibutuhkan dalam masyarakat, apalagi di zaman sekarang, teknologi telah menguasai segalanya.

Program Bedah Rumah mampu memberikan perubahan sosial yang baik bagi warga setempat. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat bisa mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, serta interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan dengan kelompok manusia. Interaksi sosial juga sebuah bentuk hubungan yang dibangun antara individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok lain dalam kehidupan bermasyarakat, dimana interaksi juga merupakan sebuah proses sosial yang secara sengaja dibentuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengaturan interaksi sosial diantara para anggota terjadi karena komitmen mereka terhadap norma-norma sosial yang menghasilkan daya untuk mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan diantara mereka. Interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat menghasilkan suatu hasil yang mana sebuah interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan

masyarakat akan diikuti dengan tindakan sosial (*social action*). Dengan komunikasi ide-ide baru dan informasi baru akan merubah penilaian masyarakat tentang berbagai hal yang selanjutnya akan mengubah ke arah tindakan yang baru.

b) Lingkungan Ekonomi

Kondisi rumah yang tidak layak huni biasanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Untuk makan sehari-hari saja terkadang masih kesulitan, apalagi untuk memperbaiki atap rumah yang bocor, membenarkan plafon yang rusak, mengganti kusen yang sudah rapuh dimakan serangga, bahkan untuk mengganti dinding-dinding bambu dengan dinding-dinding kokoh. Kebutuhan akan rumah layak huni pun menjadi kesekian dibanding kebutuhan-kebutuhan penting lainnya. Akibatnya, rumah menjadi tidak layak huni, fungsi rumah sebagai tempat berteduh, dari teriknya matahari, derasnya hujan pun sudah bergeser fungsinya sebagai tempat bertahan sementara dari derasnya hujan dan teriknya matahari. Oleh karena itu melalui program Bedah Rumah ini secara tidak langsung berdampak pada penerima bantuan, karena dana yang penerima bantuan telah sisihkan untuk memperbaiki rumah mereka, bisa untuk kebutuhan primer lainnya yang tidak kalah penting dengan kebutuhan memperbaiki rumah.

### c) Lingkungan Politik

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan Bapak Adi Mahendarto, yakni sebagai berikut

“..dalam program bedah rumah ini mba, kan dananya terpusat dari dana APBN, pun juga kegiatannya berkiblat dari kegiatan BSPS Kementerian PUPR, yang memang fokusannya meningkatkan kualitas rumah layak huni di seluruh penjuru Indonesia. Kalau DAK, program daerah yang bersumber dari dana APBN. Program bedah rumah ini pun juga sudah disosialisasikan kepada Kepala Desa dan Kecamatan terlebih dahulu, dan sambutan mereka sangat baik dan bersedia kooperatif demi kelancaran program bedah rumah ini. ”

Jadi, dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Perangkat Desa dan Pihak Kecamatan sangat mendukung dan bersedia kooperatif. Dalam pelaksanaannya sendiri, Perangkat Desa dan terkadang dari pihak kecamatan ikut mendampingi warganya dalam program bedah rumah ini, dari awal pengenalan program kepada warganya hingga perbaikan rumah warganya. Selain itu, Perangkat Desa berperan memberikan rekomendasi atau usulan warganya yang rumahnya tidak layak huni, tetapi tidak masuk data pemerintah. selain sambutan Perangkat Desa yang sangat mendukung program bedah rumah ini, begitupun tanggapan masyarakat juga sangat mendukung terhadap program ini. Dengan adanya dukungan dari lingkungan ekonomi, sosial dan politik dalam pelaksanaan dan keberhasilan kebijakan diharapkan akan mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, dampak politik yang dirasakan saat peneliti turun ke

lapangan, yaitu beberapa Perangkat Desa mengajukan kerabatnya atau orang terdekatnya terlebih dahulu untuk mendapatkan bantuan program bedah rumah.

## **2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Program Bedah Rumah dalam Mewujudkan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mojokerto**

Setiap pelaksanaan program tentu dipengaruhi oleh berbagai macam hal, pun dalam program bedah rumah. Pengaruh atau faktor-faktor dapat menjadikan suatu program terealisasi atau terlaksana dengan baik atau justru sebaliknya. Pengaruh atau faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua jenis, yakni faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dan faktor penghambat program bedah rumah ditentukan peneliti dengan mengacu pada hasil wawancara dan laporan kegiatan sebelumnya. Kedua faktor tersebut, dijelaskan sebagai berikut .

### **a) Faktor Pendukung Implementasi Program Bedah Rumah**

#### **1) Faktor Pendukung Internal**

Pelaksanaan Program Bedah Rumah, tidak akan bisa berjalan lancar tanpa adanya dukungan dari beberapa pihak yang terlibat, baik dari pihak internal yakni Pelaksana program , ataupun pihak eksternal yakni penerima bantuan atau masyarakat berpenghasilan rendah dan mitra kerja, Mitra kerja disini yakni TFL, Perangkat Desa setempat, Kecamatan, dan Pihak Bank. Seperti yang

diungkapkan oleh Bapak Gatot Soepriardi, selaku Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yakni,

“... Kalau dukungan internal itu tentunya yang pertama karena ada dasar pelaksanaannya, jadi program bedah rumah ini jelas arahnya kemana, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dasar pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri PUPR nomor 13 tentang BSPS dan nomor 21 tentang Petunjuk Operasional DAK itu mba. Terus, dukungan internal yang kedua ya jelas dari Pemerintah Daerah, dan provinsi mba, ya kalau dari pemerintah daerahnya saja tidak mendukung ya pasti program ini tidak akan berjalan sampai sekarang mba, apalagi sampai diperkenalkan dan disosialisasikan ke masyarakat. Ya intinya, program apapun itu asal tujuannya untuk membantu masyarakat atau keberlangsungan masyarakat banyak, dan tidak menyalahi aturan yang berlaku, pasti didukung mba kan kita ini pelayan masyarakat, istilah kasarnya kan gitu ya. Selain itu, ketiga adalah komunikasi dan koordinasi antar Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Staff yang terjalin baik.” (wawancara pada hari senin, tanggal 30 April 2018).

Berdasar pada hasil wawancara, dukungan dari faktor internal dalam program bedah rumah ada 3 (tiga) yakni, Dasar pelaksanaannya jelas, Pemerintah daerah dan provinsi sangat mendukung pelaksanaan program bedah rumah, dan yang terakhir yakni adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Kepala dengan bawahannya.

## 2) Faktor Pendukung Eksternal

Faktor pendukung implementasi program bedah rumah ini juga berasal dari faktor eksternal yakni penerima bantuan atau masyarakat berpenghasilan rendah dan mitra kerja. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Gatot Soepriardi, sebagai berikut :

“Kalau dukungan dari eksternal itu kalau dari penerima bantuan atau masyarakat berpenghasilan rendah, pertama, penerima

bantuan sangat kooperatif, kedua, penerima bantuan sangat aktif. Kemudian yang ketiga, Penerima bantuan memiliki itikad baik, dan terakhir lingkungan mendukung, maksudnya, setiap penerima bantuan kan diberi waktu untuk bertanya ke keluarga besar maupun tetangga, karena kan dananya memang hanya Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah), bila pada pertengahan mereka kekurangan dana atau butuh tukang, kan ada keluarga atau kerabat yang mungkin dapat membantu, atau tetangganya juga mungkin mau membantu, makanya mba, kan salah satu syaratnya mampu berswadaya, karena memang kita niatnya membantu memperbaiki bukan membangun baru. Keempat ya, karena penerima bantuan memiliki itikad baik untuk melanjutkan atau menjalankan perbaikan rumahnya sesuai dengan kesepakatan yang berlaku dengan waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah, dan mampu menyelesaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan perbaikannya, soalnya ini kan didana negara, riskan mba. Kalau dukungan dari mitra kerja ini, ya Alhamdulillah, selama ini komunikasi dan koordinasi antara dinas dengan TFL, Perangkat desa, dan Kecamatan sejauh ini berjalan baik dan lancar mba, mereka semua sangat kooperatif, dan TFL juga sangat kooperatif dan sangat aktif dalam mendampingi dan membimbing penerima bantuan dalam menyusun kebutuhan akan material dan penyusunan laporan pertanggungjawabannya, mereka sangat membantu sekali mba". (Wawancara pada tanggal Hari Senin, tanggal 30 April 2018)

Berdasar hasil wawancara, faktor pendukung eksternal ada dari penerima bantuan, dan Mitra Kerja. Berikut faktor pendukung eksternal, yakni dari :

- a. Penerima Bantuan atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah
  1. Penerima bantuan sangat kooperatif atau mampu diajak bekerja sama;
  2. Penerima bantuan sangat aktif;
  3. Penerima bantuan memiliki itikad baik;
  4. Lingkungan mendukung.



b. Mitra Kerja

1. Mitra Kerja sangat Kooperatif dan bekerja sesuai tugas masing-masing
2. Komunikasi yang terjalin antara Dinas dengan Mitra Kerja baik dan lancar
3. Mitra Kerja sangat membantu program bedah rumah berjalan dengan lancar.

b) **Faktor Penghambat Implementasi Program Bedah Rumah**

Pelaksanaan program bedah rumah, pasti tidak selamanya berjalan lancar dan baik-baik saja. Sama halnya dengan faktor pendukung. Faktor penghambat juga dipengaruhi oleh faktor internal dari Dinas perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan maupun faktor eksternal dari Penerima bantuan atau Masyarakat Berpenghasilan rendah, dan mitra kerja, seperti berikut:

1) **Faktor Penghambat Internal**

Salah satu faktor penghambat eksternal yaitu, masih minimnya atau terbatasnya Sumber Daya Manusia pada Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum. Dikarenakan, pada bidang ini, tidak ditemukan staff, kecuali pada Seksi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum, namun hanya 1 (satu) staff saja. Hal ini dibuktikan pada struktur Organisasi Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum itu sendiri, sehingga semua pengenalan sosialisasi desa ke

setiap kecamatan dikerjakan sendiri oleh Bapak Adi Mahendarto.

Hal ini juga disampaikan Bapak Adi Mahendarto, sebagai berikut

“...Kalau hambatan internal, ya gini ini, tidak ada staff, jadi apa-apa ya saya lakukan sendiri dibantu dengan Pak Agus, sebenarnya ndak terlalu menghambat sih, ya kalau jadwal sosialisasinya beruntun, lumayan merepotkan juga. Awalnya sih, ada 3 staff magang, dilimpahkan dari Kabupaten, karena memang dinas ini masih baru kan, tapi ya gitu kerjanya kurang bagus dan malah ndak membantu, ya udah saya minta dinas buat diambil lagi. Saya masih bisa kok, untuk menangani sendiri, ya Cuma terkadang kalau semua-semua butuh untuk diurus, kadang merepotkan dan padat sekali”. (Wawancara pada Hari Rabu, tanggal 25 Maret 2018)

## 2) Faktor Penghambat Eksternal

Beberapa penyebab terjadinya hambatan eksternal dalam pelaksanaan suatu program, pun tak terkecuali pada implementasi program bedah rumah, sama halnya, hambatan yang terjadi di ruang lingkup internal, hambatan juga malah seringkali terjadi pada ruang lingkup eksternal. Beberapa hambatan yang terjadi di ruang lingkup eksternal, :

- a) Penerima Bantuan
  - Keluarga/lingkungan tidak mendukung
  - Swadaya tidak ada
  - Apriori pihak lain
  - Penerima Bantuan berubah pikiran dari yang semula bersedia menjadi tidak bersedia
  - Melaksanakan pembangunan tidak sesuai waktu yang direncanakan/ditetapkan

b) Mitra Kerja

1. Data pendukung di lapangan tidak sesuai
2. Kurangnya dukungan Perangkat Desa

Hasil data diatas juga didukung oleh hasil wawancara dengan

Bapak Gatot Soepriardi, yakni sebagai berikut :

“Kalau untuk hambatan eksternal, yang pertama data pendukung di lapangan tidak sesuai, terkadang beberapa kita jumpai, datanya tidak valid, jadi ada mba kemarin itu, salah seorang warga masuk rekomendasi bantuan, namun setelah di survey lokasi, ternyata rumahnya sudah gedong, mba. Sudah bagus. Beberapa kali sering kejadian seperti itu mba, jadi di dalam data ada namanya sebagai calon penerima bantuan, tetapi waktu di cek di lokasi, rumahnya sudah sangat layak huni. Selain itu, ada juga ini beberapa kejadian, penerima bantuan berubah pikiran dari yang semula bersedia menjadi tidak bersedia. Jadi, saat di verifikasi lapangan, semua calon bersedia atau mampu swadaya, dan menerima persyaratan program, tapi tiba-tiba berubah mundur dari daftar calon penerima, dan menyatakan tidak bersedia. Lalu ada lagi mba, karena memang sudah tua sekali, dan terkadang calon penerima bantuan hanya tinggal sendiri, dan rumahnya pun benar-benar dalam kondisi memprihatinkan, dan tidak sanggup berswadaya, tapi kan ya gitu syaratnya harus sanggup berswadaya, ada juga mba, pasangan suami istri, kakek nenek, untuk melihat kondisinya memang sangat layak mendapatkan bantuan, tapi ya dengan kondisi tua, anak-anaknya juga jauh atau terkadang tidak mendapat dukungan dari anaknya, dan beliau tidak sanggup berswadaya juga. Kemudian, ada juga kasus lingkungannya tidak mendukung, karena memang, saudara-saudaranya jauh, anak-anaknya juga pada sibuk kerja atau tetangganya tidak bisa membantu, jadi ya menghambat sekali untuk proses perbaikan, apalagi beliau juga tidak sanggup berswadaya. Ada lagi kasus yang menarik, karena memang masyarakat desa kan, terkadang masih percaya dengan takhayul, atau hari baiklah, karena itu pembangunan jadi terhambat dan tidak sesuai waktu yang telah ditentukan, jadinya repot kita mba, harus pertanggungjawaban ke pusat. Ada juga mba, karena memang dari perangkat desanya yang kurang mendukung, atau kurang tanggap dalam program ini. Oh iya, ini juga kasus yang beberapa kali terjadi, adanya pikiran-pikiran negatif atau provokasi dari pihak luar kepada penerima bantuan” (Wawancara pada Hari Senin, tanggal 30 April 2018).

Pernyataan yang sama pun, pernah disampaikan oleh Bapak Ahmad Yani, selaku Koordinator Fasilitator Program Bedah Rumah DAK, yakni sebagai berikut :

“...ya terkadang gitu itu ya, masyarakat sering berubah-ubah pikirannya, kadang yo dapat omongan, atau provokasi dari orang-orang luar, yang awalnya ingin mendapatkan bantuan, tiba-tiba mundur, ndak sanggup katanya. Ya kita, yang repot lagi nyari gantinya. Atau ya terkadang memang lingkungannya tidak mendukung, ya itu tadi, karena anak-anaknya pada sibuk kerja, ndak mau jadi tukang bantu perbaikan rumah orang tuanya, atau saudara-saudaranya jauh-jauh, sehingga ndak sanggup.” (Wawancara pada Hari Rabu, tanggal 25 April 2018)

Sama halnya, yang disampaikan oleh Mas Indra selaku Tenaga Fasilitator Lapangan DAK, sebagai berikut :

“Data dari Dinas *iki* banyak yang salah, *ndak* sesuai dengan kondisi di lapangan. Soalnya sering, aku verifikasi lapangan, beliau masuk data ternyata rumahnya bagus, terus pernah aku sama lucky verifikasi lapangan di Desa Sooko, yang mendapat bantuan ndak tersebar, kebanyakan di RT 02, dan itu semua rumahnya sudah bagus-bagus, yo lumayan jauhlah dari kata tidak layak. Terus, pernah juga kena marah-marah sama ibu-ibu, karena beliau merasa mampu, namun masuk ke dalam data calon penerima bantuan. Jadi, akhirnya setiap kita verifikasi lapangan, bawa dua data. Data dari dinas dan data dari desa, yang sudah direkomendasikan oleh perangkat desa. Kebanyakan memang lebih tepat dari desa.” (Wawancara saat Verifikasi Lapangan, pada Hari Kamis, tanggal 26 April 2018).

#### **D. ANALISIS DATA**

##### **1. Implementasi Program Bedah Rumah dalam Mewujudkan**

##### **Rumah Layak Huni di Kabupaten Mojokerto**

##### **a) Program Bedah Rumah Tidak layak Huni**

Program Bedah Rumah, seperti yang dijelaskan sebelumnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat

Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Peraturan Kementerian Perumahan Rakyat nomor 21 tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Infrastruktur Dana Alokasi Khusus oleh Kementerian Perumahan Rakyat dengan dana berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh masing-masing kabupaten/kota yang telah ditentukan. Kabupaten/kota yang terpilih harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan sebelumnya oleh Kementerian Perumahan Rakyat diantaranya yaitu merupakan daerah tertinggal, memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, memiliki jumlah rumah tidak layak huni yang tinggi, indeks pembangunan manusia rendah, produk domestik bruto rendah, dan lain-lain. Kabupaten Mojokerto termasuk kedalam kriteria yang telah disebutkan di atas, sehingga Kabupaten Mojokerto menjadi salah satu kota yang menerima bantuan tersebut.

Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 kecamatan yakni Kecamatan Dawarblandong, Kemlagi, Jetis, Jatirejo, Gondang, Pungging, Mojoanyar, Puri, Sooko, Gedeg, Mojosari, Dlanggu, Kutorejo, Trawas, Pacet, Bangsal, Trowulan, dan Ngoro. Namun, tidak semua kecamatan menjadi sasaran program bedah rumah. Hal ini karena pertimbangan mengenai kriteria penerima bantuan dan kuota yang disediakan. Program Bedah Rumah di Kabupaten Mojokerto dilaksanakan oleh pihak Dinas Perumahan Rakyat,

Kawasan Permukiman dan Perhubungan. Dalam pogram bedah rumah, memiliki 2 kegiatan yakni BPS dan DAK. Dalam proses sosialisasi, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dibantu oleh pihak kelurahan setempat yang akan langsung melakukan pendekatan dengan masyarakat penerima bantuan.

Program Bedah Rumah ini bertujuan untuk menstimulan masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun atau memperbaiki rumah masing-masing dengan dana yang diberikan. Dengan demikian diharapkan masyarakat akan termotivasi untuk memiliki rumah yang layak huni dan lingkungan yang sehat. Pencapaian tujuan ini dapat menjadi dampak dari pelaksanaan program BPS. Menurut Dunn, dalam (Qomaria, 2015) dampak program/kebijakan merupakan perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran program/kebijakan. Dampak yang dapat dilihat dari pelaksanaan program bedah rumah ini tentu saja perubahan fisik dari rumah penerima bantuan.

Berdasar data penelitian, dapat diketahui total pelaksanaan pada 18 Kecamatan di tahun 2016, dengan jumlah akhir RTLH yang didata mencapai 8.604 RTLH. Dari 18 Kecamatan dapat diketahui bahwa jumlah RTLH dengan jumlah yang tinggi di Kecamatan Dawarblandong sejumlah 1.675 RTLH, sementara jumlah RTLH yang paling sedikit jumlahnya pada kecamatan



Dlanggu sejumlah 77 RTLH. Pada tahun 2016 ini, program bedah rumah mengalami peralihan pelaksana, yakni dari BAPPEDA ke DPRKP2 yang mengakibatkan program kurang berjalan secara maksimal, dan program sempat tersendat.

Pada tahun 2017, terjadi cukup banyak penambahan rumah tidak layak huni di beberapa kecamatan. Total RTLH pada tahun 2017 di Kabupaten Mojokerto sebesar 8745. Adanya kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh pihak TNI dan dinas sosial yang melakukan kegiatan bedah rumah turut membantu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni yang ada di Kabupaten Mojokerto. Penambahan paling banyak terjadi pada Kecamatan Jetis, dimana pada tahun 2016 jumlah RTLH sebesar 636 dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 738. Sedangkan Kecamatan Kemlagi mengalami pengurangan cukup signifikan, dimana pada tahun 2016 memiliki RTLH sebesar 1464 dan pada tahun 2017 berkurang menjadi 1415.

**b) Implementasi Program Bedah Rumah dalam Mewujudkan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mojokerto**

Kesuksesan suatu program dalam mencapai tujuan awal dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain standar dan sasaran kebijakan/program dan tujuan kebijakan/program, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi, dan lingkungan sosial. Faktor-faktor ini yang

menentukan apakah program Bedah rumah menghasilkan dampak yang signifikan atau tidak. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2010) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, individu, kelompok swasta yang mengarah pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah diciptakan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang alurnya melakukan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pada hasil temuan lapangan, bahwa proses kebijakan Kabupaten Mojokerto terkait program bedah rumah, kegiatan BSPS adalah turunan dari program Kementerian Perumahan Rakyat, dengan nama program yang sama yakni program bedah rumah. Dinas Perumahan Rakyat sebagai penyalur atau penghubung program, pelaksana program dan kewenangan program BSPS adalah dari provinsi.

### **1) Standar dan Tujuan Kebijakan/Program**

Aspek pertama yang perlu diperhatikan dalam implementasi suatu program, adalah standar dan tujuan kebijakan. Standar atau ukuran dan tujuan kebijakan diperlukan untuk mengarahkan dan sebagai dasar pelaksanaan suatu program, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan yang telah direncanakan dan agar berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Van Metter dan Van Horn dalam (Agostiono:2010) mengemukakan untuk mengukur kinerja

implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Sasaran dan tujuan sebuah kebijakan atau program harus jelas agar kebijakan tersebut tepat sasaran. Program Bedah Rumah memiliki tujuan dan sasaran yang jelas. Tujuan dari program Bedah Rumah ini ada untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah membangun sendiri rumah yang layak huni dengan dana yang telah diberikan oleh pemerintah. Sedangkan sasaran dari program ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni. Dari data, yang didapat peneliti, Target program bedah rumah tahun 2017 mengalami peningkatan dibanding tahun 2016. Dapat dilihat peningkatan target ini, merupakan bentuk perhatian, kepedulian dan pelayanan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakatnya yang berpenghasilan rendah. Dilihat dari data tahun 2016, berdasar data dari web resmi Badan Perencanaan Pembangunan, dana dari APBN tidak terealisasi, sebanyak 280 penerima bantuan bersumber dari dana APBD. Tahun 2017, DAK sebesar 79 penerima bantuan, tahun 2018 meningkat menjadi 307 penerima bantuan. BSPS, tahun 2017 sebesar 188 penerima bantuan, tahun 2018 meningkat menjadi 281 penerima bantuan.

Jadi dapat disimpulkan, target atau sasaran penerima bantuan program bedah rumah sesuai dengan ketentuan penerima program sesuai dengan apa yang ada dalam isi Peraturan kementerian PUPR, namun pada awalnya tetap tergantung pada rekomendasi dari desa, diteruskan ke dinas.

## 2) Sumber Daya

Implementasi suatu program tidak dapat dilepaskan dengan adanya sumber daya, karena tanpa adanya sumber daya dipastikan suatu program tidak dapat berjalan. Berdasar Van Meter Van Horn dalam (Agostiono:2010) Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi program, karena bagaimanapun jelas konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu program, jika para personil yang bertanggungjawab mengimplementasikan program kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi program tersebut tidak akan bisa efektif. Pelaksana program Bedah Rumah di Kabupaten Mojokerto berupa sumber daya manusia yakni staff Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto, dengan pihak-pihak luar yang ikut terlibat yakni, Tenaga Fasilitator Lapangan, perangkat desa, Kecamatan dan masyarakat sekitar baik masyarakat dari kelompok sasaran maupun masyarakat umum. Sedangkan sumber daya berupa materi atau anggaran atau dana yakni dana program Dana

Alokasi Khusus maupun Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berasal dari dana APBN sebesar Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) setiap penerima bantuan.

### 3) Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik Organisasi Pelaksana dalam program bedah rumah, menurut Van Meter Van Horn, dalam (Agostiono, 2010) pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian program akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksana. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi program perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi program maka semakin luas pula agen pelaksana yang terlibat.

Birokrasi/organisasi sebagai pelaksana sebuah program harus dapat mendukung program yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik. Untuk dapat terlaksana program bedah rumah dengan baik, maka dibutuhkan peran dari agen-agen pelaksana yang baik, yang sudah kompeten di bidangnya. Pada program beda rumah ini, ciri-ciri atau kualitas atau spesifikasi di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, yang memang tugas pokok dan fungsinya di bidang pembangunan perumahan dan permukiman, sedangkan

Pihak Luar yakni TFL, yang sudah melalui seleksi sehingga diperoleh orang-orang terbaik yang memang sudah paham sekali dengan program bedah rumah ini, sedangkan untuk mitra, memang sudah terpilih pihak-pihak yang sudah kompeten di bidangnya dan mampu diajak bekerjasama dengan baik, dan perangkat desa sendiri, pastinya sudah sangat tahu dengan tugas pokok dan fungsinya, selain itu adanya peran perangkat desa, sangat membantu keberhasilan implementasi program bedah rumah ini, karena perangkat desa yang paham betul bagaimana kondisi-kondisi warganya, sehingga dapat melakukan rekomendasi untuk calon penerima bantuan program bedah rumah.

#### **4) Sikap Para Pelaksana**

Menurut pendapat Van meter dan Van Horn dalam (Agostiono:2010) sikap penolakan dan penerimaan dari agen pelaksana program sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi program itu sendiri. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik yang biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.



Jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Sikap yang ditunjukkan oleh pihak pelaksana program bedah rumah di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, dan Tenaga Fasilitator sudah baik. Mereka menunjukkan sikap yang membaur dengan masyarakat calon penerima bantuan, maupun masyarakat umum sehingga mendapatkan respon yang baik pula dan dihargai masyarakat. Selain itu pihak pelaksana dibantu oleh kegiatan pelaksana atau mitra kerja program bedah rumah mampu mengimplementasikan program dengan baik dan bertanggung jawab atas tugas yang diembannya.

##### **5) Komunikasi Antar organisasi dengan Kegiatan Pelaksana**

Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan melibatkan unsur manusia dan sumber daya yang akan selalu berurusan. Faktor ini, yang sangat sesuai untuk peneliti terapkan pada program bedah rumah, adanya faktor komunikasi atau hubungan antara organisasi pelaksana dalam hal ini, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto, dengan

kegiatan pelaksana dalam hal ini, Pihak-pihak luar yang berkepentingan yakni, Perangkat Desa, TFL, dan Mitra Kerja. Menurut Van Horn dan Van Mater dalam (Agostiono:2010) Koordinasi yang baik antar unit dalam organisasi dibutuhkan pembagian tugas yang jelas antar unit. Hal ini berguna agar setiap unit yang ada dapat difungsikan secara optimal, dengan adanya pembagian tugas yang jelas dapat menghindari adanya kesalahpahaman antar anggota, antara pihak dinas sendiri dengan team lapangan (TFL, Perangkat desa, Kecamatan). Bentuk koordinasi ini berupa rapat koordinasi. Komunikasi dan aktivitas pengamatan dapat dikatakan lancar, jika minimnya miskomunikasi dan tumpang tindih kewenangan antar pihak.

Berdasar data peneliti, Komunikasi yang dibangun oleh pihak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, TFL, pihak kelurahan dan pihak penerima bantuan sudah baik. Kejelasan dalam mengarahkan maksud, tujuan, dan prosedur dari program bedah rumah mampu memperlancar jalannya program tersebut tanpa adanya kesalahpahaman maupun miskomunikasi. Adanya, kepercayaan satu sama lain, sangat membantu keberhasilan implementasi program bedah rumah ini. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.

## 6) Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi suatu program adalah sejauh mana kondisi eksternal mendorong keberhasilan suatu. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi program. Karena itu, upaya implementasi program mensyaratkan kondisi eksternal yang kondusif. Lingkungan sosial yang mendukung serta respon juga mampu memberikan efek yang baik dalam pelaksanaan sebuah program. Dalam program bedah rumah di Kabupaten Mojokerto ini memiliki lingkungan sosial yang mendukung adanya program tersebut. Hal ini dibuktikan pada proses pelaksanaan masyarakat sekitar yang mau membantu para penerima bantuan baik berupa tenaga maupun materi. Sehingga program bedah rumah dapat dilaksanakan dengan lancar. Selain lingkungan sosial, lingkungan ekonomi juga dapat mempengaruhi suatu program. Pada program bedah rumah ini, lingkungan ekonomi cukup berdampak pada penerima bantuan, yakni dengan adanya bantuan stimulan dari pemerintah, dana yang awalnya mereka gunakan untuk memperbaiki rumah, dapat penerima bantuan gunakan untuk kebutuhan primer lainnya, ataupun dapat disimpan guna keperluan mendesak. Selain dari lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi, keberhasilan implementasi program juga dapat dipengaruhi dari

lingkungan politik yang dirasakan saat peneliti turun ke lapangan, yakni beberapa Perangkat Desa mengajukan kerabatnya atau orang-orang terdekatnya terlebih dahulu untuk mendapatkan bantuan program bedah rumah, namun terkadang yang diajukan atau yang direkomendasikan kurang sesuai dengan syarat-syarat penerima bantuan. Dengan adanya dukungan dari lingkungan ekonomi, sosial dan politik dalam pelaksanaan dan keberhasilan kebijakan diharapkan akan mencapai tujuan yang diinginkan.

## **2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Program Bedah Rumah**

Implementasi merupakan pemahaman secara nyata setelah suatu program dirumuskan atau direncanakan, yang menjadi fokus perhatian dari implementasi adalah kejadian-kejadian yang terjadi setelah disahkannya pedoman kebijaksanaan, mencakup proses administrasi, dampak yang ditimbulkan dari sebuah program, ataupun pengaruh yang menyebabkan program tersebut terjadi. Dalam implementasi sebuah program pastinya memiliki faktor pendukung maupun faktor penghambat, yang dapat mempengaruhi program tersebut bisa dikatakan berhasil dan berjalan baik di masyarakat atau tidak. Begitu juga, dalam pelaksanaan program bedah rumah ini, yang dipengaruhi oleh faktor pendukung maupun faktor eksternal program bedah rumah. Berikut, faktor pendukung dan faktor eksternal dalam program bedah rumah :

#### a) **Faktor Pendukung Implementasi Program Bedah Rumah**

Setiap pelaksanaan kebijakan, program ataupun kegiatan tidak dapat dipungkiri terdapat faktor pendukung yang menyebabkan kebijakan, program, ataupun kegiatan tersebut berjalan lancar, dan berhasil. Jika, semakin banyak faktor-faktor pendukung dalam suatu program, bukan tidak mungkin program tersebut berhasil sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Faktor pendukung implementasi program bedah rumah ini pun, dipengaruhi oleh faktor pendukung internal maupun eksternal.

Berdasarkan hasil penelitian , faktor pendukung bedah rumah dipengaruhi oleh pihak internal maupun eksternal. Pertama, yaitu faktor pendukung internal Berdasar pada hasil wawancara pada hari senin, tanggal 30 April 2018, dengan narasumber Bapak Gatoet Soepriardi selaku Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan. Dapat dipahami bahwa, dukungan dari faktor internal dalam program bedah rumah ada 3 (tiga) yakni, Dasar pelaksanaannya jelas, yakni adanya Peraturan Menteri PUPR nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Peraturan Menteri PUPR nomor 21/PRT/M/2017 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Karena, dengan adanya kedua peraturan tersebut dapat memberikan pedoman, arahan dan acuan dalam pelaksanaan program bedah rumah,

dan bisa terhindar dari penyelewengan atau kesalahpahaman program. Selain itu, dukungan internal juga berasal dari Pemerintah daerah dan provinsi, baik dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, dan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dan Dari Pemerintah Provinsi, karena dalam melaksanakan tugas dan perannya masing-masing dilakukan dengan semangat dan mempunyai kredibilitas, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik, dan yang terakhir yakni adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Kepala dengan bawahannya.

Kedua, faktor pendukung eksternal, dalam penelitian ini, ada dua pihak yang mempengaruhi implementasi program bedah rumah yakni penerima bantuan atau masyarakat berpenghasilan rendah dan mitra kerja. faktor pendukung eksternal ada dari penerima bantuan, dan Mitra Kerja. Berikut faktor pendukung eksternal, yakni dari Penerima Bantuan atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Pertama, penerima bantuan sangat kooperatif atau mampu diajak bekerja sama, dengan sikap penerima bantuan yang terbuka dan mampu diajak bekerja sama, maka tidak menutup kemungkinan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh oenerima bantuan dapat dipahami oleh pemerintah sebagai pelaksana program, dengan begitu pelaksanaan program beda rumah ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian adanya sikap Penerima bantuan yang sangat aktif, dengan adanya sikap aktif ini, mempermudah pelaksanaan program selesai pada waktu yang telah ditentukan, dan sesuai dengan apa



yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian, adanya itikad baik dari penerima bantuan, dengan adanya itikad baik dari penerima bantuan dapat menimbulkan rasa saling percaya antara penerima bantuan dan pelaksana program. Dan yang terakhir, adanya lingkungan yang mendukung, faktor ini juga sangat penting, karena dengan adanya dukungan dari lingkungan atau orang terdekat penerima bantuan dapat membantu berjalannya program sesuai rencana, dan dapat menimbulkan sifat gotong royong dan saling empati di lingkungan penerima bantuan. Faktor pendukung eksternal pun dipengaruhi dari kooperatifnya mitra kerja, yang bekerja sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Komunikasi yang terjalin antara dinas, mitra kerja dan penerima bantuan pun terjalin sangat baik, dan adanya mitra kerja ini sangat membantu dinas sebagai pelaksana program. Karena, mitra kerja disini bertugas sebagai teknis lapangan, yang berhubungan dengan penerima bantuan. Dengan adanya mitra kerja ini, pelaksanaan program bedah rumah di lapangan benar-benar terkoordinir dan berjalan lancar.

#### **b) Faktor Penghambat Implementasi Program Bedah Rumah**

Proses pelaksanaan suatu program, tidak hanya terdapat faktor pendukung saja yang menyebabkan suatu program berjalan dengan lancar, namun ada juga faktor penghambat atau kendala atau masalah yang terjadi saat pelaksanaan program berlangsung. Sama halnya, dengan faktor pendukung yang dipengaruhi oleh dua ruang lingkup yakni

internal dan eksternal. Faktor penghambat pun dipengaruhi oleh ruang lingkup internal dan eksternal.

Berdasarkan hasil penelitian. Faktor penghambat pelaksanaan program bedah rumah dipengaruhi oleh pihak internal maupun eksternal. Pertama, yaitu faktor penghambat internal Berdasar pada hasil wawancara pada hari rabu, tanggal 25 April 2018, dengan narasumber Bapak Adi Mahendarto selaku Kepala Seksi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, yaitu masih minimnya atau terbatasnya Sumber Daya Manusia pada Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum. Dikarenakan, pada bidang ini, tidak ditemukan staff, kecuali pada Seksi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum, namun hanya 1 (satu) staff saja. Hal ini dibuktikan pada struktur Organisasi Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum itu sendiri, sehingga semua sosialisasi desa ke setiap kecamatan dikerjakan sendiri oleh Bapak Adi Mahendarto.

Kedua, faktor penghambat eksternal, dalam penelitian ini, ada dua pihak yang mempengaruhi implementasi program bedah rumah yakni penerima bantuan atau masyarakat berpenghasilan rendah dan mitra kerja. Pertama, Faktor penghambat eksternal dari penerima bantuan. Pertama, Keluarga/lingkungan tidak mendukung. Jika tidak adanya dukungan dari lingkungan atau kerabat terdekat akan memberatkan penerima bantuan dalam menjalankan program bedah rumah. Dukungan lingkungan atau kerabat terdekat dapat berupa uang, atau bantuan tenaga

kerja (tukang) dalam proses perbaikan rumah penerima bantuan, jika itu semua tidak ada akan menghambat proses perbaikan penerima bantuan, karena sejatinya manusia tidak dapat melakukan pekerjaannya sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Selanjutnya, penerima tidak mampu berswadaya, dikarenakan kondisi satu dan lain hal. Ketidakmampuan penerima bantuan berswadaya, juga dapat menghambat program ini, karena penerima bantuan tidak mampu memenuhi salah satu syarat yang diajukan dalam program bedah rumah. Di dalam temuan lapangan, kasus seperti ini sering terjadi pada calon penerima bantuan yang sudah berumur tua dan tinggal sebatang kara, karena memang untuk kebutuhan primer lainnya, mereka juga mengalami kekurangan. Kemudian, adanya Apriori pihak lain. Apriori dalam penelitian ini, yaitu berprasangka atau *underestimate* dari pihak lain. Sikap ini yang menghambat kelancaran program karena penerima bantuan ragu-ragu dalam menjalankan program ini, dan akan berdampak pada pelaksanaan yang tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati, perilaku penerima bantuan pun menjadi kurang kooperatif. Selanjutnya, Penerima Bantuan berubah pikiran dari yang semula bersedia menjadi tidak bersedia, selanjutnya keinginan penerima bantuan yang berubah-ubah, sikap ini juga sangat menghambat proses pelaksanaan program bedah rumah, karena keinginan atau ketidak konsistenan kebutuhan yang dibutuhkan oleh penerima bantuan, membuat program menjadi tidak kondusif atau tidak berjalan secara lancar. Kemudian, adanya takhayul atau

kepercayaan “hari baik” dalam melaksanakan program bedah rumah ini, yang pada akhirnya pelaksanaan pembangunan tidak sesuai waktu yang direncanakan/ditetapkan.

Selain faktor penghambat dari penerima bantuan, terdapat faktor penghambat yang dirasakan dari mitra kerja, yakni Data pendukung di lapangan tidak sesuai, dalam temuan lapangan, faktor penghambat ini sering terjadi. Data calon penerima bantuan yang dibawa TFL sebagai acuan untuk verifikasi lapangan, sering tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi, setiap melakukan verifikasi lapangan, TFL membawa dua data, yakni data dari dinas dan data dari desa. Kemudian, Kurangnya dukungan Perangkat Desa, karena dukungan dari perangkat desa ibarat restu pelaksana program kepada penerima bantuan, jika tidak adanya dukungan dari perangkat desa, tim TFL, maupun dinas cukup kesusahan dalam mendata dan melakukan verifikasi lapangan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

##### 1. Implementasi Program Bedah Rumah dalam Mewujudkan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mojokerto

###### a) Program Bedah Rumah Tidak layak Huni

Program Bedah Rumah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto. Program bedah rumah ini, dibagi menjadi dua kegiatan, Yakni Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Program ini bertujuan membangun rumah-rumah atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pembugaran/ perluasan. Maksud dari program bedah rumah ini adalah untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah membangun sendiri rumah yang layak huni, sehat dan aman. Tujuannya ialah terbangunnya rumah yang layak huni, sehat dan aman. Dana untuk program ini berasal dari dana APBN.

Pelaksanaan program bedah rumah ini ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Selain masyarakat berpenghasilan rendah terdapat kriteria-kriteria lainnya yang antara lain yaitu penerima bantuan memiliki KTP, berpenghasilan dibawah UMR, tanah yang ditempati adalah tanah milik sendiri

serta mampu bekerja sama. Kerja sama dalam pelaksanaan program ini sangat diperlukan khususnya untuk kelompok sasaran. Setiap penerima bantuan akan dibagi menjadi beberapa kelompok dengan anggota sebanyak 10 orang. Dalam kelompok tersebut akan dipilih seorang ketua, sekretaris dan bendahara. Dibentuknya kelompok-kelompok ini untuk mengkondisikan proses pelaksanaan program bedah rumah dengan baik.

Jika ditarik kesimpulan maka Program Bedah rumah memberikan perubahan dan dampak yang baik. Program BPS dan DAK meningkatkan kualitas tempat tinggal warga dan meningkatkan kesejahteraan. Meski demikian, masih ada saja masyarakat yang mengeluh mengenai dana bantuan yang mereka terima. Mereka merasa keberatan dengan jumlah dana yang mereka anggap sedikit. Dapat dikatakan program bedah rumah ini sangat efektif untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Mojokerto.

**b) Implementasi Program Bedah Rumah dalam Mewujudkan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mojokerto**

**1. Standar dan tujuan kebijakan/program**

Sasaran, standar dan tujuan sebuah program harus jelas agar program tersebut tepat sasaran. Program Bedah Rumah memiliki tujuan, standar dan sasaran yang jelas. Tujuan dari program bedah rumah ini ada untuk mendorong masyarakat



berpenghasilan rendah membangun sendiri rumah mereka menjadi rumah yang layak huni dengan dana yang telah diberikan oleh pemerintah. Sedangkan sasaran dari program ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni. Dasar pelaksanaan atau standar Program Bedah Rumah ada dua yakni Peraturan Menteri PUPR nomor 13 tentang BSPS dan nomor 21 tentang Petunjuk Operasional DAK

## **2. Sumber Daya**

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi program, karena bagaimanapun jelas konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggungjawab mengimplementasikan program kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi program tersebut tidak akan bisa efektif. Pelaksanaan program Bedah rumah di Kabupaten Mojokerto berupa sumber daya manusia yakni staff Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto, Perangkat Desa, TFL, Mitra dan masyarakat sekitar baik masyarakat dari kelompok sasaran maupun masyarakat umum. Sedangkan sumber daya materi atau anggaran atau dana yakni dana program berasal dari dana APBN.

## **3. Karakteristik organisasi pelaksana**

Birokrasi/organisasi sebagai pelaksana sebuah program harus dapat mendukung program yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik. Pada program beda rumah ini, ciri-ciri atau kualitas atau spesifikasi di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, yang memang tugas pokok dan fungsinya di bidang pembangunan perumahan dan permukiman, sedangkan Pihak Luar yakni TFL, yang sudah melalui seleksi sehingga diperoleh orang-orang terbaik yang memang sudah paham sekali dengan program bedah rumah ini, sedangkan untuk mitra, memang sudah terpilih pihak-pihak yang sudah kompeten di bidangnya dan mampu diajak bekerjasama dengan baik, dan perangkat desa sendiri, pastinya sudah sangat tahu dengan tugas pokok dan fungsinya, selain itu adanya peran perangkat desa, sangat membantu keberhasilan implementasi program bedah rumah ini, karena perangkat desa yang paham betul bagaimana kondisi-kondisi warganya, sehingga dapat melakukan rekomendasi untuk calon penerima bantuan program bedah rumah

#### **4. Sikap Para Pelaksana**

Sikap Para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk

mengimplementasikan program tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan program tersebut, jika ingin program yang direncanakan atau dijalankannya berjalan secara efektif dan efisien. Sikap yang ditunjukkan oleh pihak pelaksana program bedah rumah di Kabupaten Mojokerto sudah baik. Mereka menunjukkan sikap yang membaur dengan masyarakat sehingga mendapatkan respon yang baik pula dan rasa dihargai dari masyarakat. Selain itu pihak pelaksana program bedah rumah mampu mengimplementasikan program dengan baik dan sangat bertanggung jawab atas tugas yang diembannya.

## **5. Komunikasi**

Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan melibatkan unsur manusia dan sumber daya yang akan selalu berurusan. Komunikasi yang dibangun oleh pihak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Tenaga Fasilitator Lapangan, perangkat desa, pihak kecamatan dan pihak penerima bantuan sudah baik. Kejelasan dalam mengarahkan maksud dan prosedur dari program bedah rumah mampu memperlancar jalannya program tersebut tanpa adanya kesalahpahaman maupun miskomunikasi. Penyaluran

komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.

#### **6. Lingkungan Sosial, ekonomi dan politik**

Lingkungan sosial yang mendukung serta respon juga mampu memberikan efek yang baik dalam pelaksanaan sebuah program. Dalam program Bedah Rumah di Kabupaten Mojokerto ini memiliki lingkungan sosial yang mendukung adanya program tersebut. Hal ini dibuktikan pada proses pelaksanaan masyarakat sekitar membantu para penerima bantuan baik berupa tenaga maupun materi. Sehingga program bedah rumah dapat dilaksanakan dengan lancar, selain itu dilihat dari lingkungan ekonomi, adanya program bedah rumah cukup berdampak bagi penerima bantuan, karena uang yang mereka sisihkan untuk pembangunan dapat digunakan untuk kebutuhan primer lainnya, dan lingkungan politik beberapa dimanfaatkan perangkat desa untuk memasukkan kerabat dekatnya kedalam daftar calon penerima bantuan, selain itu, adanya sikap yang baik yang ditunjukkan oleh pemangku kepentingan, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto.

## **2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Program Bedah Rumah**

Setiap pelaksanaan program tentu dipengaruhi oleh berbagai macam hal, pun dalam program bedah rumah. Pengaruh atau faktor-faktor dapat menjadikan suatu program terealisasi atau terlaksana dengan baik atau justru sebaliknya. Pengaruh atau faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua jenis, yakni faktor pendukung dan faktor penghambat

### **a) Faktor Pendukung Implementasi Program Bedah Rumah**

#### **1. Faktor Pendukung Internal**

- Adanya Dasar Pelaksanaan yang jelas yakni Peraturan Menteri PUPR tentang DAK dan BSPS
- Dukungan dari Dinas, Pemerintah Kabupaten dan Provinsi Jawa Timur
- Komunikasi yang baik antara pemimpin dan bawahan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan.

#### **2. Faktor Pendukung Eksternal**

Penerima Bantuan :

- Masyarakat Berpenghasilan Rendah, atau Masyarakat Miskin
- Penerima bantuan sangat kooperatif atau mampu diajak bekerja sama dalam pelaksanaan program bedah rumah;

- Penerima bantuan sangat aktif, dalam menyusun laporan pertanggungjawaban maupun bertanya saat tidak ada yang dimengerti;
- Penerima bantuan memiliki itikad baik dan jujur kepada Pemerintah, atas bantuan yang diberikan;
- Lingkungan mendukung, dengan memberi bantuan tenaga maupun dana kepada penerima bantuan.

Mitra Kerja :

- Mitra Kerja sangat Kooperatif dan bekerja sesuai tugas masing-masing
- Komunikasi yang terjalin antara Dinas dengan Mitra Kerja baik dan lancar
- Mitra Kerja sangat membantu program bedah rumah berjalan dengan lancar.

## **b) Faktor Penghambat Implementasi Program Bedah Rumah**

### **1. Faktor Penghambat Internal**

- Minimnya Sumber Daya Manusia pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan.

### **2. Faktor Penghambat Eksternal**

Penerima Bantuan :



- Keluarga/lingkungan tidak mendukung dalam program bedah rumah, tidak adanya bantuan dalam hal materi, material ataupun tenaga
- Tidak mampu berswadaya, yakni menyanggupi dana, material. Atau pun tenaga
- Apriori pihak lain, atau memandang sebelah mata terhadap program bedah rumah, dan secara tidak langsung mempengaruhi pikiran penerima bantuan
- Penerima Bantuan berubah pikiran dari yang semula bersedia menjadi tidak bersedia
- Melaksanakan pembangunan tidak sesuai waktu yang direncanakan/ditetapkan, karena masyarakat percaya tahayul.

#### Mitra Kerja

- Data pendukung di lapangan tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan
- Kurangnya dukungan Perangkat Desa, disebabkan kesibukan agenda perangkat desa ataupun kegiatan desa lainnya.

## B. SARAN

Kebijakan atau program yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu saja memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri. Oleh karena itu diperlukan adanya saran untuk memperbaiki kualitas program yang sedang berjalan

maupun yang akan datang. Begitu juga halnya dengan Program Bedah Rumah pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut ini adalah saran untuk Program Bedah Rumah:

1. Berdasarkan keterangan-keterangan yang diperoleh selama penelitian ini berlangsung, besarnya dana bantuan menjadi beban tersendiri bagi beberapa penerima bantuan, sehingga perlu mempertimbangkan jumlah dana yang akan dibagikan apakah mampu untuk mencukupi kebutuhan perbaikan/ pembangunan rumah atau tidak.
2. Perlu adanya pembaharuan data calon penerima bantuan, karena sering beberapa kali terjadi, TFL kebingungan dalam mencari data penerima bantuan, karena data tidak sesuai atau karena rumah calon penerima bantuan kondisinya sudah diperbaiki.
3. Perlu adanya penjelasan ataupun pemahaman yang dilakukan pemerintah ataupun perangkat desa kepada masyarakat umum, sehingga tergerak nuraninya untuk membantu tetangga maupun keluarga dekatnya yang berpenghasilan rendah, guna mewujudkan rumah layak huni, dan meminimalisasi anggapan miring yang diajukan masyarakat terhadap pemerintah maupun penerima bantuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agostiono.2010.*Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*. Jakarta:Rajawali Press.
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan.2008.*Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*.Jurnal Baca, Volume 1,hlm 1.Universitas Pepabari.Makassar
- Aminudin.2007.*Peran Rumah dalam Kehidupan Manusia*.Semarang: Kanisius.
- Arenawati, 2014.*Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah Konsep dan Pelaksanaan di Indonesia*.Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Azka,Kun.2015.*Implementasi Workshop Pemberdayaan Bagi Pengawas Sekolah SMA/SMK se-DIY*.Laporan PPL. Prodi Kebijakan Pendidikan. Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta.Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik.2017. *Angka Kemiskinan Jawa Timur*. Diakses pada tanggal 10 Januari 2018 dari ([www.jatim.bps.go.id](http://www.jatim.bps.go.id))
- 2017. *Angka Kemiskinan di Indonesia*. Diakses pada tanggal 10 Januari 2018 dari ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))
- 2017.*PDRB Seri 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) Harga Berlaku*.Diakses pada tanggal 12 Mei 2018 dari ([www.mojokertokab.go.id](http://www.mojokertokab.go.id))
- 2017.*PDRB Seri 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) Harga Konstan*. Diakses pada tanggal 12 Mei 2018 dari ([www.mojokertokab.go.id](http://www.mojokertokab.go.id))

- Badrudin, Rudy. 2010. *Rasio Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Pasca Otonomi Daerah. Jurnal Akuntansi & Manajemen*, Vol. 21. No. 3, Desember 2010: 243-263.
- Bratakusumah, Deddy S dan Dadang Solihin, 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budihardjo, Eko. 1998. *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*. Bandung : Alumni.
- Desiana, Ika. 2016. *Kemampuan Masyarakat Miskin Memenuhi Persyaratan Bantuan Stimulan Bedah Rumah (Studi Kasus di Desa Labuhan Makmu, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji)*. Skripsi. Sosiologi. FISIP. Universitas Lampung. Lampung.
- Eni, Michael Chikadibia. 2015. *Establishment of Strategies for Improving Affordable and Habitable Public Housing Provision in Anambra State, Nigeria*. British Journal of Environmental Sciences. Vol.3, No.1, pp.23-42, March 2015. European Centre for Research Training and Development UK. (Diakses pada tanggal 20 April 2018, pukul 20.15 WIB dari (<http://ejournals.org>))
- Erwandi, Antonius. 2017. *Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni*. jurnal. FISIP. Universitas Kapuas. (Diakses pada tanggal 15 April 2018, pukul 12.00 WIB dari (<http://jurnal.unka.ac.id/fisip>))
- HAW. Widjaja, 2013, “*Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*”, Jakarta: Raja grafindo Persada.

Hoesin,Haslizen.2013. *Rumah yang Layak, Sehat dan Hemat Energi, Rumah Apa Ituuuu .....?*. (Diakses pada tanggal 15 April 2018, pukul 05.45 WIB dari <https://lizenhs.wordpress.com>))

Jimenez,Emmanuel.1983.*The Magnitude and Determinants of Home Improvements in Self-Help Housing: Manila's Tondo Project*. University of Wisconsin Press. Vol. 59, No. 1 (Feb., 1983), pp. 70-83. (Diakses pada tanggal 20 April 2018, pukul 23.03 WIB dari <http://jstor.org/stable/3145877>).

Jundi, Al Musa.2014.*Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi-Provinsi di Indonesia*.Skripsi.Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.FEB.Universitas Diponegoro.Semarang

Kembara, Susanto Benni.2010.*Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Bidang Agribisnis Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sipogu*.Skripsi.Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial.Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik.Universitas Sumatera Utara.Medan

Laporan Akhir Updating Program Bedah Rumah DPRKPP 2017

Lexy, J.Moleong, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Rev.ed.* Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

Mailasari,Nuraida.2017. *Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2016 (Studi Kasus Kota Pekanbaru)*. JOM FISIP. Volume 4 nomor 2.

- Maruli,Sahat.2011.*Analisis Determinan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara*.Tesis.Universitas Sumatera Utara.Medan (diakses pada tanggal 19 April 2018 dari (<http://repository.usu.ac.id>))
- Nugraha,Jaya Wahyu.2015.*Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Bedah Rumah Gerakan Gotong Royong Rakyat Bersatu (GENTONG REMBES) di Kabupaten Kulonprogo tahun 2013-2014*.  
<http://repository.umi.ac.id/handle/123456789>. Skripsi.Studi Ilmu Pemerintahan.FISIP.Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.Yogyakarta
- Nurcholis, Hanif. 2005.*Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta:Grafindo.
- Pasolong, Harbani.2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Praditia, Syam Dwi Diva.2017.*Evaluasi Dampak Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Melalui Pola Bedah Kampung di Kota Payahkumbuh Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013*.Skripsi.Program Studi Kesejahteraan Sosial.Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.Jakarta
- Prayogi, Arie.2011.*Implementasi Kebijakan Program Bedah Rumah “ (Studi penelitian tentang Bedah Rumah oleh Badan Pemberdayaan masyarakat di Desa Kedawung, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo*.Ilmu Pemerintahan.FISIP.Universitas Muhammadiyah Malang.Malang



Pemerintah Kabupaten Mojokerto.2018.*Kondisi Geografis dan Iklim Kabupaten Mojokerto*.Diakses pada tanggal 13 Mei 2018 dari [\(<http://mojokertokab.go.id/geografi>\)](http://mojokertokab.go.id/geografi)

-----2018.*Visi Misi Kabupaten Mojokerto*.Diakses pada tanggal 13 Mei 2018 dari (<http://mojokertokab.go.id/visimisi>)

-----2017. Rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2017. Diakses pada tanggal 18 April 2018 dari (<http://mojokertokab.go.id/produkhukum>)

Peraturan Bupati no 60 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat no 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Diakses pada tanggal 18 April 2018 dari (<http://pupr.go.id>)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat no 21/PRT/M/2017 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Diakses pada tanggal 30 April 2018 dari (<http://pupr.go.id>)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat no 03/PRT/M/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat no 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana,Sarana, dan Utilitas

Umum untuk Perumahan Umum. (Diakses pada tanggal 18 April 2018 dari <http://pupr.go.id>)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Diakses pada tanggal 30 Maret 2018 dari [www.hukumonline.com/pusatdata](http://www.hukumonline.com/pusatdata))

Qomaria, Afifa.2015. *Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Meri Kota Mojokerto*.Kebijakan dan Manajemen Publik.volume 3 nomor 1. ISSN 2303 - 341X

Republik Indonesia.2011.Undang-Undang no 13 tahun 2011 tentang Penanganan Faktor Miskin.Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia.2014.Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia.2018.Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1.Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia.2018.Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34.Sekretariat Negara. Jakarta

Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, Chicago-Illionis : the Dorsey Press.

Salam, Dharma Setyawan.2004.*Manajemen Pemerintahan Indonesia*.Jakarta: Djambatan

- Sarimah.2016.*Pelaksanaan Pembangunan Dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2014*.Skripsi.Program Studi Ilmu Pemerintah.FISIP.Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjung Pinang
- Sarosa,Samiaji.2012.*Penelitian Kualitatif dasar-dasar*.Jakarta:PT Indeks
- Siagian, Sondang P.1979. *Administrasi pembangunan Konsep, Dimensi dan Strateginya*.Jakarta: Gunung Agung.
- Sianturi, Tua Maruli Sahat.2011.*Analisis Determinan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara*.Tesis.Sekolah Pasca Sarjana.Universitas Sumatera Utara.Medan
- Sugiyono.2016.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Rev.ed.* Bandung:Alfabeta.
- Suryono, Agus.2010.*Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang:UB Press.
- Sumarto dan Hetifah .2003.*Inovasi, Partisipasi dan Good Governance 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Sunarno, Siswanto. 2008.*Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryamin.2015.*Indeks Pembangunan Manusia 2014 Metode Baru*. Jakarta:Badan Pusat Statistik.
- Suryana, Siti Erna Latifi, 2009. *Implementasi Kebijakan Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang*. Tesis.Program magister

Studi Pembangunan.Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.Medan

Sedarmayanti, 2004. *Good Governance (Tata Pemerintahan Yang Baik)*.Bandung: Mandar Maju.

Setiawan, Guntur. 2004.*Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta:Balai Pustaka.

Syarief,Zulfi. 2000.*Kebijakan Pemerintah di Bidang Perumahan dan Permukiman bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah*.Medan: USU Press.

Theresia, Febrina.2014.*Implementasi Program Binjai Smart Cyber City*. (Diakses pada tanggal 14 April 2018, pukul 15.10 WIB dari (<https://ipdn.academia.edu/febrinatheresia>))

Tjokroamidjojo,Bintoro.1976. *Pengantar Administrasi Pembangunan*.Jakarta: LP3ES

Tutik,Titik Triwulan, dan Idri. 2008.*Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta:Prestasi Pustaka.

Ukoje, E.J, Kanu.U.K.2014.*Implementation and The Challenges of the Mass Housing Scheme in Abuja, Nigeria*. American International Journal of Contemporary Research. Vol. 4, No. 4; April 2014.(Diakses pada tanggal 20 April 2018, pukul 21.00 WIB dari ([www.aijcnrnet.com](http://www.aijcnrnet.com)))

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*.Jakarta: Grasindo,

Wahab, Solichin A.2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta:Bumi Aksara

Wibisono, Yusuf.2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing

Yuwono, Teguh, 2001.*Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*. Semarang: Clogapps Diponegoro University.



## LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN



Wawancara dengan Bapak Gatot Soepriardi,  
Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas  
Umum



Wawancara dengan Bapak Adi Mahendarto,  
Kepala Seksi Prasarana Sarana dan Utilitas  
Umum



Wawancara dengan Bapak Dody , Kepala  
Seksi Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah



## DOKUMENTASI SOSIALISASI DESA



Sosialisasi Desa di Desa Kemantren  
Kecamatan Gedeg, tanggal 21 April 2018



Sosialisasi Desa di Desa Watonmas Jedong,  
Kecamatan Ngoro, tanggal 25 April 2018

## DOKUMENTASI VERIFIKASI LAPANGAN



Saat Verifikasi Lapangan di Desa Kematren,  
Kecamatan Gedeg



Saat Verifikasi Lapangan di Desa Kematren,  
Kecamatan Gedeg



Saat Verifikasi Lapangan di Desa Kematren,  
Kecamatan Gedeg



Saat Verifikasi Lapangan di Desa Kematren,  
Kecamatan Gedeg



Saat Verifikasi Lapangan di Desa  
Balongmojo, Kecamatan Puri

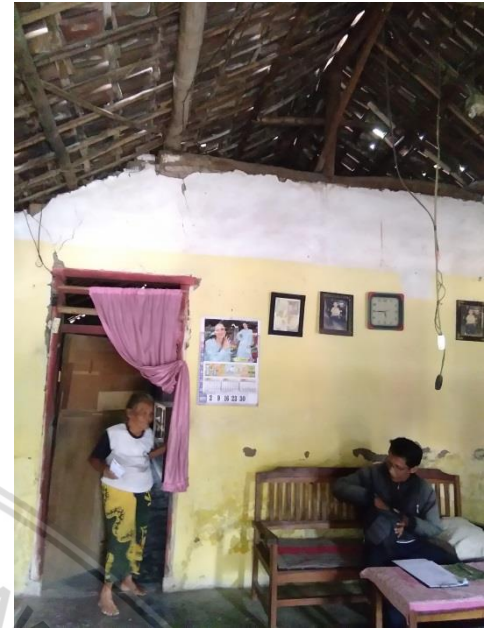


Saat Verifikasi Lapangan di Desa  
Balongmojo, Kecamatan Puri





Saat Verifikasi Lapangan di Desa  
Balongmojo, Kecamatan Puri  
(wawancara dengan Ibu Laila)



Saat Verifikasi Lapangan di Desa  
Balongmojo, Kecamatan Puri (wawancara  
dengan Mbah Sripah)



## PEDOMAN WAWANCARA

### **Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto**

1. Apa yang melatarbelakangi Program Bedah rumah?
2. Apa Dasar Pelaksanaan bantuan program bedah rumah?
3. Apa metode/indikator yang digunakan oleh DPRKP2 Kabupaten Mojokerto dalam menentukan rumah yang tidak layak huni?
4. Bagaimana proses program bedah rumah dari awal menentukan penerima bantuan hingga program terealisasi?
5. Apa sajakah syarat-syarat penerima bantuan program bedah rumah?
6. Apakah dalam program bedah rumah ini, DPRKP2 melibatkan instansi,dinas lain atau pihak lain?
7. Apakah dengan adanya program bedah rumah ini permasalahan di masyarakat dapat teratasi?
8. Apa kendala yang dialami selama pelaksanaan program bedah rumah ini berlangsung?
9. Apa peluang atau pendukung dari program bedah rumah ini, yang membuat program berjalan lancar?
10. Berapa dana yang dikeluarkan untuk program bedah rumah?

### **Calon Penerima Bantuan**

1. Apa Tanggapan bapak/ibu dengan adanya progam bedah rumah saat ini?
2. Apa Harapan Bapak/Ibu untuk program bedah rumah ini ?

**TRANSKRIP WAWANCARA**  
**CALON PENERIMA BANTUAN PROGRAM BEDAH RUMAH**

**1. Kecamatan Bangsal**

No	Nama CPB	Apa Tanggapan bapak/Ibu dengan adanya program bedah rumah saat ini?
1	Bapak Sunoto	Tanggapannya ya, program bedah rumah ini bagus mba, bisa membantu orang ga punya kayak saya gini
2	Mbah Mistari	Njijh, alhamdulillah programipun ngeringanaken bebanipun tiyang alit
3	Mbah Nuriyati	Sae bantuanipun mba
4	Bapak Buadi	Yo apik program bantuan iki mba, pro lan isok ngewangi ringanake beban e wong cilik, wong gaduwe
5	Bapak Saikan	Tanggapanane, seneng mba onok program ngene tekan pemerintah. seenggak e isok ngewangi wong gaduwe
6	Mbah Maslukhah	Nggih alhamdulillah wonten nopo asmine wau, program ngenten nduk
7	Ibu Jani	Programnya bagus mba, membantu masyarakat yg memang rumahnya ndak layak, dan ingin renovasi tapi ndak ada duit
8	Bapak Sujak	Seneng kulo mba wonten bantuan ngenten-ngenten niki
9	Ibu Jin Jumainah	Bagus mba, tapi niki bantuan e mboten berupa nyotro mawon ta, nggih sing dibutuhkan nyotro
10	Bapak Abdul Hamid	Nggehe niki bantuan e apik mba, keroso nang wong raduwe koyok aku

No	Nama CPB	Apa Harapan Bapak/Ibu untuk program bedah rumah ini ?
1	Bapak Sunoto	Wah kalau ditanya harapan, ya kalo saya berharap dapet mba, apalagi saya memang tidak ada uang lebih untuk merenovasi rumah.
2	Mbah Mistari	Njijh mugi-mugi, kulo ingkang katah nduk, mbah mpun sepuh, nggehe mboten wonten tenaga kalian arta, njijh mugi-mugi mawon rejeki nggehe nduk
3	Mbah Nuriyati	Harapanipun Nggehe sangeet berharap mba, tapi nggehe rezeki gusti Allah ingkang ngatur
4	Bapak Buadi	Nek ditakoni harapan iki, yo berharap awakdewe entok jatah program mba, program e tahun

		sisuk onok maneh
5	Bapak Saikan	Yo mesti toh mbak, tapi yo mugo-mugo ae entuk jatah program mba, soale pengen ndandani pawon, karo jendelo iku, pingin diganti kusen e
6	Mbah Maslulkah	Nggih harapan e mbah nggih mugi-mugi rezeki ingkang Allah nduk. Kulo nggih urip piyambak mboten wonten ingkang ngrasi.
7	Ibu Jani	Harapanya untuk program ini ya semoga dilanjutkan tahun depan juga mba, dan kuota penerimaanya ditambah
8	Bapak Sujak	Nggih mugi-mugi bantuan e ditambah niku penerima ne
9	Ibu Iin Jumainah	Harapane nggih nyotro e ditambah, nggeh nek saget dalam bentuk yotro mawong ngonten
10	Bapak Abdul Hamid	Harapane nggeh mugo-mugo dapet mbak, pun suwe mboten kantok bantuan tekan pemerintah, nggeh terakhir niku plesterisasi niku.

## 2. Kecamatan Gedeg

No	Nama CPB	Apa Tanggapan bapak/ibu dengan adanya program bedah rumah saat ini?
1	Bapak Sugeng	Seneng onok program bedah rumah isok bantu bangun omah e wong-wong raduwe mbak
2	Bapak Sutrisno	Apik, lanjutkan!!
3	Mbah Sripah	Nggeh alhamdulillah wonten bantuan nggenten ndugi pemerintah
4	Mbah Nari	Bantuanipun sae banget, saget bantu tiyang alit
5	Bapak Seger	Seneng, mendukung aku mbak onok program bantuan iki soale bantuan iki bener-bener bantu wong cilik mbak, yo yooopo mbak, masalah e mangan ae angel, ndadak bangun omah sing ngen perlu direnovasi
6	Mbah Kasminten	Sangat bersyukur ingkang Gusti Allah wonten bantuan nggenten. Matursembanuun ingkang katah nggeh, dateng pemerintah
7	Ibu Sapuah	Mantap wesan, biso bantu warga gawe bangun omah seng layak
8	Ibu Runti	Seneng kulo mba wonten bantuan nggenten-nggenten niki
9	Ibu Surwati	Programe apik semugo isok meringankan beban wong cilik gawe bangun omah



10	Bapak Hindun	Program e bagus tak dukung terus, benar-benar dibutuhkan wong gaduwe mbak
----	--------------	---

No	Nama CPB	Apa Harapan Bapak/Ibu untuk program bedah rumah ini ?
1	Bapak Sugeng	Program e lanjut terus, lancar kabeh. Aamiin
2	Bapak Sutrisno	Harapane program e tiap taun onok
3	Mbah Sripah	Nggeh mbah nyuwun panyugih, nggeh mugu-mugi rezekine, wangsul programipun. Niki griyane mbah nggeh ngonten niki, dinding e tasik gedek, niki alas e tasik tanah mbak. Nggeh bismillah
4	Mbah Nari	Harapanipun nggeh mugu-mugi programe niki tiap taun wonten maleh, semugi kulo saget katah bedah rumah.
5	Bapak Seger	Harapan e panitia program bedah rumah sehat terus, program e makin gede dan aku entok bedah rumah
6	Mbah Kasminten	Semugi griyo kulo saget kantok bedah rumah
7	Ibu Sapuah	Semoga program e lanjut terus tiap taun, mugu-mugi dalemku kantok bedah rumah
8	Ibu Runti	Harapanipun kulo isok kantok bantuan niki entah tahun sakniki nopo taun ngajeng
9	Ibu Surwati	Harapan e mugu kulo kantok program bedah rumah niki, dan program e dilanjut tahun ngarep
10	Bapak Hindun	Yo semoga aku lolos seleksi bedah rumah

### 3. Kecamatan Mojoanyar

No	Nama CPB	Apa Tanggapan bapak/ibu dengan adanya program bedah rumah saat ini?
1	Ibu Tyas	Programnya bagus mbak, dapat membantu warga yang memang membutuhkan. Apalagi ada survey lapangan gini, insya Allah penerimanya tepat sasaran
2	Bapak Imron Rosyadi	Program e apik, tak dukung terus, mugu akeh manfaat e
3	Mbah Pati'ah	Apik wesan warga sangat terbantu dengan program iki
4	Ibu Jamina	Program sudah baik, tapi alangkah lebih baik uang bantuannya ditambah lagi

5	Bapak Asik Wibowo	Alhamdulillah program nya sangat positif sekali, mas-masnya juga ramah, profesional
6	Bapak Waris	Program e wes apik perlu di tingkatkan karo perlu di sosialisasikan maneh nang warga
7	Ibu Mamik Atusya 'iah	Program e apik isok bantu wong gak mampu lan omah e gak layak di huni
8	Bapak Samsuri	Program e apik tapi kurang maksimal pengelolaan program e
9	Bapak Sukarto	Apik program e lanjutan mawon
10	Bapak Misdi	Nggehe mendukung mawon wonten bantuan bedah rumah niki.

No	Nama CPB	Apa Harapan Bapak/Ibu untuk program bedah rumah ini ?
1	Ibu Tyas	Semoga apanamanya bantuan ini, semakin diperbanyak lagi penerimanya, dan semoga juga dananya semakin besar atau ditambah lah, lak gitu a mbak
2	Bapak Imron Rosyadi	Harapan e program e onok terus, semoga aku entok bantuan pisan
3	Mbah Pati'ah	Mugi-mugi kulo kantok bantuan niki bedah rumah
4	Ibu Jamina	Ya harapannya semoga bisa mendapat bantuan itu mbak, lumayan buat renovasi sama ganti-ganti material lah.
5	Bapak Asik Wibowo	Semoga lancar kabeh, gak onok masalah
6	Bapak Waris	Dimaksimal no maneh program e, ojek sampek salah sasaran. Mugi" kulo kantok bedah rumah
7	Ibu Mamik Atusya 'iah	Semugi aku entok bantuan sakcepote, ben nek udan omahku gak bocor, plafon e wayah e ganti wes suwe soal e mbak, tapi gaduwe duit gawe ganti
8	Bapak Samsuri	Semoga tidak salah sasaran penerimane
9	Bapak Sukarto	Sukses sak teruse, lan dianacarke, pisan yo semoga aku isok entok bedah rumah
10	Bapak Misdi	semugi program e makin apik, lan kulo isok kantok bedah rumah.

#### 4. Kecamatan Ngoro

No	Nama CPB	Apa Tanggapan bapak/ibu dengan adanya program bedah rumah saat ini?
1	Bapak Joha	Tanggapan saya, program bedah rumah sangat membantu sekali mbak
2	Bapak Kasim	Programnya bagus, lanjutan!! Bermanfaat e gawe wong raduwe sing ancen omah e wes elek

		meh roboh mbak
3	Ibu Manis	Nggeheh membantu mbak, tapi nggeheh nek saget mentahan ae mbak
4	Bapak Sombro	Niki bantuane wes apik semoga penerimanya bener-bener sing membutuhkan
5	Bapak Maning	Program e membantu sekali, karena omah apik sangat membantu kesejahteraan keluarga
6	Ibu Sayuna	Adanya program ini sangat meringankan beban warga
7	Mbah Ngatawi	Nggeheh pun sae,
8	Bapak Siamin	Programnya bagus tapi seng nerimo bedah rumah kadang kurang tepat sasaran
9	Ibu Atiyah	Nggeheh kulo sanget bersyukur wonten bantuan niki, bermanfaat kalian ngertos nopo sing dibutuhkan tiyang alit
10	Bapak Lagi	Sangat bermanfaat karena isok gawe wong cilik wes duwe omah layak

<b>No</b>	<b>Nama CPB</b>	<b>Apa Harapan Bapak/Ibu untuk program bedah rumah ini ?</b>
1	Bapak Joha	Lanjutkaan, semoga tidak ada hambatan!!
2	Bapak Kasim	Semoga program nya lancar tanpa ada hambatan
3	Ibu Manis	Programnya jalan terus, makin gede dananya
4	Bapak Sombro	Lancar sak kabeh e, aku isok entok bedah rumah rumah
5	Bapak Maning	Berharap isok entok bedah rumah ben omah ku gak roboh, pingin dandani ket wingi-wingi mbak, tapi raono duit
6	Ibu Sayuna	Lancar programe, kulo saget kantik program bedah rumah
7	Mbah Ngatawi	Mugi-mugi nggeheh kulo kantik bedah rumah, nggeheh nyuwun panyugihne nggeheh nduk
8	Bapak Siamin	Lancar semuanya sukses terus programe, mugo-mugo entok mbak. Lumayan gawe bangun toilet
9	Ibu Atiyah	Mugi-mugi kulo lolos bedah rumah mbak, nyuwun doane sisan nggeheh
10	Bapak Lagi	Harapane isok entok bedah rumah ben rumah ku layak di panggoni



## 5. Kecamatan Puri

No	Nama CPB	Apa Tanggapan bapak/ibu dengan adanya program bedah rumah saat ini?
1	Ibu Laila	Wah mbak, alhamdulillah ada program bantuan-bantuan gini, yo maklum mbak, wong ndak punya, benerin rumah ae ndak bisa-bisa. Belum pernah dapet bantuan apa-apa mbak.
2	Bapak Bunaji	Salah satu program seng sangat bermanfaat.
3	Mbah Juwariyah	Nggeh, alhamdulillah nak, wonten bantuan ngenten, pun supe simbah wangsul bantuan ngenten-ngenten niki. Nggeh terakhir niku bangun niku kamar mandi.
4	Bapak Sunar	Adanya program ini sangat mengurangi beban warga mbak, yang memang rumahnya sudah tidak layak
5	Mbah Tunj	Njih alhamdulillah nak.
6	Bapak Mujiono	Programme sangat bermanfaat membantu warga yang kurang mampu.
7	Bapak Sudarto	Lanjutkan, untuk penerimanya semoga terpilih yang bener-bener tidak mampu.
8	Bapak Mat Kosim	Sangat bermanfaat mbak, orang bisa mempunyai rumah layak huni karena program ini.
9	Bapak Wawan	Yaa bantuan yang dibutuhkan masyarakat kurang mampu mbak
10	Bapak Fatkhur Rohman	Bantuane sesuai sing kene rasakno, isok bantu wong cilik

No	Nama CPB	Apa Harapan Bapak/Ibu untuk program bedah rumah ini ?
1	Ibu Laila	Yo mugo-mugo , nek dapet yo lumayan buat benemo iku plafon e podo rusak mbak, pingin dikeramik sisan rumahe.
2	Bapak Bunaji	Harapane mugi-mugi programe tiap taun onok terus, semugo aku isok entok bantuan
3	Mbah Juwariyah	Harapanipun kulo njih, mugi-mugi gusti Allah badhe ngabulaken panyuwunipun kulo
4	Bapak Sunar	Untuk harapannya, semoga memang benar-benar warga yang memang rumahnya tidak layak huni. Ya semoga memudahkan prosesnya
5	Mbah Tunj	Mugi-mugi
6	Bapak Mujiono	Program bedah rumah sangat membantu sekali, warga bisa memiliki rumah layak huni karena program ini
7	Bapak Sudarto	Semoga berkah bantuannya, dan dapat bermanfaat bagi masyarakat kecil

8	Bapak Mat Kosim	Semoga tahun depan dibanyakin lagi penerima bantuane
9	Bapak Wawan	Semugo aku oleh bantuan bedah rumah, pingin benemo kusen jendela, lan iku benemo dapur.
10	Bapak Fatkhur Rohman	Lancar semua dan gak pandang bulu nyeleksine

#### 6. Kecamatan Dawar Blandong

No	Nama CPB	Apa Tanggapan bapak/ibu dengan adanya program bedah rumah saat ini?
1	Bapak Khoirul Anam	Kulo sangat mendukung program ini karena membantu warga sekali
2	Mbah Ta'in	Bantuan niki nggeh sangat membantu sekali
3	Mbah Kami	Bersyukur sangat kulo nduk
4	Bapak Supangat	Syukur nak, kulo sangat mendukung program ini karena membantu warga sekali
5	Bapak Sumali	Iyo bagus mbak, wes suwe raonok program bantuan ngenengene iki maneh
6	Bapak Ainul Yaqin	Programnya sangat bagus perlu dukungan dari warga pisan,
7	Bapak Wiji Setiawan	Program sangat membantu orang bawah
8	Mbah Rumiati	Iyo bantu nemen bantuan iki, opomaneh ki omahku wes welek, butuh renovasi nanging ora duwe duit
9	Mbah Senatun	Njih. Njih sae, sae bantuan nopo bedah rumah niki. Terbantu banget
10	Bapak Nyaminyo	Tak dukung program iki dik, terusno sampe tahun ngarep

No	Nama CPB	Apa Harapan Bapak/Ibu untuk program bedah rumah ini ?
1	Bapak Khoirul Anam	Semoga bermanfaat bagi semuae
2	Mbah Ta'in	semugi programipun nambah sae, kalian kulo nggeh mug-mugi wangsul bedah rumah niki, badhe nambah plafon,
3	Mbah Kami	semugi kulo nggeh wangsul bantuan sakcepote, ben nek udan niki dalemembah pum mboten bocor maleh
4	Bapak Supangat	Harapannya panitia program bedah rumah sehat terus, programe makin gede, penerimane

		ditambah, dan ini paling berharap, semoga aku oleh bantuan bedah rumah, dungakno yo dik
5	Bapak Sumali	Harapannya omahku lolos program bedah rumah lan diwenehi kelancaran
6	Bapak Ainul Yaqin	yo mugo lancarlah program e tekan awal sampe akhir
7	Bapak Wiji Setiawan	Semoga lancar semua prosesnya, ndak ada masalah, yo semoga nek rezeki yo dapet bantuan ini. Aamiin
8	Mbah Rumiati	Semugi griyo kulo saget kantok bedah rumah, ngggeh nambahi plafon niki nak, mboten wonten plafon e griyane
9	Mbah Senatun	Omahku nek udan bocor, mugi-mugi aku entok bedah rumah ben gak kebocoran
10	Bapak Nyaminyo	Mugi-mugi oleh bantuan iki bedah rumah ben anak bojo ku seneng, omahe wes ga panas, bocor maneh

## 7. Kecamatan Sooko

No	Nama CPB	Apa Tanggapan bapak/ibu dengan adanya program bedah rumah saat ini?
1	Bapak Ali Asrofin	Programme wes apik semoga penerima nya benar-benar masyarakat yang membutuhkan
2	Bapak Sadi	Programnya bagus sangat membantu masyarakat kecil kayak saya dek
3	Bapak Bawon	Seneng aku mbak, wonten program bedah rumah nggenten, ngggeh ndukung rakyat cilik duwe omah layak mbak.
4	Bapak Rudi Salafudin	Program bantuan bedah rumah sudah baik
5	Mbah Wiji	Kulo mendukung banget nduk, ngggeh matusuwun wonten bantuan nggenten dateng pemerintah
6	Ibu Nur Chasanah	Iya terimakasih buat pemerintah, dengan adanya program ini bisa membantu warga yang kesusahan
7	Bapak Jajeri	Sudah baik mbak, ditingkatkan lagi penerima dan dananya kalo bisa
8	Bapak Untung	Sampun mantap mbak, mpun tepat penerima bantuane, niki mas-mas surveine ngggeh ramah-ramah. Mpun baguss pokoke
9	Bapak Abdul Rohman	Bantuannya sangat mendukung, orang-orang surveinya ramah-ramah, bagus pol wes
10	Mbah Kasipah	Niki mpun ecoh nduk, tiyange ngggeh luman-luman, bagus atine



No	Nama CPB	Apa Harapan Bapak/Ibu untuk program bedah rumah ini ?
1	Bapak Ali Asrofin	Lancar sak kabeh he, dana ne akeh. Lah aku isok entok bedah rumah
2	Bapak Sadi	Lancar semuanya sukses terus programnya, dan paling penting iki semog aku dapat bantuan
3	Bapak Bawon	Harapane kulo isok kantok bantuan niki entah tahun iki utowo taun ngarep
4	Bapak Rudi Salafudin	Harapannya program e onok terus, semoga aku entok bantuan pisan, alhamdulillah nek dapet ki arep ngerenovasi ubin.
5	Mbah Wiji	Nggeh pangarepnipun nggeh kulo angsal bantuan, tapi nggeh sakkersane Allah nggeh ya
6	Ibu Nur Chasanah	Semoga ditingkatkan pelayanan atau pembangunan programnya, dan dananya juga.
7	Bapak Jajeri	Ya harapannya semoga saya dapat bantuan mba soalnya ya saya pingin ini renovasi kusen, sama genteng tapi belum ada dana.
8	Bapak Untung	Yoo mugi-mugi bantuanipun berguna yo pastine sih, tapi ki saget dimanfaatkan secara baik karo penerimane, nggeh sisan aku yoo mugi-mugi angsal bantuan. Gawwe bangun pawon. Pawone jek tekan lemah mbak alase
9	Bapak Abdul Rohman	Semoga membawa berkah bagi penerimannya, dan program pemeintah yang sesuai dengan kebutuhan
10	Mbah Kasipah	Pangaripapipun nggeh mugi-mugi griya kulo niki siyos direnovasi.



**PEMERINTAHAN KABUPATEN MOJOKERTO**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN**  
**DAN PERHUBUNGAN**  
 JL. BRAWIJAYA NO 231, PUNGGING. TELP (0321) 320211  
**MOJOKERTO**

**VERIFIKASI LAPANGAN**

Desa : .

Sehubungan dengan adanya kegiatan peningkatan kualitas rumah layak huni DAK TA 2018 bidang perumahan, maka diadakan verifikasi lapangan kepada :

Nama :

Alamat:

NIK :

Menerangkan bahwa hasil verifikasi lapangan sebagai berikut :

No	Uraian	Ada	Tidak	Keterangan
1.	WNI sudah berkeluarga			
2.	Memiliki tanah dibuktikan dengan legalitas kepemilikan			
3.	Belum Memiliki rumah untuk kegiatan pembangunan baru			
4.	Memiliki dan menempati rumah satu satunya dengan kondisi tidak layak huni			
5.	Belum pernah memperoleh bantuan rumah swadaya atau sejenisnya dari pemerintah			
6.	Berpenghasilan dibawah upah minimum			
7.	Sanggup berswadaya			
8.	Bersedia membentuk kelompok maksimal 10 orang			
9.	Bersedia membuat surat pernyataan antara lain : a. Bersedia bertanggungjawab dalam pemanfaatan bantuan, dan b. Bersedia mengikuti ketentuan bantuan rumah swadaya			

Demikian hasil verifikasi lapangan beserta lampiran dokumen terkait untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mojokerto,.....

Di Verifikasi oleh

Tenaga Fasilitator Lapangan

Calon Penerima Bantuan





PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jalan Jenderal A. Yani Nomor 16 Mojokerto Kode Pos 61318 Jawa Timur  
 Telp./Fax. (0321) 321 953  
 Website : <http://bakesbangpol.mojokertokab.go.id>

### REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 070/ **SLC** /416-206/2018

- Dasar :
- a. Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, tanggal 10 April 2018 Nomor : 4567/UN10.F03.12.11/PN/2018, perihal Surat Permohonan Ijin Survey;
  - b. Disposisi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat tanggal 12 April 2018 Nomor : 072/4956/416-206/2018;
  - c. Pertimbangan dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto, tanggal -- April 2018 Nomor : 600/590/416-104/2018, perihal Tidak Keberatan Dilaksanakan Penelitian/ Survey/Kegiatan;

Menimbang : Hasil verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto, berkas persyaratan administrasi telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 66 Tahun 2012.

Bupati Mojokerto, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama Penanggungjawab : Nur Aini Widyastuti
- b. Alamat Penanggungjawab : Jl Pagerluyung Rt 03 Rw 01 Kec. Gedeg Kabupaten Mojokerto  
Nomor Telp./HP : 081216117892
- c. Asal Instansi/Organisasi/Lembaga : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
- d. Pekerjaan : Mahasiswi
- e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk mengadakan Penelitian/Survey/Kegiatan, dengan :

- a. Judul Penelitian /Kegiatan : Implementasi Program Bedah Rumah dalam Mewujudkan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mojokerto (Studi di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto)
- b. Tujuan Penelitian/Kegiatan : Mengetahui Implementasi Program Bedah Rumah dalam Mewujudkan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mojokerto
- c. Lokasi Penelitian/Kegiatan : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto
- d. Lama Penelitian/Kegiatan : 2 (dua) Bulan, 23 April s.d 18 Juni 2018
- e. Bidang Penelitian/Kegiatan : Bidang Pembangunan
- f. Status Penelitian/Kegiatan : Mandiri
- g. Jumlah Anggota Peneliti/Kegiatan : -
- h. Nama Anggota Penelitian/Kegiatan : -

Dengan Ketentuan : Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/kegiatan serta bersedia melaporkan hasil dari penelitian/kegiatan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, 20 April 2018  
 a.n. BUPATI MOJOKERTO  
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN MOJOKERTO  
 u.b.  
 Kepala Bidang Kewaspadaan dan Kastra

**MUJIONO, S.Pd., S.Sos., M.M.**  
 Kepala Bidang  
 NIP. 19680514 199302 1 003

#### TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bpk. Bupati Mojokerto (sebagai Laporan);
- 2. Sdr. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto;
- ③ Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.





**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Jenderal A. Yani Nomor 16 Mojokerto Kode Pos 61318 Jawa Timur

Telp./Fax. (0321) 321 953

Website : <http://bakesbangpol.mojokertokab.go.id>

**REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN**

Nomor : 070/ **427** /416-206/2018

- Dasar : a. Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, tanggal 8 Maret 2018 Nomor : 3260/UN10.F03.12.11/PN/2018, perihal Surat Permohonan Ijin Survey;  
 b. Disposisi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat tanggal 20 Maret 2018 Nomor : 072/3808/416-206/2018;  
 c. Pertimbangan dari Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto, tanggal 21 Maret 2018 Nomor : 072/285/416-201/2018, perihal Tidak Keberatan Dilaksanakan Penelitian/ Survey/ Kegiatan;

Menimbang : Hasil verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto, berkas persyaratan administrasi telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 66 Tahun 2012.

Bupati Mojokerto, memberikan rekomendasi kepada :

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| a. Nama Penanggungjawab             | : Nur Aini Widyastuti                                     |
| b. Alamat Penanggungjawab           | : Dsn. Pagerluyung Rt.03 Rw.01 Ds. Pagerluyung Kec. Gedeg |
| Nomor Telp./HP                      | : Kab. Mojokerto / 081216117892                           |
| c. Asal Instansi/Organisasi/Lembaga | : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya        |
| d. Pekerjaan                        | : Mahasiswi   |
| e. Kebangsaan                       | : Indonesia   |

Untuk mengadakan Penelitian/Survey/Kegiatan, dengan :

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| a. Judul Penelitian /Kegiatan       | : Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Bank Jatim Pada Program Bedah Rumah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat            |
| b. Tujuan Penelitian/Kegiatan       | : Mengetahui Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Bank Jatim Pada Program Bedah Rumah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat |
| c. Lokasi Penelitian/Kegiatan       | : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto  |
| d. Lama Penelitian/Kegiatan         | : 2 (dua) Bulan, 28 Maret 2018 s.d 28 Mei 2018  |
| e. Bidang Penelitian/Kegiatan       | : Pembangunan   |
| f. Status Penelitian/Kegiatan       | : Mandiri   |
| g. Jumlah Anggota Peneliti/Kegiatan | : -   |
| h. Nama Anggota Penelitian/Kegiatan | : -   |

Dengan Ketentuan : Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/kegiatan serta bersedia melaporkan hasil dari penelitian/kegiatan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, 23 Maret 2018

a.n. BUPATI MOJOKERTO

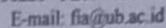
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN MOJOKERTO

Kepala Bidang Kewaspadaan dan Kastra



**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Bpk. Bupati Mojokerto (sebagai Laporan);  
 2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto;  
 3. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.



## 199